



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan strategi Sanitasi disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dalam memelihara dan melindungi kondisi lingkungan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target Sanitasi yang sistematis, terencana, terpadu, dan terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta lintas sektor lainnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menyusun strategi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2024-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan Sanitasi.
6. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan Sanitasi secara komprehensif dalam rangka memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan Sanitasi dengan tujuan agar pembangunan Sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

7. Persampahan adalah sisa buangan dari barang atau produk yang sudah tidak digunakan lagi.
8. Air Limbah Domestik adalah air sisa dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
9. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air baik kelebihan air yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan Sanitasi dan memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan Sanitasi di Daerah yang meliputi sektor Air Limbah Domestik, Persampahan, dan Drainase perkotaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. membangun Sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di Daerah;
- b. mengidentifikasi isu dan permasalahan pembangunan bidang Sanitasi di Daerah; dan
- c. merumuskan strategi, program dan kegiatan pembangunan bidang Sanitasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA DAN PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Sistematika dokumen SSK meliputi:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : profil Sanitasi saat ini;
 - c. bab III : kerangka pengembangan Sanitasi;
 - d. bab IV : strategi pengembangan Sanitasi;
 - e. bab V : program, kegiatan, dan indikasi pendanaan Sanitasi;
 - f. bab VI : monitoring dan evaluasi capaian SSK; dan
 - g. bab VII : penutup.

- (2) SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menangani sektor Air Limbah Domestik dan Drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani sektor Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan pelaksanaan SSK minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk sektor Air Limbah Domestik dan Drainase perkotaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk sektor Persampahan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan terkait SSK yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap merupakan bagian dari Dokumen SSK Tahun 2024-2027.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2024
STRATEGI
SANITASI KABUPATEN TAHUN 2024-
2027

STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2024 – 2027

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sanitasi adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dideklarasikan pada 2010 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sayangnya, tidak semua orang di Indonesia beruntung untuk bisa memiliki akses terhadap sistem sanitasi yang baik dan bersih, sehingga rentan terkena berbagai penyakit akibat buruknya kondisi lingkungan. Percepatan pembangunan sanitasi di Indonesia menjadi sesuatu yang mendesak untuk segera dibenahi. Bukan hanya dengan meningkatkan jumlah dan mutu sarannya, tapi juga dengan memperbaiki perilaku masyarakatnya. Peningkatan ketersediaan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar, pencemaran lingkungan dapat berkurang sehingga suatu daerah akan memiliki lingkungan fisik yang lebih bersih. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat masyarakat lebih sehat dan penyakit akibat buruknya sanitasi dapat dihindari.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan suatu upaya terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi dan perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Melalui PPSP ini diharapkan pembangunan sanitasi sebagai dapat urusan bersama antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, donor, dan masyarakat. PPSP juga dilakukan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Sustainable Development Goals.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) melakukan penyusunan SSK. SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dalam rangka memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

SSK dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun atau jangka menengah. Perencanaan dalam SSK diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sanitasi Kabupaten Sukoharjo untuk mencapai visi sanitasi. SSK menjadi acuan penyusunan strategi serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, penyusunan program jangka menengah dan tahunan, dan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang terlibat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menyusun SSK periode 2015-2019, sehingga telah habis masa perencanaannya. Diperlukan upaya pemutakhiran SSK sehingga terjadi sinkronisasi dengan target RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2014 dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, dan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Selain itu pemutakhiran SSK juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dokumen dengan memperbaharui data profil sanitasi dan hasil studi EHRA yang dilakukan tahun 2021. Pemutakhiran SSK disusun sebagai penjabaran operasional dari RPJMD khususnya bidang sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif dengan mengakomodasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pembangunan Kota (SKPK).

Penyusunan SSK tidak lepas dari dokumen perencanaan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo. Peran dan fungsi SSK dengan dokumen perencanaan lainnya cukup strategis, antara lain:

1) Peran dan Fungsi RPJPD Kabupaten Sukoharjo dengan Strategi Sanitasi Kota

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-

2025 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan SSK Kabupaten Sukoharjo.

2) Peran dan Fungsi RPJMD Kabupaten Sukoharjo dengan Strategi Sanitasi Kota

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo eksisting adalah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan periode RPJMD Kabupaten Sukoharjo, maka dokumen Pemutakhiran SSK dapat diselaraskan dengan RPJMD dan dapat menjadi rujukan OPD dalam penyusunan Renstra sektor sanitasi.

3) Peran dan Fungsi Strategi Sanitasi Kota dengan Renstra OPD

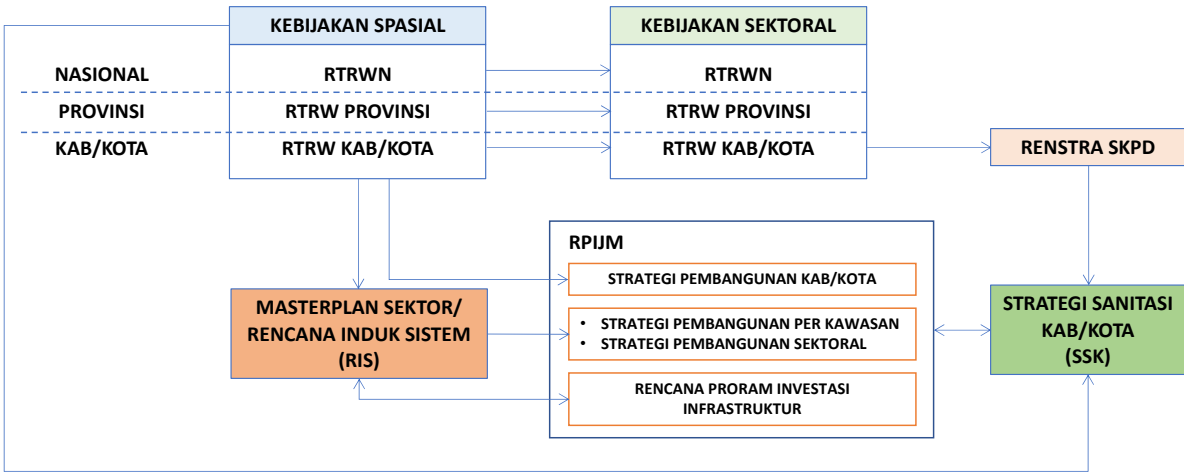
Dokumen Pemutakhiran SSK selesai disusun pada akhir Tahun 2022, seharusnya dokumen Pemutakhiran SSK ini menjadi masukan OPD dalam penyusunan renstranya khususnya sektor sanitasi untuk Tahun 2023. Peran Pokja PKP Kabupaten Sukoharjo menjadi penting dan strategis yaitu bertugas untuk mengawal agar SSK masuk kedalam renstra OPD dan selanjutnya menjadi renstra Kabupaten Sukoharjo yang baru.

4) Peran dan Fungsi Strategi Sanitasi Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo 2023-2027. Dimana untuk rencana perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan analisis dan perencanaan dalam RTRW. Pemutakhiran SSK mengarah pada urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terdapat korelasi positif dengan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo.

5) Peran dan Fungsi Strategi Sanitasi Kota dengan Pencapaian Tujuan SDG's

SDG's merupakan paradigma baru dalam pembangunan berkelanjutan, dari 17 tujuan/goal dalam SDG's, terdapat 1 (satu) rencana yang berkaitan langsung/membahas langsung sanitasi yaitu goal ke_6 "Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan". Tujuan SSK Sukoharjo selaras dengan pencapaian tujuan dalam SDG's.

Penjelasan tentang hubungan antara SSK dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hubungan SSK Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berikut merupakan Target Pencapaian Indikator Sanitasi aman berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel I. 1
Target Capaian Sanitasi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Target RPJMN 2024	Target RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2024
1	Air Limbah		
	- Layak	90%	95%
	- Aman	15%	20%
2	BABs	0%	0%
3	Persampahan		
	- Penanganan	80%	75%
	- Pengurangan	20%	25%

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2020-2024.

1.2. Metodologi Penyusunan

Metode yang dipakai dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini disusun oleh Pokja PKP Kabupaten Sukoharjo secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metode yang dilakukan dengan menggunakan metode sesuai Pedoman SSK sebagai berikut:

1.2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain:

- a. *Desk Study* (Kajian Literature, Data Sekunder);
- b. *Field Research* (Observasi, Wawancara Responden); dan

c. FGD (*Focus Group Discussion*) dan *In-Depth Interview*.

Data yang diperlukan dalam penyusunan SKK meliputi:

1. Data study EHRA.
2. Data keberfungsian SPALD Setempat meliputi:
 - a. data kepemilikan tangki septik aman, layak, belum layak, dan tangki septik Bersama.
 - b. data kepemilikan jamban sehat permanen dan semi permanen.
 - c. data keberfungsian IPLT.
 - d. data kondisi eksisting truk tinja.
 - e. data pelayanan IPLT.
3. Data keberfungsian SPALD Terpusat meliputi data keberfungsian IPALD terbangun.
4. Data pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo yang meliputi:
 - a. data sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah.
 - b. data jumlah TPS.
 - c. data keberfungsian TPS 3R dan Bank Sampah.
 - d. data sarana pewadahan sampah.
 - e. data keberfungsian TPA.
 - f. data pelayanan sampah.
5. Data kondisi eksisting drainase di Kabupaten Sukoharjo.
6. Data kependudukan.
7. Peta dan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo.
8. Peta dan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sukoharjo.
9. Peta dan sistem pengelolaan drainase di Kabupaten Sukoharjo.
10. Data pendanaan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo.
11. Data kelembagaan OPD terkait dengan sanitasi.

Penyusunan SKK menggunakan beberapa data yang berasal dari beberapa sumber antara lain:

- a. Hasil studi terkait dengan sanitasi (masterplan perencanaan sanitasi yang tersedia).
- b. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), baik langsung maupun tidak langsung seperti: data primer, data sekunder, proposal, laporan, dokumentasi, rencana strategi dan peta.
- c. Narasumber, yang berasal dari beragam posisi jabatan dari beberapa OPD.

d. Tokoh masyarakat dan masyarakat sipil.

1.2.2. Teknik Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data

Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik yaitu Microsoft Excel. Sedangkan untuk visualisasi data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram dan peta. Data-data yang bersifat penjelasan dipresentasikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian. Dilakukan analisis kebutuhan data dalam penyusunan SSK berdasarkan buku Outline Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan instrument yang tersedia. Selain itu juga dilakukan sinkronisasi Pemutakhiran SSK 2023-2027 dengan dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dalam penyusunan SSK beberap hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. target harus terukur dan memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound Goals*).
- b. isu strategis menyesuaikan dengan kondisi eksisiting.
- c. keterkaitan logis antara visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan.
- d. penyusunan program disertai dengan indikasi pembiayaan, waktu pelaksanaan, sumber pembiayaan dan OPD penanggung jawab.
- e. program dan kegiatan mencakup SIDLACOM (*Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance*).

1.2.3. Proses Penulisan

Proses dalam penulisan pemutakhiran SSK berdasarkan semua output, baik yang berupa draf bab-bab SSK ataupun hasil-hasil lain dari setiap proses penyusunan SSK. Karena itu dalam proses penulisan SSK lebih banyak menyunting dan menyelaraskan bahasanya, serangkaian kegiatan dan metode yang dilakukan dengan menggunakan metode sesuai buku panduan penyusunan SSK. Panduan praktis penyusunan pemutakhiran SSK sebagai berikut:

- a. berdasarkan *template* buku Outline Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
- b. konsistensi serta data/informasi minimum yang perlu dituliskan pada setiap bab.
- c. menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas.

1.2.4. Proses Penyepakatan

Penyepakatan data yang akan digunakan untuk melengkapi dokumen ini diperoleh melalui diskusi (focus group discussion) yang dilakukan secara mendalam oleh pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi dilaksanakan untuk

memberikan gambaran yang jelas terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo. Penyepakatan data dalam SSK meliputi:

- a. data eksisting Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase bersumber dari OPD terkait;
- b. profil sanitasi, berdasarkan hasil studi EHRA dan kondisi sanitasi eksisting;
- c. penyepakatan visi dan misi sanitasi;
- d. penyepakatan arah pengembangan strategi meliputi kebijakan dan Arah Strategi, Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Pembangunan Sanitasi, Tujuan, Sasaran pengelolaan sanitasi.

1.3. Dasar Hukum

Kegiatan pengembangan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada peraturan dan produk hukum, yang meliputi:

- a. Undang-Undang
 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penatagunaan Tanah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Presiden
1. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
 2. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Rakyat Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Menteri
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Sektor Air Limbah Permukiman;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Sumber Daya Air;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ Tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 17. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/M/PPN/HK/01/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional;
 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ/2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah;

19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9288/SJ/2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Kabupaten/Kota;
 20. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku Ketua Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional Nomor Kep. 23/D.VI/02/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional;
 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Irigasi;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 910/06715 tanggal 27 Maret 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 Tentang

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen pendahuluan pekerjaan “Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo” terdiri dari 6 bab yang meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI

Menjelaskan secara rinci gambaran wilayah Kabupaten Sukoharjo, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini berdasarkan hasil pengisian instrument profil dan peta area berisiko sanitasi

BAB 3 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Merupakan arah pengembangan sanitasi 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup visi dan misi sanitasi Kabupaten Sukoharjo, pentahapan pengembangan sanitasi sesuai dengan zona dan sistem sanitasi yang direkomendasikan serta analisis kemampuan pendanaan sanitasi Kabupaten Sukoharjo.

BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Memuat strategi pengembangan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, drainase perkotaan, perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT).

BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Menyajikan tentang ringkasan program dan anggaran, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non-pemerintah danantisipasi *funding gap* atau kesenjangan pendanaan.

BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Merupakan uraian tentang upaya monitoring dan evaluasi capaian SSK. Selain penjelasan diatas, dokumen ini dilengkapi pula dengan lampiran yang akan menunjang kelengkapan dokumen sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan implementasi nantinya, berikut ini lampiran-lampiran yang akan disajikan pada dokumen ini:

- a. Lampiran I : Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA
- b. Lampiran II : Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah
- c. Lampiran III : Peta rencana pengembangan berdasarkan rencana induk
- d. Lampiran IV : Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK
- e. Lampiran V : Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan.

BAB II
PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Umum Wilayah
2.1.1. Kondisi Administrasi

Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo terletak diantara 6 (enam) Kabupaten/Kota, yang berbatasan langsung secara administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

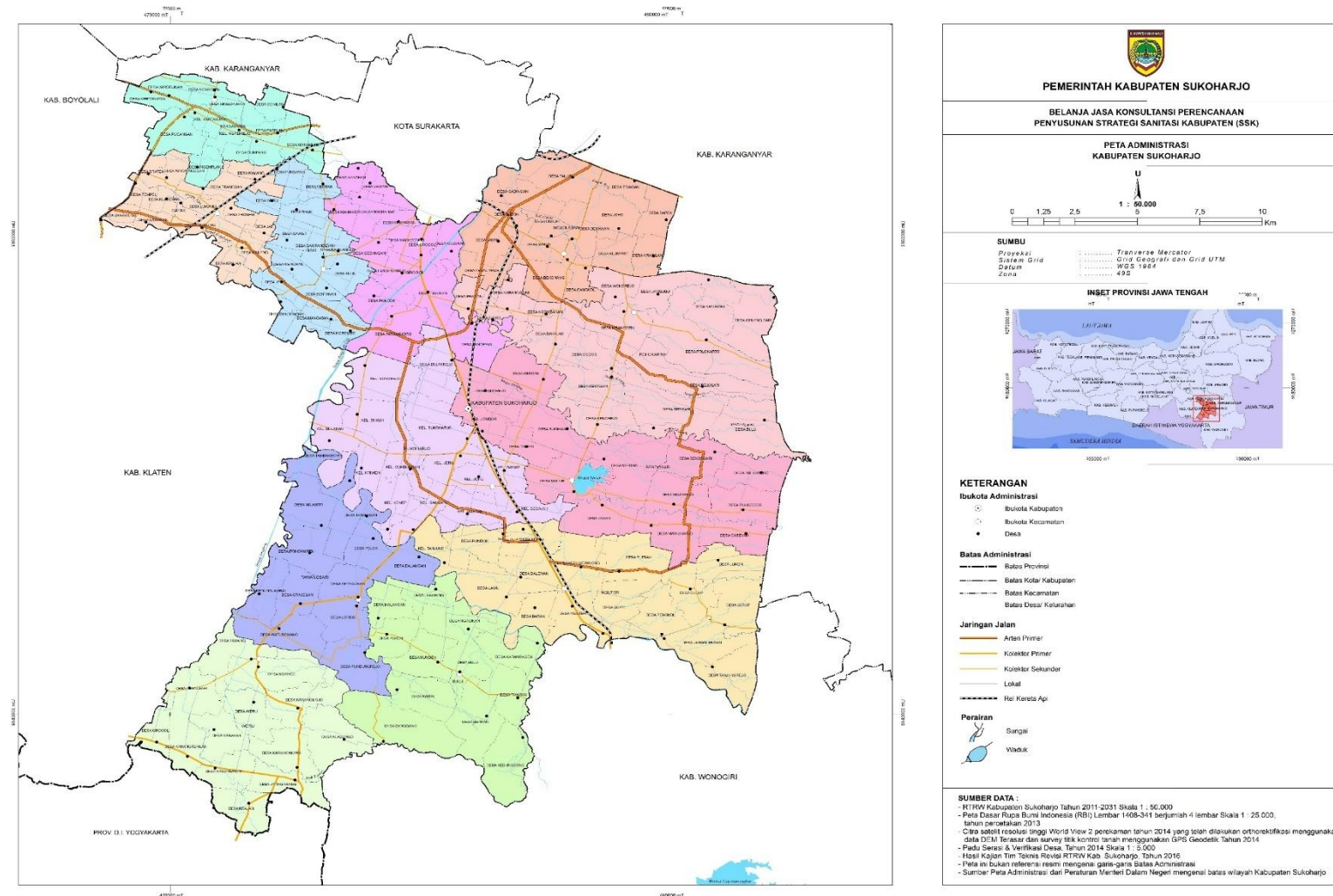
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo mempunyai posisi yang strategis, yakni terletak persimpangan jurusan Semarang, Yogyakarta, Solo dan termasuk di dalam kawasan strategis SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) yang dapat mendukung perkembangan pembangunan khususnya bidang potensial di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam Tabel II.1 disajikan data nama kecamatan disertai luas wilayah dan jumlah kelurahan dan desa.

Tabel II.1
Luas, Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Kecamatan Weru	4.198	13	0
2	Kecamatan Bulu	4.386	12	0
3	Kecamatan Tawang Sari	3.998	12	0
4	Kecamatan Sukoharjo	4.458	0	14
5	Kecamatan Nguter	5.488	16	0
6	Kecamatan Bendosari	5.299	13	1
7	Kecamatan Polokarto	6.218	17	0
8	Kecamatan Mojobalan	3.554	15	0
9	Kecamatan Grogol	3.000	14	0
10	Kecamatan Baki	2.197	14	0
11	Kecamatan Gatak	1.947	14	0
12	Kecamatan Kartasura	1.923	10	2
Total		49.323	150	17

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2022



Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2011-2030

2.1.2. Topografi

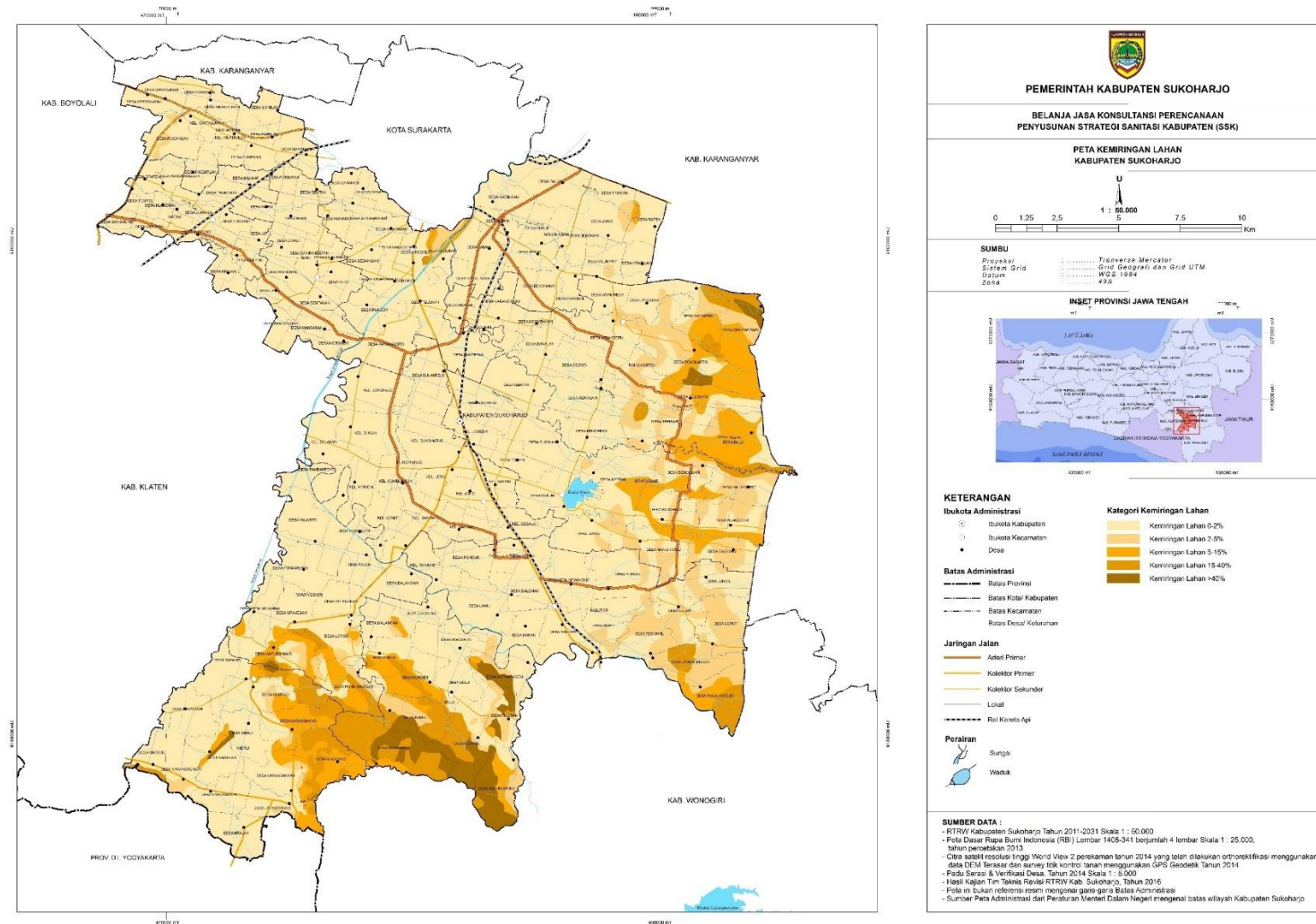
Kelerengan atau kemiringan lahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dibedakan menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu:

- a. Kemiringan 0-2%, meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
- b. Kemiringan 2-5%, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura.
- c. Kemiringan 5-15%, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, dan Kecamatan Tawang Sari
- d. Kemiringan 15–40%, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, dan Kecamatan Tawang Sari.

Tabel II. 2
Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (m)

No	Kecamatan	Tinggi DPL (m)
1	Weru	107
2	Bulu	114
3	Tawang Sari	102
4	Sukoharjo	95
5	Nguter	104
6	Bendosari	116
7	Polokarto	125
8	Mojolaban	104
9	Grogol	89
10	Gatak	105
11	Baki	118
12	Kartasura	121

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2022



Gambar 2. 2
Peta Kelerengan Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2011-2030

2.1.3. Hidrologi

Kondidisi hidrogeologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan sumber dari Peta Hidrogeologi Jawa Tengah (DGTL, Bandung) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Daerah aquifer produksi dengan penyebaran luas. Aquifer dengan keterusan sedang tinggi pisiometri air tanah atau muka air tanah di atas atau dekat dibawah muka tanah: debit sumur umumnya 5-10 (lima sampai sepuluh) liter/detik. Daerah ini meliputi kecamatan Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak, dan Kartasura. Umumnya pada daerah ini mempunyai struktur tanah endapan vulkanik muda yang terdiri dari tufa, lahar, breksi, dan lava andesit sampai basal dengan kelulusan tinggi hingga sedang. Kelulusan tinggi terutama pada endapan lahar dan aliran lava visikular.
- b. Daerah aquifer dengan produktifitas sedang, penyebaran luas. Aquifer dengan produktifitas sedang sampai rendah: muka air tanah beragam dari dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 (sepuluh) m. debit sumur umumnya kurang dari 5 (lima) liter/detik. Daerah ini meliputi: Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Grogol, Baki, Gatak, dan Kartasura. Pada umumnya daerah ini mempunyai struktur tanah berupa alluvium endapan daratan, berbutir kasar hingga sedang (kerikil dan pasir) dengan sisipan lempungan. Kelulusan tinggi sampai sedang. Disamping juga terdapat struktur tanah endapan vulkanik muda yang terdiri dari tufa, lahar, breksi dan lava andesit sampai basal. Kelulusan tinggi hingga sedang, kelulusan tinggi terutama pada endapan lahar dan aliran lava vesikular.
- c. Aquifer dengan produktifitas sedang, terdapat setempat-setempat. Aqifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 (lima) liter/detik. Daerah ini meliputi: Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari dan Sukoharjo. Pada umumnya di daerah ini mempunyai struktur tanah berupa alluvium endapan daratan, berbutir kasar hingga sedang (kerikil dan pasir) dengan sisipan lempungan. Kelulusan tinggi sampai sedang.
- d. Aquifer dengan produktifitas tinggi, penyebaran luas. Aquifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit sumur umumnya leih dari 5 (lima) liter/detik. Daerah ini meliputi Kecamatan Nguter, Bendosari, Polokarto, dan Mojolaban. Pada umumnya di daerah ini mempunyai struktur tanah berupa batuan vulkanik kwarter tua. Kelulusan rendah sampai sedang, tergantung banyaknya celah-celah. Disamping itu juga terdapat struktur tanah berupa endapan vulkanik muda, terdiri dari

tufa, lahar, breksi dan lava andesit sampai basal. Kelulusan tinggi terutama pada endapan lahar dan aliran lava vesikular.

- e. Daerah air tanah langka meliputi Kecamatan Weru dan Bulu. Pada umumnya di daerah ini mempunyai struktur tanah berupa seri dari campuran endapan vulkanik dengan endapan sedimen marin (batu gamping, napal, serpih, batu pasir dan konglomerat). Umumnya berkelulusan rendah.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan cekungan antara Gunung api Merapi-Merbabu dan Gunung Lawu atau inter montane basin yang mempunyai potensi air tanah cukup baik. Berdasarkan pada perhitungan debit air tanah bebas pada wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 151.013.120,24 (seratus lima puluh satu juta tiga belas ribu seratus dua puluh koma dua puluh empat) m³ /tahun.

2.1.4. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki jenis iklim tropis dan berhawa sejuk. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Sukoharjo sebesar 24,94 (dua puluh empat koma sembilan puluh empat) dan jumlah curah hujan Tahun 2020 sebanyak 3.068 (tiga ribu enam puluh delapan) mm. Berdasarkan Tabel II.3 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah curah hujan setiap tahunnya. Sedangkan pada jumlah hari hujan pada Tahun 2020 sebesar 123 (seratus dua puluh tiga) hari. Jumlah hari hujan terbanyak adalah 19 (sembilan belas) hari dan jumlah curah hujan terbanyak pada Bulan Februari Tahun 2020 sebesar 501 (lima ratus satu) mm.

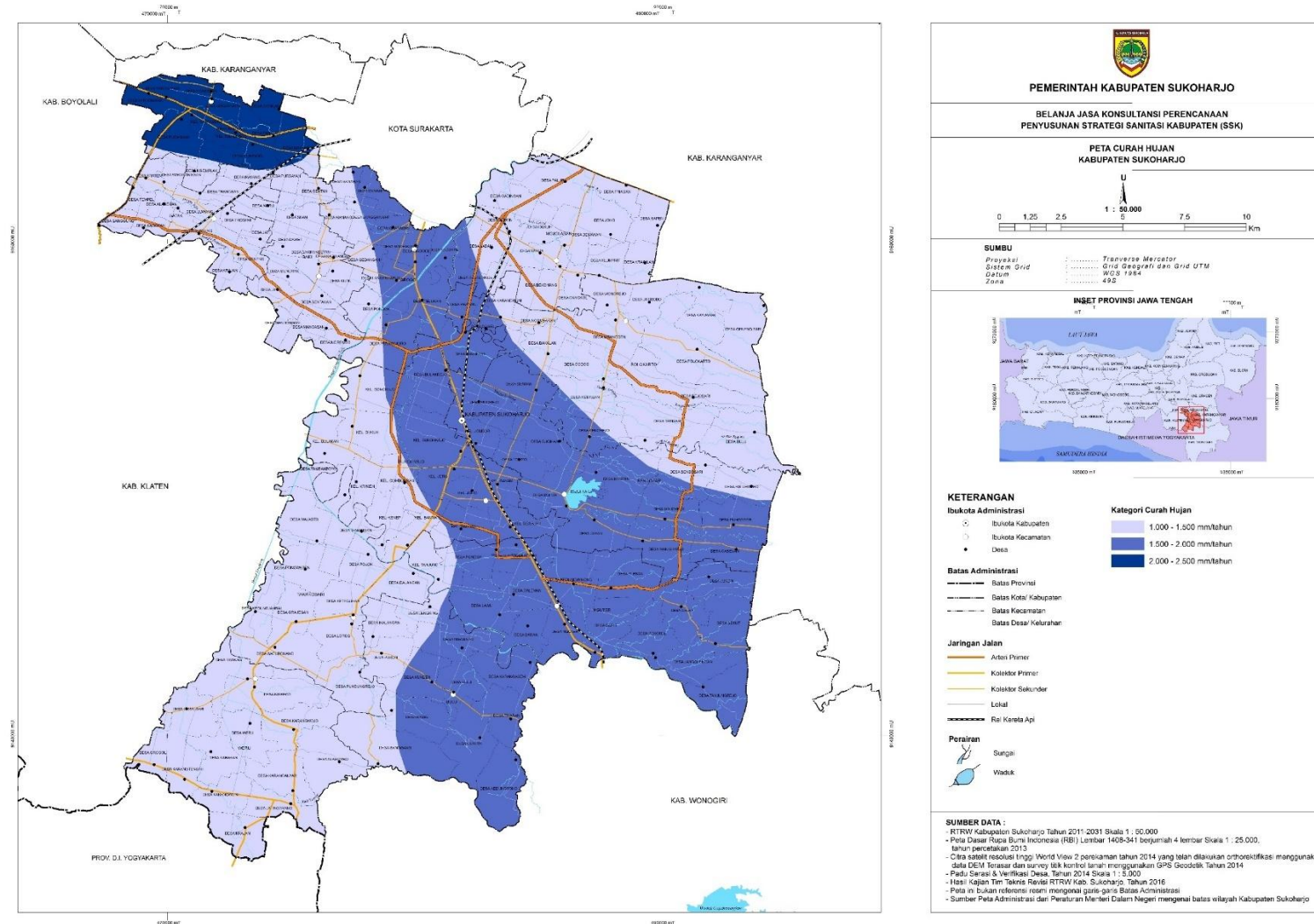
Tabel II. 3
Data Curah Hujan Bulanan Kabupaten Sukoharjo

Bulan	Curah Hujan			Hari Hujan		
	TAHUN					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	(mm)	(mm)	(mm)	(Hari)	(Hari)	(Hari)
Januari	284	391	428	14	16	19
Februari	417	501	368	21	19	18
Maret	379	469	311	16	14	14
April	367	384	240	10	13	10
Mei	103	266	145	3	11	7
Juni	49	81	185	1	3	9
Juli	0	72	20	0	3	1
Agustus	0	78	41	0	3	3
September	0	21	99	0	2	6
Oktober	0	180	88	0	9	6
November	127	167	463	9	12	19
Desember	299	458	358	16	18	16

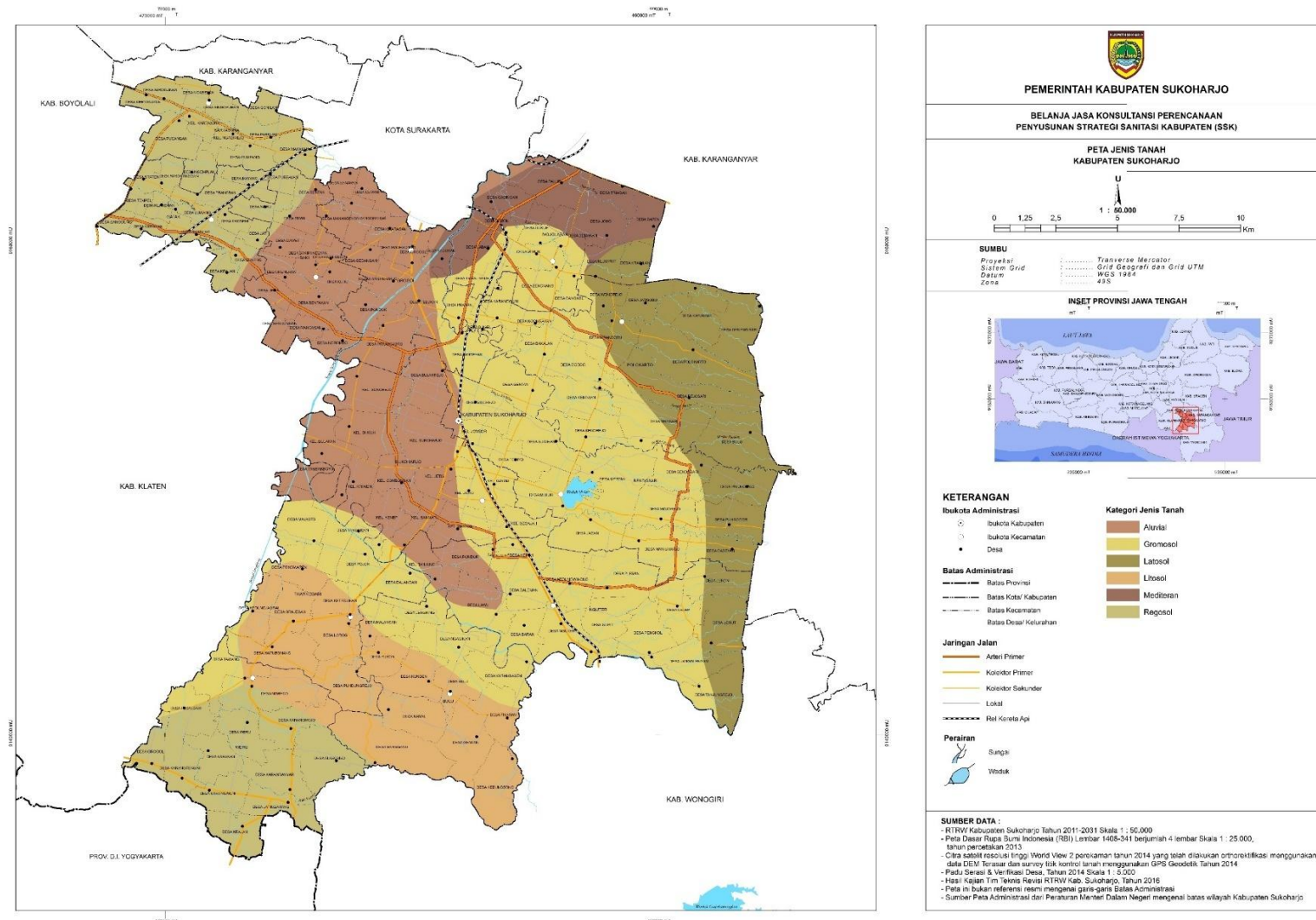
Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2022

2.1.5. Geologi

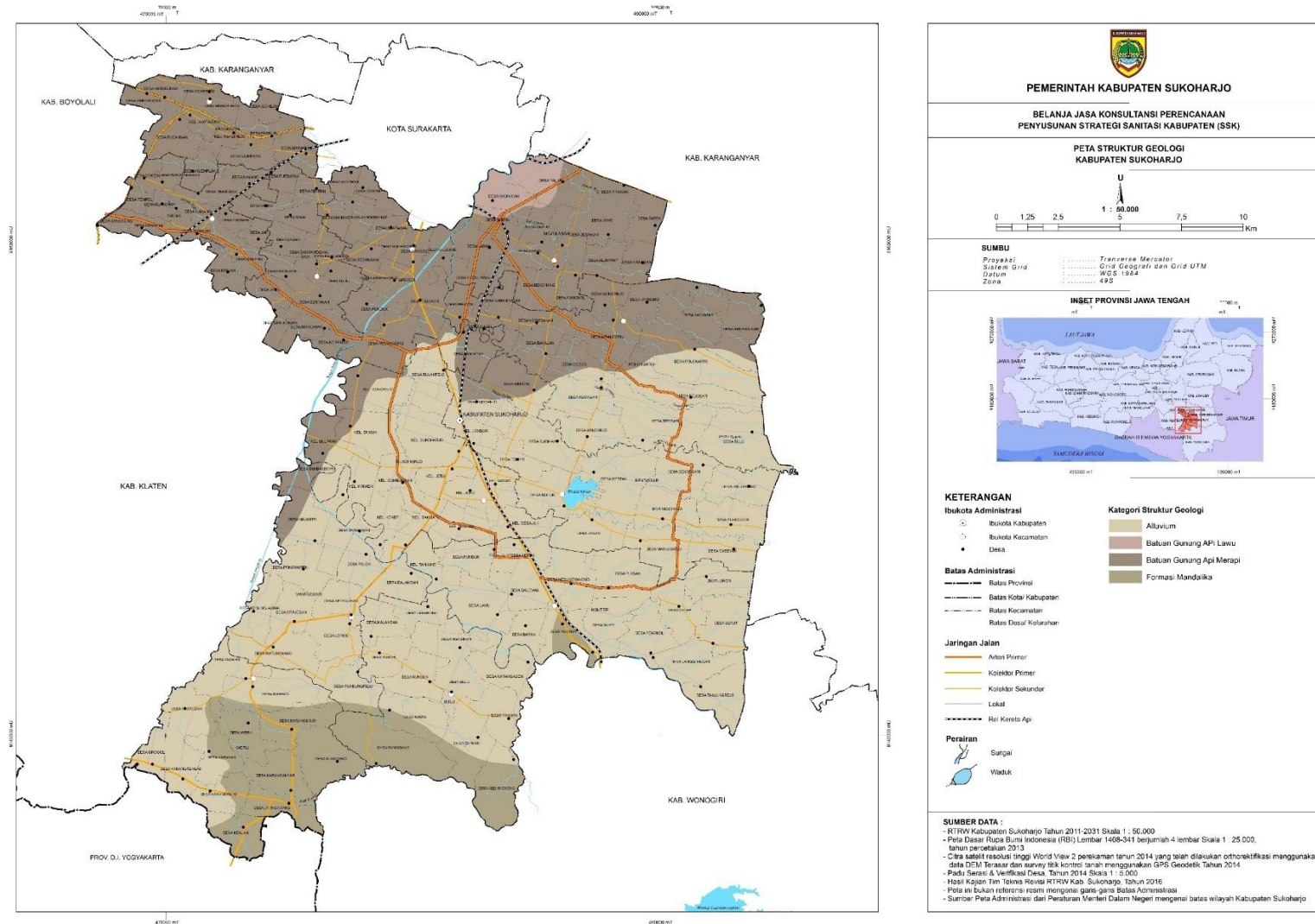
Ditinjau dari segi geologi, terdapat tiga jenis geologi yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pada bagian utara, yaitu pada Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, dan Kecamatan Polokarto banyak disusun oleh breksi gunung api. Hal ini terjadi karena masih berdekatan dengan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terdapat pada Kabupaten Boyolali. Pada bagian tengah, yaitu pada Kecamatan Sukoharjo, Polokarto, Bendosari, Tawang Sari, Bulu, dan sebagian Kecamatan Weru banyak didominasi oleh lempung, lanau, dan pasir. Sedangkan lava andesit hanya terdapat sedikit pada bagian selatan, yaitu pada Kecamatan Weru dan Bulu.



Gambar 2.3
Peta Curah Hujan Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2011-2030



Gambar 2. 4
 Peta Jenis Tanah Kabupaten Sukoharjo
 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2011-2030



Gambar 2. 5
Peta Geologi Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2011-2030

2.1.6. Demografi

2.1.6.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Apabila dilihat dari penyebaran penduduk, persentase Kecamatan Grogol paling tinggi yaitu 14,12%, kemudian Kecamatan Kartasura 12,79%, Kecamatan Sukoharjo 10,69% sedangkan yang terkecil Kecamatan Bulu 3,76%. Kepadatan penduduk diarea terbangun pada Tahun 2021 tercatat Kartasura merupakan kecamatan dengan penduduk paling padat yaitu 142,24 (seratus empat puluh dua koma dua puluh empat) jiwa per ha. Sedangkan Kecamatan Bulu paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 30,25 (tiga puluh koma dua puluh lima) jiwa per ha. Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan yang terdiri dari kategori perdesaan 20 (dua puluh) desa dan perkotaan 147 (seratus empat puluh tujuh) desa/kelurahan. Sehingga wilayah perkotaan di Kabupaten Sukoharjo lebih banyak dari pada wilayah perdesaan.

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
Weru	2	11	1378,75	9667	47929	3223	15980	41,77
Bulu	4	8	1236,63	10898	26514	3634	8841	30,25
Tawang Sari	0	12	1479,26	0	56149	0	18720	37,96
Sukoharjo	0	14	1649,46	0	97007	0	32339	58,81
Nguter	6	10	1647,24	17791	37402	5932	12471	33,51
Bendosari	6	8	1484,61	17011	46643	5672	15549	42,88
Polokarto	2	15	2043,15	6927	78749	2310	26255	41,93
Mojolaban	0	15	1307,21	0	91587	0	30533	70,06
Grogol	0	14	1134,05	0	120790	0	40269	106,51
Baki	0	14	858,77	0	70248	0	23421	81,80
Gatak	0	14	716,69	0	53082	0	17700	74,07
Kartasura	0	12	769,97	0	109522	0	36511	142,24

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2021; Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2022

2.1.6.2. Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu delapan tahun fluktuatif. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2021 sebanyak 7.384 jiwa (8,23%). Jumlah penduduk miskin Tahun 2021 bertambah sebanyak 480 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2020. Garis kemiskinan Tahun 2021 sebesar Rp. 410.273/kapita/bulan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.5 Untuk garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2021.

Tabel II. 5
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukoharjo, 2014–2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin
2014	291.949	78,90	9,18
2015	303.030	79,94	9,26
2016	327.217	78,91	9,07
2017	337.037	76,69	8,75
2018	345.363	65,43	7,41
2019	377.319	63,55	7,14
2020	393.776	68,89	7,68
2021	410.273	73,84	8,23

Sumber data: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2022

2.1.7. Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2021 yang berumur 15 tahun ke atas bekerja selama seminggu menurut status pekerjaan utama paling banyak dengan status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 243.017 jiwa. Sedangkan status pekerjaan utama yang paling sedikit adalah pekerja bebas sebanyak 8.552 jiwa. Jumlah laki-laki yang mempunyai pekerjaan lebih banyak daripada perempuan, yaitu 259.000 jiwa (laki-laki) dan 187.293 jiwa (perempuan). Selebihnya dapat dilihat pada Tabel II.6 berikut.

Tabel II. 6
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	51.402	48.124	99.526
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	25.523	15.899	41.422
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	13.056	2.038	15.094
Buruh/Karyawan/Pegawai	129.529	113.488	243.017
Pekerja Bebas	6.127	2.425	8.552
Pekerja Keluarga/tidak dibayar	33.363	5.319	38.682
Total	259.000	187.293	446.293

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2022

2.1.8. Pendidikan

Pada Tahun 2020 nilai APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 98,69, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 81,61. APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 64,89. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Secara umum,

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. APK pada jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2020 sebesar 105,90. Sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 90,82. APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 123,67.

Tabel II. 7
Angka Patisipasi Murni (APK) Dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Kelompok Usia Sekolah	APM		APK	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI	95,95	97,53	102,33	102,21
SMP/MTs	82,38	81,59	101,77	100,67
SMA/SMK/MA	64,43	63,26	83,41	84,16

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2022

2.1.9. Perekonomian Makro Kabupaten Sukoharjo

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Di Tabel II.8 ini ditampilkan data perkembangan PDRB menurut sektor di Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2017-2021.

Tabel II. 8
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021(Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.047,77	2.061,47	2.131,03	2.151,04	2.228,05
2	Pertambangan dan Penggalian	91,15	93,38	91,87	91,67	93,10
3	Industri Pengolahan	9.271,98	9.871,78	10.429,13	10.141,92	10.408,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31,56	33,05	34,79	33,96	35,54

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,16	9,55	10,21	10,45	10,83
6	Konstruksi	1.564,78	1.652,48	1.747,17	1.697,17	1.768,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.462,75	4.669,00	4.927,40	4.755,07	5.026,00
8	Transportasi dan Pergudangan	882,05	945,86	1.016,76	693,92	720,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	908,70	975,84	1.048,73	972,52	1.021,84
10	Informasi dan Komunikasi	1.382,47	1.522,57	1.680,57	2.113,40	2.317,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	855,86	891,13	922,06	943,32	959,11
12	Real Estate	606,42	645,55	686,67	687,22	701,09
13	Jasa Perusahaan	93,34	101,31	110,76	108,90	112,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	519,08	541,76	562,40	548,84	544,43
15	Jasa Pendidikan	870,20	932,28	1.007,52	980,89	995,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222,73	241,28	259,11	288,32	288,49
17	Jasa Lainnya	343,94	375,77	410,27	397,90	402,28
PDRB		24.163,94	25.564,06	27.076,45	26.616,51	27.634,11

Keterangan: *) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2022

Berdasarkan Tabel II.8 di atas menunjukkan bahwa industri pengolahan memiliki peranan yang besar, yaitu sebesar 10.408,91 miliar rupiah di Tahun 2021. Sedangkan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memiliki peranan yang paling kecil dari pada sektor yang lain, hanya menyumbang sebesar 10,83 miliar rupiah di Tahun 2021.

2.1.10. Tinjauan Tata Ruang

Tujuan penataan ruang yang akan dicapai dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo pada prinsipnya sama dengan tujuan pembangunan pada umumnya dalam pola kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara utuh dan merata. Sedangkan sasaran penataan ruang yang nantinya akan dicapai adalah penggunaan segala sumber daya yang tersedia secara optimal dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan hidup baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Arah pengembangan tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.

2.1.10.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Sukoharjo terbentuk berdasarkan pola geografis wilayah yang meliputi topografi, bentuk wilayah dan pola jaringan utama aksesibilitas yang berbentuk jaringan jalan kolektor yang cenderung linier. Pengembangan struktur ruang kota di Kabupaten Sukoharjo juga diarahkan pada pola yang telah terbentuk dengan pengembangan wilayah di sekitarnya.

- a. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:
 1. Sistem pusat kegiatan.
 2. Sistem jaringan prasarana wilayah.
- b. Rencana sistem pusat kegiatan di Kabupaten Sukoharjo terdiri atas:
 1. Sistem perkotaan.

Dalam rencana sistem pusat pelayanan terdiri dari PKL dan PKLp serta pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang terdiri dari PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa serta PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, selanjutnya dapat ditetapkan struktur ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a) PKL meliputi:
 - 1) Kawasan perkotaan Kecamatan Sukoharjo; dan
 - 2) Kawasan perkotaan Kecamatan Kartasura
- b) PKLp meliputi kawasan perkotaan Kecamatan Grogol.
- c) PPK meliputi:
 - 1) Kawasan perkotaan Kecamatan Mojolaban
 - 2) Kawasan perkotaan Kecamatan Tawang Sari;
 - 3) Kawasan perkotaan Kecamatan Gatak;
 - 4) Kawasan perkotaan Kecamatan Baki;
 - 5) Kawasan perkotaan Kecamatan Polokarto;
 - 6) Kawasan perkotaan Kecamatan Bendosari;
 - 7) Kawasan perkotaan Kecamatan Nguter;
 - 8) Kawasan perkotaan Kecamatan Weru; dan
 - 9) Kawasan perkotaan Kecamatan Bulu.

2. Sistem perdesaan.

Rencana pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Sukoharjo dilakukan berdasarkan konsep pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yaitu satu satuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa pusat (Desa Pusat Pertumbuhan) dan desa-desa lain sebagai pendukungnya (*hinterland*). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Sukoharjo meliputi:

- a) Desa Palur di Kecamatan Mojolaban sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Gadingan, Desa Triyagan dan Desa Sapen.
- b) Desa Sragen dan Desa Jati di Kecamatan Gatak. Adapun Desa Sragen sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Sanggung, Desa Wironanggan dan Desa Tempel. Sedangkan Desa Jati sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Krajan dan Desa Geneng.
- c) Desa Lengking di Kecamatan Bulu sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Malangan, Desa Puron dan Desa Ngasinan.
- d) Desa Kayuapak di Kecamatan Polokarto sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Genengsari dan Desa Polokarto.
- e) Desa Jatingarang di Kecamatan Weru sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Karangwuni, Desa Krajan dan Desa Karanganyar.
- f) Desa Kepuh Kecamatan Nguter sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Pondok, Desa Tanjung dan Desa Lawu.
- g) Desa Mojorejo di Kecamatan Bendosari sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Manisharjo, Desa Bendosari dan Desa Cabean.
- h) Desa Kedungjambal di Kecamatan Tawang Sari sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan *hinterland* meliputi Desa Grajegan dan Desa Watubonang.

2.1.10.2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Daerah

Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

- a. Sistem prasarana utama berupa:
 1. Sistem jaringan transportasi darat;
Sistem jaringan transportasi darat terdiri dari
 - a) Sistem jaringan jalan;
 - b) Sistem jaringan kereta api; dan
 - c) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
 2. Sistem jaringan perkeretaapian.
Sistem jaringan kereta terdiri dari:
 - a) Jaringan jalur kereta api; dan
 - b) Stasiun kereta api.
- b. Sistem prasarana lainnya berupa:
 1. Sistem jaringan energi.
Sistem jaringan energi terdiri dari:
 - a) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 2. Sistem jaringan telekomunikasi.
Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari:
 - a) Jaringan tetap; dan
 - b) Jaringan bergerak.
- c. Sistem prasarana lainnya berupa:
 1. Sistem jaringan energi.
Sistem jaringan energi terdiri dari:
 - a) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 2. Sistem jaringan telekomunikasi.
Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari:
 - a) Jaringan tetap; dan
 - b) Jaringan bergerak.
 3. Sistem jaringan sumber daya air.
Sistem jaringan sumber daya air terdiri dari:
 - a) Sumber air;
 - b) Prasarana sumber daya air;
 - c) Jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

4. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:

a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri atas:

- 1) Jaringan perpipaan; dan
- 2) Bukan jaringan perpipaan.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas:

1) SPALD Setempat

SPALD Setempat meliputi:

- (1) Kecamatan Sukoharjo;
- (2) Kecamatan Grogol;
- (3) Kecamatan Bendosari;
- (4) Kecamatan Kartasura;
- (5) Kecamatan Mojolaban;
- (6) Kecamatan Baki;
- (7) Kecamatan Gatak; dan
- (8) Kecamatan Weru.

Peningkatan prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Mojorejo Kecamatan Bendosari.

2) SPALD Terpusat.

SPALD Terpusat meliputi:

- (1) Kecamatan Bendosari; dan
- (2) Kecamatan Kartasura.

c) Sistem pengelolaan limbah B3

Sistem pengelolaan limbah B3 Kabupaten Sukoharjo berupa pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 dan infeksius di Kecamatan Polokarto.

d) Sistem jaringan persampahan wilayah;

Sistem jaringan persampahan wilayah terdiri dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

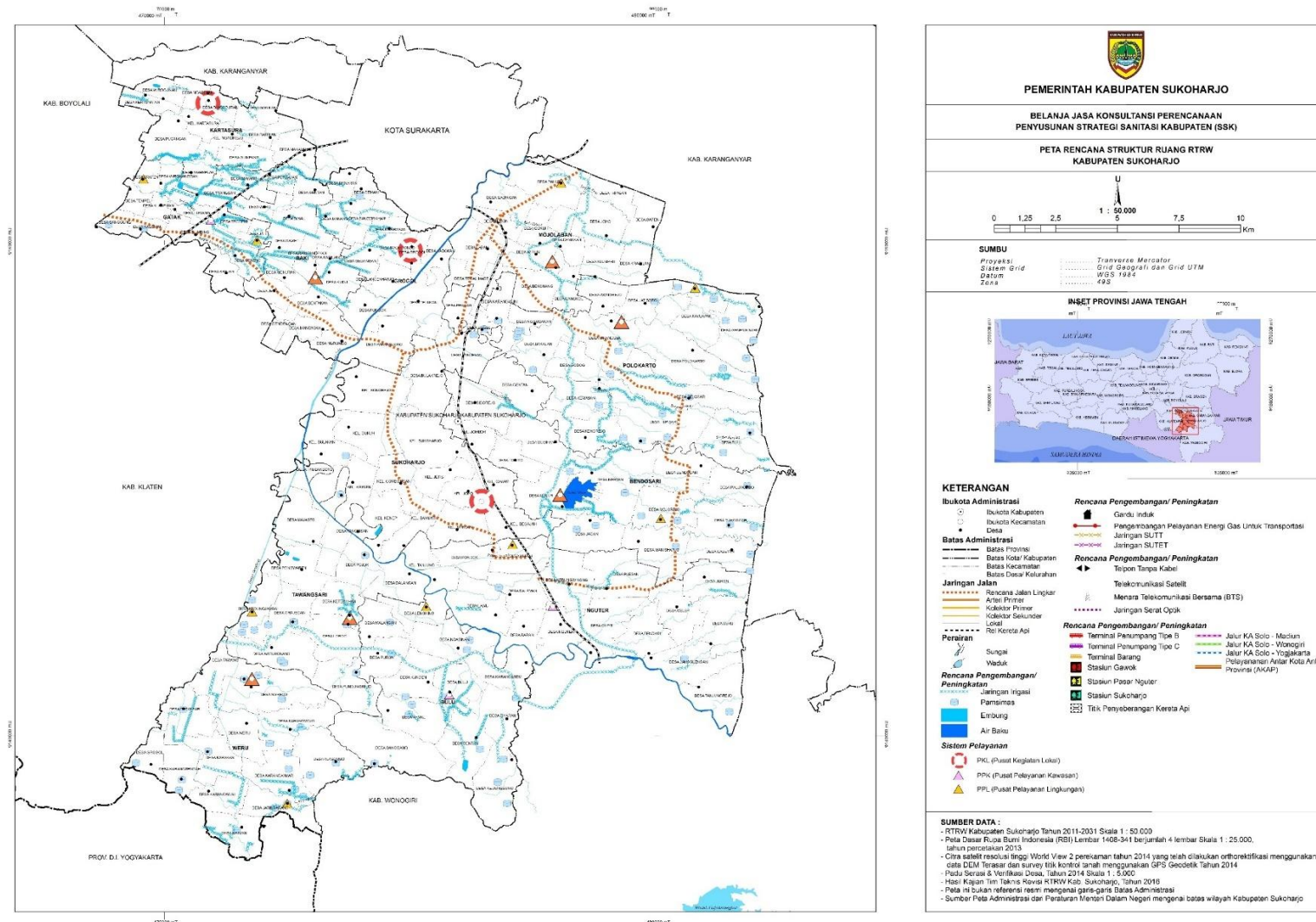
e) Sistem jaringan evakuasi bencana;

Sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

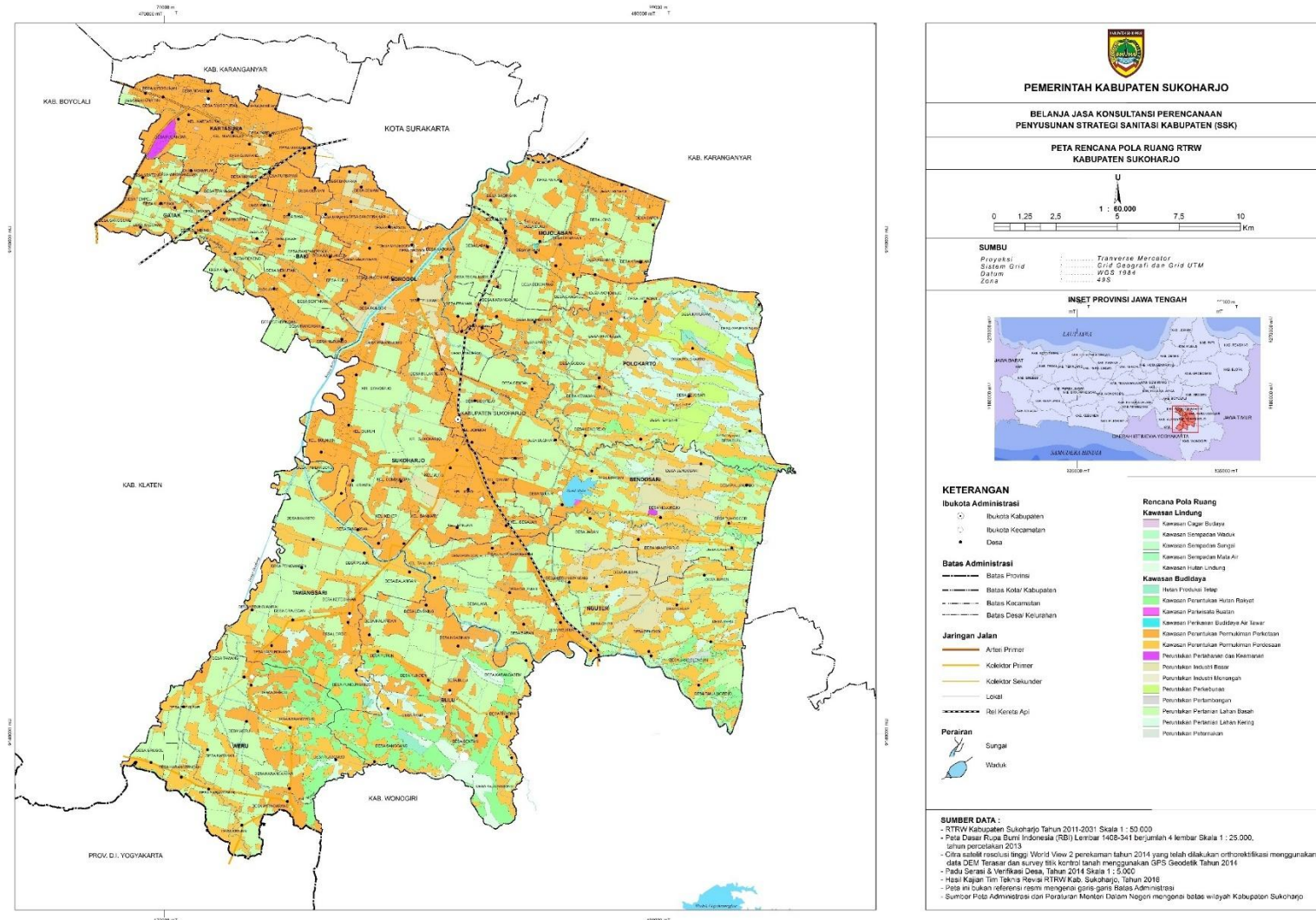
f) Sistem jaringan drainase.

Pengembangan sistem jaringan drainase berupa pengembangan drainase primer kawasan perkotaan meliputi:

- 1) Kecamatan Sukoharjo;
- 2) Kecamatan Kartasura; dan
- 3) Kecamatan Grogol.



Gambar 2. 6
Peta Struktur Ruang Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2011-2030



Gambar 2. 7
Peta Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2011-2030

2.1.10.3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Menurut RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, di Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa lokasi wilayah yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan angin ribut. Pada kawasan kawasan seperti ini perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada tersebut.

Usaha ini dilakukan untuk menanggulangi serta mengurangi kerawanan bahaya bencana pada daerah rawan bencana serta mengantisipasi terjadinya bencana untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan (mitigasi bencana).

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sukoharjo meliputi:

1. Kawasan rawan longsor.

Kawasan rawan longsor terdiri atas:

- a) Longsor perbukitan berada di Kecamatan Bulu meliputi Desa Sanggang, Kamal dan Kedungsono.
- b) Erosi berada di:
 - 1) Kecamatan Sukoharjo meliputi Kelurahan Bulakrejo dan Kelurahan Sonorejo.
 - 2) Kecamatan Nguter meliputi Desa Baran, Desa Lawu dan Desa Tanjung.
 - 3) Kecamatan Weru meliputi Desa Tawang, Desa Tegalsari, Desa Ngreco, Desa Karangtengah, Desa Karakan, Desa Karangwuni, Desa Krajan, Desa Karangmojo, Desa Karanganyar dan Desa Grogol.
 - 4) Kecamatan Tawangsari meliputi Desa Tangkisan, Desa Ponowaren dan Desa Kedungjambal.
 - 5) Kecamatan Grogol berada di Desa Kadokan.
 - 6) Kecamatan Mojolaban berada di Desa Laban.

2. Kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan banjir meliputi:

- a) Luapan Sungai meliputi:
 - 1) Kecamatan Sukoharjo meliputi Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Begajah, Kelurahan Banmati, Kelurahan Kenep, Kelurahan Kriwen, Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo.
 - 2) Kecamatan Nguter meliputi Desa Baran, Desa Lawu, Desa Tanjung, Desa Pondok, Desa Kepuh.

- 3) Kecamatan Weru meliputi Desa Tawang, Desa Tegalsari, Desa Ngreco, Desa Karangtengah, Desa Karakan, Desa Karangwuni, Desa Krajan, Desa Karangmojo, Desa Karanganyar dan Desa Grogol.
 - 4) Kecamatan Tawangsari meliputi Desa Kateguhan, Desa Lorog, Desa Tangkisan, Desa Ponowaren dan Desa Kedungjambal.
 - 5) Kecamatan Gatak meliputi Desa Kagokan, Desa Blimbing, Desa Trangsari dan Desa Jati.
 - 6) Kecamatan Grogol meliputi Desa Cemani, Desa Madegondo, Desa Banaran, Desa Sanggrahan, Desa Pandeyan dan Desa Kadokan.
 - 7) Kecamatan Mojolaban meliputi Desa Laban, Desa Tegalmade, Desa Palur, Desa Gadingan dan Desa Plumbon.
 - 8) Kecamatan Polokarto meliputi Desa Mranggen, Desa Bakalan, Desa Pranat, Desa Karangwuni dan Desa Ngombakan.
 - 9) Kecamatan Baki meliputi Desa Ngrombo dan Desa Mancasan.
 - 10) Kecamatan Kartasura meliputi Desa Singopuran dan Desa Pabelan.
- b) Luapan Drainase meliputi:
- 1) Kecamatan Sukoharjo meliputi Kelurahan Joho, Kelurahan Mandan dan Kelurahan Jetis.
 - 2) Kecamatan Nguter berada di Desa Kedungwinong.
 - 3) Kecamatan Tawangsari berada di Desa Grajegan.
 - 4) Kecamatan Grogol meliputi Desa Langenharjo, Desa Telukan dan Desa Grogol.
 - 5) Kecamatan Mojolaban berada di Desa Plumbon.
 - 6) Kecamatan Kartasura berada di Kelurahan Kartasura.
3. Kawasan rawan angin ribut.
- Kawasan rawan angin ribut meliputi:
- a) Kecamatan Sukoharjo meliputi Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Parangjoro dan Kelurahan Sonorejo.
 - b) Kecamatan Nguter meliputi Desa Serut, Desa Celep, Desa Pengkol dan Desa Gupit.
 - c) Kecamatan Bulu berada di Desa Sanggang.
 - d) Kecamatan Weru meliputi Desa Karangwuni, Desa Ngreco, Desa Karangmojo dan Desa Karanganyar.

2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

2.2.1. Air Limbah Domestik

Sistem air limbah domestik yang dikelola oleh masyarakat (rumah tangga) terbatas pada pelayanan pembuangan air limbah kakus (*black water*) yang berasal dari jamban dengan cara ditampung dalam tangki septik dan cubluk. Sedangkan air limbah non-kakus (*grey water*) dialirkan ke saluran drainase, kebun atau lahan kosong yang ada di sekitar pemukiman. Disamping itu masih dijumpai pembuangan langsung ke badan air ataupun lahan-lahan kosong yang ada di sekitar pemukiman.

2.2.1.1. Sistem dan Infrastruktur

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, pengolahan air limbah domestik dibagi menjadi 2, yaitu

a. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Komponen dari SPALD Setempat direncanakan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Aspek SPALD Setempat adalah sebagai berikut:

1. Sub-Sistem Pengolahan

Sub-sistem pengelolaan setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah limbah domestik di lokasi sumber. Sub-sistem pengolahan setempat, berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas skala individu dan skala komunal. Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo dalam aspek air limbah sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo sudah deklarasi *Open Defecation Free* (ODF).

a) SPALD-Setempat Skala Individual

Skala Individual dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi. Sistem setempat skala individual umumnya digunakan untuk menangani air limbah kakus (*black water*). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 9.

1) Tangki Septik Individu Aman

Presentase capaian jumlah rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo yang menggunakan tangki septik individu aman (yang pernah disedot dan dibuang di IPLT) sebesar 2,58% (7.723 KK).

2) Tangki Septik Individu Layak

Presentase capaian jumlah rumah tangga terkoneksi ke tangki septik komunal maupun individu (Akses layak tidak termasuk akses aman) di Kabupaten Sukoharjo sudah mencapai 85,40% (255.653 KK).

3) Tangki Septik Individu Belum Layak

Presentase capaian tangki septik yang belum layak di Kabupaten Sukoharjo sebesar 12,10% (36.223 KK).

Tabel II. 9
Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	2,53%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	77,90%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	1,40%
	Akses Layak Bersama	11,20%
C	Akses Belum Layak* BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	0,00%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,05%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	5,90%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0,20%
	Akses Layak Bersama	0,00%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,90%
C	Belum Layak BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	0%
Total		100,0%

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

b) SPALD-Setempat Skala Komunal

Skala Komunal diperuntukkan untuk 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non-permanen (*mobile toilet*). Perencanaan sarana sanitasi yang dapat melayani 2-10 unit rumah dapat berupa tangki septik komunal.

1. Tangki Septik Komunal Aman

Presentase jumlah rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo yang menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang di IPLT) sebesar 0,43% (1.297 KK).

2. Tangki Septik Komunal Layak

Jumlah presentase jumlah rumah tangga terkoneksi ke tangki septik (komunal/individu) di Kabupaten Sukoharjo sudah mencapai 1,50% (4.496 KK).

Capaian akses air limbah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel II. 9

2. Sub-Sistem Pengangkutan

Sub-sistem pengangkutan Kabupaten Sukoharjo sangatlah minim, karena Kabupaten Sukoharjo hanya mempunyai dua truk tinja dengan kapasitas tinja sebesar 3 m³. Waktu operasional truk tinja yang ada di Kabupaten Sukoharjo masih berdasarkan permintaan dari masyarakat. Rata-rata truk tinja yang masuk ke IPLT sebanyak 2 (dua) truk/hari dengan kepemilikan truk milik pemerintah. Rata-rata rumah tangga yang terlayani pengurusan sebanyak 2 (dua) rumah tangga/hari. Volume truk yang membuang lumpur tinja ke IPLT rata-rata 6 (enam) m³/hari. Sub-sistem Pengangkutan SPALD-Setempat dapat dilihat pada Tabel II. 10

Tabel II. 10
Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah		
-	Jumlah truk tinja	Unit	2
-	Status aset	Sudah serah terima operasional	
-	Kapasitas truk tinja	m ³	3
-	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	6
-	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	2
-	<i>Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja</i>	<i>RT/hari</i>	<i>2</i>
2	Swasta		
-	Jumlah truk tinja	Unit	-
-	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m ³	-
-	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	-
-	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	-
-	<i>Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja</i>	<i>RT/hari</i>	<i>-</i>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2022



Gambar 2. 8
Truck Tinja

Sumber: Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kawasan Di Kabupaten Sukoharjo, 2017

3. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Kabupaten Sukoharjo memiliki satu unit IPLT yang berada di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari, yang satu lokasi dengan TPA Kabupaten Sukoharjo. IPLT ini memiliki luas sekitar sebesar 8.778 m² yang

dibangun pada Tahun 2016. Adapun unit-unit yang ada di dalam IPLT adalah, Bak penerimaan yang dilengkapi dengan bar screen, dan penangkap pasir, selanjutnya adalah unit SSC (Solid Separation Chamber), Bak Anaerobik I, Bak Anaerobik II, Bak Fakultatif, Bak Maturasi I, Bak Maturasi II dan *drying area*. Dalam dokumen perencanaan IPLT disebutkan bahwa kapasitas harian IPLT adalah 16 m³/hari. IPLT telah memiliki SOP baik dari segi teknik maupun non teknik dan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang disusun pada Tahun 2016. Eksisting IPLT Mojorejo belum melakukan SOP sesuai dengan dokumen yang ada. Fasilitas pendukung yang ada di IPLT Mojorejo yaitu fasilitas air bersih, pagar, jalan akses (menjadi satu dengan TPA Mojorejo).

Tabel II. 11
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	IPLT Mojorejo	
2	Status aset	Sudah	
3	Kapasitas IPLT	m ³ /hari	16
4	Tahun Pembangunan	2016	
5	Tahun Rehabilitasi	2016	
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	
7	Wilayah layanan terdekat	km	0,2
8	Wilayah layanan terjauh	km	35
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan	Penerimaan - sludge separation chamber(SSC) - Kolam anaerob-kolam fakultatif-kolam maturasi - Pengolahan padatan dengan drying area	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluen	2	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Beton	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022





Gambar 2. 9
IPLT Mojorejo
Foto diambil: 03/08/2022
Sumber: Dokumentasi Tim Penyusun, 2022

b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Komponen dari SPALD-Terpusat terdiri dari sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan. Sub-sistem Pelayanan merupakan sambungan rumah yang terdiri dari pipa tinja, pipa non-tinja, bak penangkap lemak, pipa persil, dan bak kontrol.

Sub-sistem Pengumpulan air limbah domestik diutamakan dilakukan secara gravitasi, namun apabila kondisi topografi tidak memungkinkan dapat menggunakan sistem pemompaan. Sub-sistem Pengumpulan air limbah domestik secara berkala dialirkan dengan pipa yang terpisah dari saluran drainase.

Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan. Ada 3 jenis sistem penyaluran air limbah domestik terpusat yang bisa diterapkan yaitu

1. Skala perkotaan

Cakupan pelayanan skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. Pada saat ini Kabupaten Sukoharjo belum memiliki SPALD-T Skala Perkotaan.

2. Skala permukiman

Cakupan pelayanan skala permukiman untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. Pada saat ini Kabupaten Sukoharjo sudah memiliki IPALD Skala Permukiman sebanyak 32 unit yang tersebar di 7 kecamatan. Pembangunan IPALD Skala Permukiman di Kabupaten Sukoharjo memakai anggaran APBN (DAK) dari Tahun 2012. Semua IPALD Skala permukiman di Kabupaten Sukoharjo sudah terima asset dari Pemerintah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 12.



Gambar 2. 10

a. IPAL KSM Garuda Desa Trangsan Kecamatan Gatak Tahun 2021

b. IPAL KSM Krida Mandiri Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Tahun 2021

c. KSM Tisanan Sehat Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Tahun 2021

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo, 2022

Tabel II. 12
Tabel sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat

No	Nama IPALD	Cakupan Pelayanan	Tahun Dibangun	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
1	IPAL Pandeyan	Pandeyan	2013		50	62	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
2	IPAL Manang	Manang	2017		100	133	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
3	IPAL Cemari 1	Cemari	2013		50	35	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
4	IPAL Cemari 2	Cemari	2014		50	65	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
5	IPAL Gadingan	Gadingan	2013		50	85	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
6	IPAL Palur	Palur	2014		50	67	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
7	IPAL Sukoharjo	Sukoharjo	2015		50	60	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset

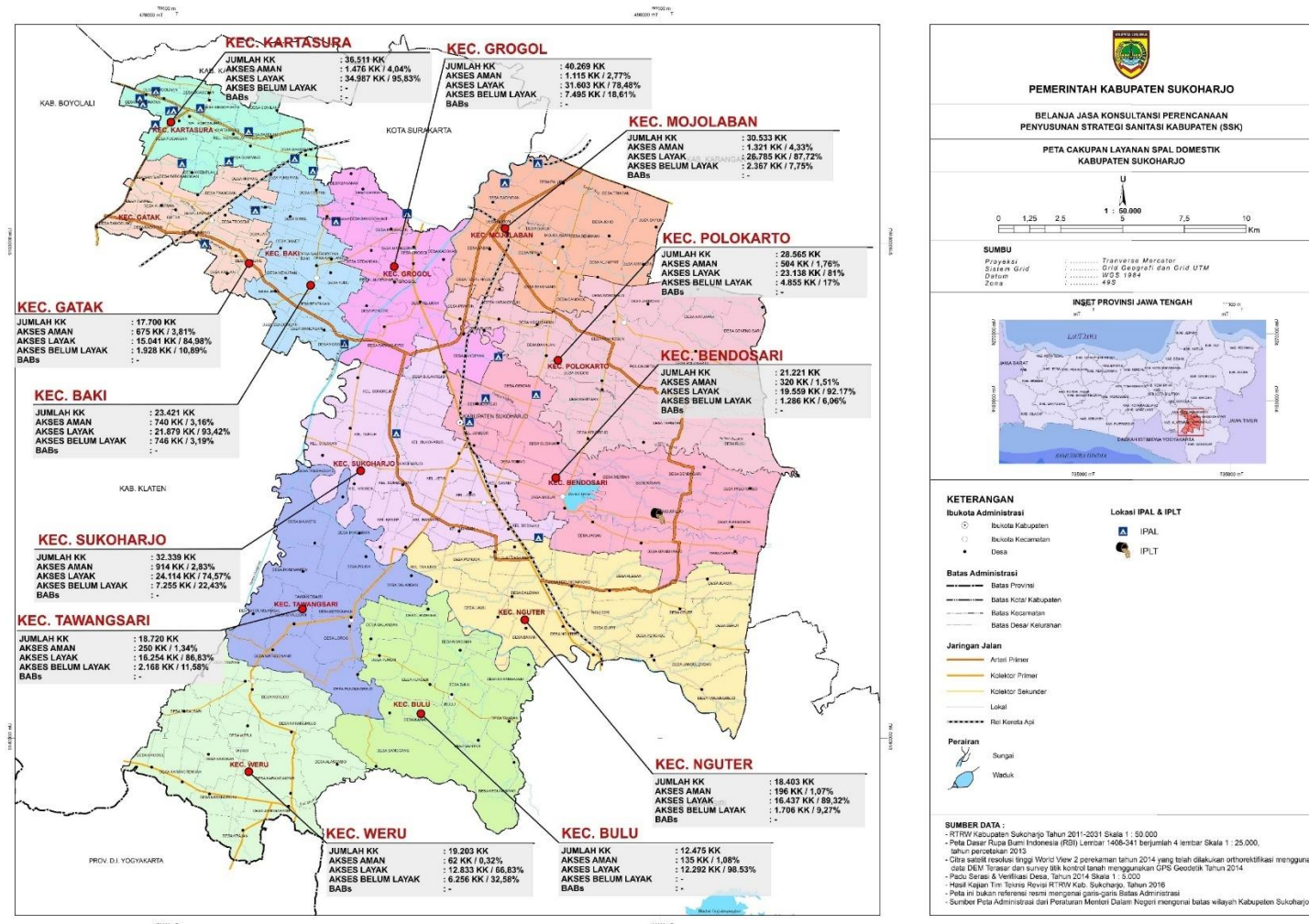
No	Nama IPALD	Cakupan Pelayanan	Tahun Dibangun	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
8	IPAL Begajah	Begajah	2016		50	51	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
9	IPAL Pucangan 1	Pucangan	2012		50	50	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
10	IPAL Pucangan 2	Pucangan	2014		50	65	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
11	IPAL Wirogunan 1	Wirogunan	2014		100	145	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
12	IPAL Pabelan	Pabelan	2014		50	71	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
13	IPAL Makamhaji 1	Makamhaji	2014		50	86	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
14	IPAL Makamhaji 2	Makamhaji	2015		50	60	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
15	IPAL Makamhaji 3	Makamhaji	2016		50	65	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Pelayanan	Tahun Dibangun	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
16	IPAL Kertonatan 1	Kertonatan	2016		50	60	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
17	IPAL Kertonatan 2	Kertonatan	2015		50	75	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
18	IPAL Kertonatan 3	Kertonatan	2016		50	65	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
19	IPAL Gumpang 1	Gumpang	2014		100	150	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
20	IPAL Kartasura	Kartasura	2016		50	50	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
21	IPAL Mancasan	Mancasan	2012		50	35	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
22	IPAL Ngrombo	Ngrombo	2013		50	65	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
23	IPAL Waru	Waru	2012		50	65	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Pelayanan	Tahun Dibangun	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
24	IPAL Bentakan	Bentakan	2012	2017	50	44	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
25	IPAL Wironanggan	Wironanggan	2015		50	57	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
26	IPAL Blimbing	Blimbing	2016		50	55	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
27	IPAL Sidorejo	Sidorejo	2016		50	80	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
28	IPAL Gentan	Gentan	2016		50	65	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
29	IPAL Jombor	Jombor	2014		50	40	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Pada tahun 2017 berfungsi dengan baik	KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
30	IPAL Trangsan	Trangsan	2021		50	50	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua		KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset
31	IPAL Wirogunan 2	Wirogunan	2021		50	50	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua		KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Pelayanan	Tahun Dibangun	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
32	IPAL Gumpang 2	Gumpang	2021		50	50	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua		KSM	Tidak Dilakukan	Serah Terima Aset

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo, 2021



Gambar 2. 11
Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Pada RPJMN Provinsi Jawa Tengah target air limbah akses aman sebesar 20% sedangkan target jangka pendek Kabupaten Sukoharjo sebesar 4%. Capaian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 2,6%, sehingga terdapat gap untuk akses aman sebesar 1,4%. Sedangkan akses layak, Kabupaten Sukoharjo sudah mencapai 88,0% sehingga mempunyai Gap 1,9% menuju target jangka pendek. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 13.

Tabel II. 13
Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo			
1	Akses Aman	15%	20,0%	6,0%	4,0%	2,6%	3,4%	1,4%
2	Akses Layak	90%	95,0%	100,0%	100,0%	88,0%	12,0%	12,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	88,0%	91,0%	83,8%	4,2%	7,2%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	6,0%	5,0%	1,6%	4,4%	3,4%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,1%	-12,1%	-12,1%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%

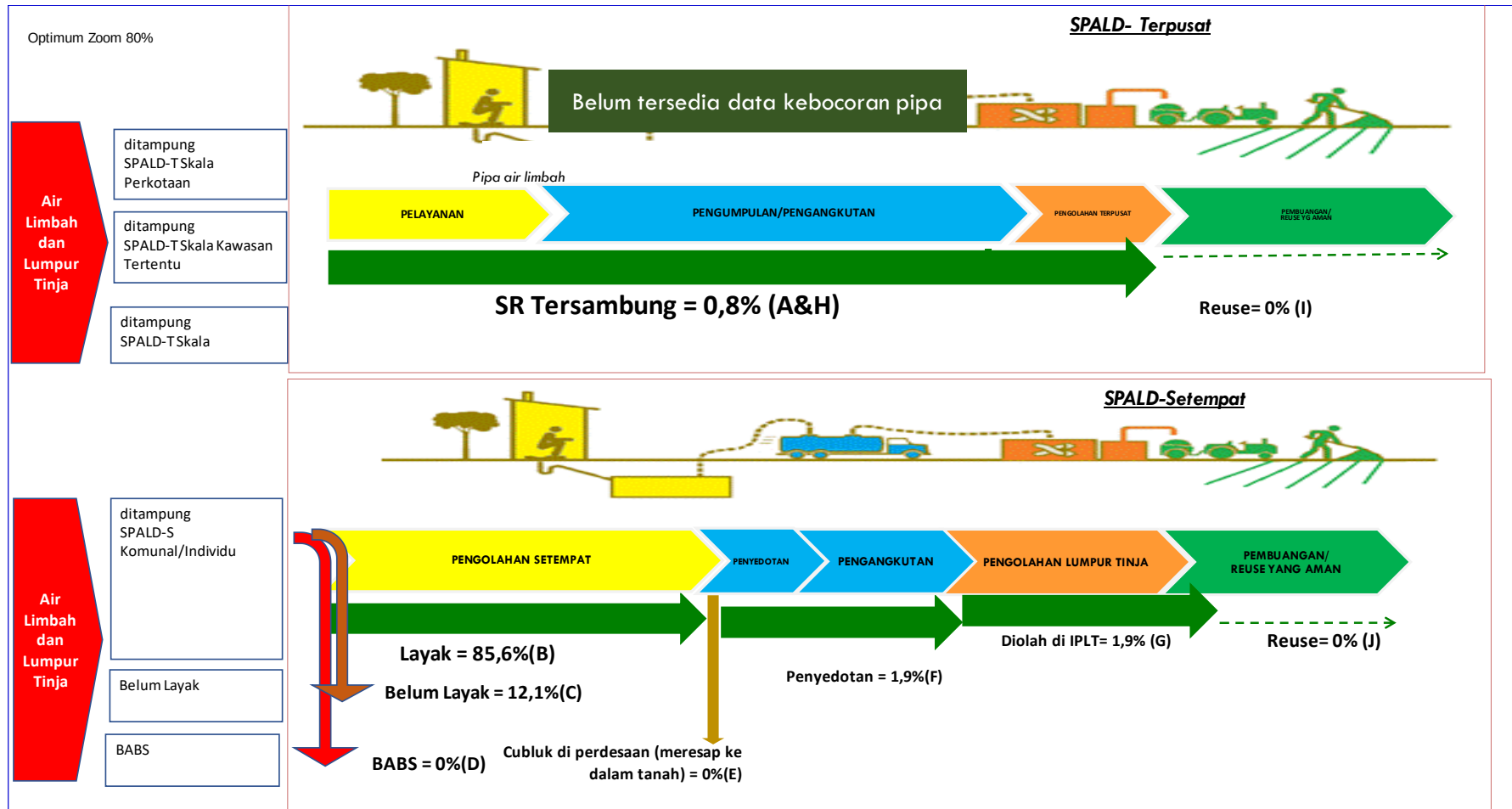
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Keberfungsian infrastruktur Air Limbah Domestik Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel II. 14 berikut. Dapat dilihat pada tabel tersebut kapasitas penggunaan IPLT mencapai 4,19% dan kapasitas IPLT terhadap jumlah Rumah Tangga yang disedot hanya sebesar 0,61%. Rantai layanan air limbah domestik Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Gambar 2. 12.

Tabel II. 14
Analisis Keberfungsian Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Sukoharjo

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	4,19%
Kapasitas penggunaan truk	33,33%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	37,50%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	1,63%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	0,61%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	123%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022.



Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	1%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	1%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	86%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	12%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	0%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	2%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	2%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	0%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	0%

Gambar 2. 12

Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

2.2.1.2. Kelembagaan dan Kebijakan/Pengaturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo terdapat peran pemerintah yang menjalankan fungsi dan kepentingannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, adapun peran pemangku kepentingan dan peraturan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel II. 15 berikut.

Tabel II. 15
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Urusan Air Limbah

No	Perangkat Daerah	Urusan Air Limbah Domestik
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Urusan air limbah domestik pada Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Memiliki tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sektor air minum (Non PDAM), <u>air limbah rumah tangga</u> , dan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Urusan air limbah domestik pada Seksi Pengelolaan Rumah Susun. Memiliki tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi : perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan rumah susun, pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik, air bersih dan <u>air limbah</u>), pelaksanaan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan, pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan, pemasaran dan promosi Rumah Susun Sederhana Sewa untuk tercapainya tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Tabel II. 16
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/B LU	PD dan Sebagain ya
Perencanaan			
a. menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten Sukoharjo	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/B LU	PD dan Sebagain ya
b. menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
c. menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
Pengadaan Sarana			
a. menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
b. membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik)	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
c. menyediakan sarana pengangkut dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
d. membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
e. membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
Pengelolaan			
a. menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
b. mengelola IPLT atau IPAL	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
c. melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
d. memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
e. melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/B LU	PD dan Sebagain ya
Pengaturan dan Pembinaan			
a. mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
b. melakukan sosialisasi pertauran, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
Monitoring dan Evaluasi			
a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten Sukoharjo	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-
d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Bidang Cipta Karya Pada Dinas PUPR	-	-

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

b. Kelembagaan Masyarakat

Sedangkan peran masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam pembangunan infrastruktur air limbah dapat dilihat pada Tabel II.15

Tabel II. 17
Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2021

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah Anggota/ Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	IPAL	2013	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 62 KK
2	IPAL	2017	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Manang, Kecamatan Grogol	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 133 KK
3	IPAL	2013	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Cemani, Kecamatan Grogol	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 35 KK
4	IPAL	2014	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Cemani, Kecamatan Grogol	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 65 KK
5	IPAL	2013	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 85 KK

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah Anggota/ Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
6	IPAL	2014	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Palur, Kecamatan Mojolaban	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 67 KK
7	IPAL	2015	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 60 KK
8	IPAL	2016	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 51 KK
9	IPAL	2012	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 50 KK
10	IPAL	2014	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 65 KK
11	IPAL	2014	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 145 KK
12	IPAL	2014	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL- DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 71 KK

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah Anggota/ Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
13	IPAL	2014	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Makahaji, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Berfungsi dengan baik dan melayani 86 KK
14	IPAL	2015	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Makahaji, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 60 KK
15	IPAL	2016	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Makahaji, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 65 KK
16	IPAL	KSM Kapulogo, 2016	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Kertonatan, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 60 KK
17	IPAL	2015	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Kertonatan, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Berfungsi dengan baik dan melayani 75 KK
18	IPAL	2016	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Kertonatan, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 65 KK
19	IPAL	2014	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Gumpang, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 150 KK

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah Anggota/ Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
20	IPAL	2016	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Kartasura, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 50 KK
21	IPAL	2012	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Mancasan, KecamatanBaki	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 35 KK
22	IPAL	2013	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Ngrombo, KecamatanBaki	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Berfungsi dengan baik dan melayani 65 KK
23	IPAL	2012	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Waru, KecamatanBaki	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Berfungsi dengan baik dan melayani 65 KK
24	IPAL	2012, 2017	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Bentakan, KecamatanBaki	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 44 KK
25	IPAL	2015	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Wironanggan, KecamatanGatak	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 57 KK
26	IPAL	2016	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Blimbing, KecGatak	Iuaran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 55 KK

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah Anggota/ Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
27	IPAL	2016	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari	Iuran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 80 KK
28	IPAL	2016	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Gentan, Kecamatan Bendosari	Iuran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 65 KK
29	IPAL	2014	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Jombor, Kecamatan Bendosari	Iuran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	Pada tahun 2017 masih berfungsi dengan baik dan melayani 40 KK
30	IPAL	KSM Garuda, 2021	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Trangsan, Kecamatan Gatak	Iuran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	
31	IPAL	KSM Krida Mandiri, 2021	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura	Iuran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	
32	IPAL	KSM Tisanan Sehat, 2021	KSM	2	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura	Iuran Warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL-DPUPR	
33	MCK+	2010	KSM	1	Kebutuhan Mandi Cuci Kakus warga	Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol	Iuran Warga	Fasilitas MCK dan IPAL-DPUPR	
34	MCK+	2012	KSM	1	Kebutuhan Mandi Cuci Kakus warga	Desa Grogol, Kecamatan Grogol	Iuran Warga	Fasilitas MCK dan IPAL-DPUPR	

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah Anggota/ Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
35	MCK+	2011	KSM	1	Kebutuhan Mandi Cuci Kakus warga	Desa Pahur, KecamatanMojolaban	Iuaran Warga	Fasilitas MCK dan IPAL-DPUPR	
36	MCK+	2011	KSM	1	Kebutuhan Mandi Cuci Kakus warga	Desa Tegalmade, KecamatanMojolaban	Iuaran Warga	Fasilitas MCK dan IPAL-DPUPR	
37	MCK+	2012	KSM	1	Kebutuhan Mandi Cuci Kakus warga	Desa Laban, KecamatanMojolaban	Iuaran Warga	Fasilitas MCK dan IPAL-DPUPR	
38	MCK+	2011	KSM	1	Kebutuhan Mandi Cuci Kakus warga	Desa Dukuh, KecamatanSukoharjo	Iuaran Warga	Fasilitas MCK dan IPAL-DPUPR	
39	MCK+	2011	KSM	1	Kebutuhan Mandi Cuci Kakus warga	Desa Sukoharjo, KecamatanSukoharjo	Iuaran Warga	Fasilitas MCK dan IPAL-DPUPR	
40	MCK+	2011	KSM	1	Kebutuhan Mandi Cuci Kakus warga	Desa Singopuran, KecamatanKartasura	Iuaran Warga	Fasilitas MCK dan IPAL-DPUPR	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022-

c. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah di Kabupaten Sukoharjo terdapat Pemetaan Kelembagaan Non-Pemerintah yang menjalankan fungsi dan kepentingannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, adapun Pemetaan Kelembagaan Non-Pemerintah dalam bidang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 18
Pemetaan Kelembagaan Non-Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	a. menjalankan tugas legislasi air limbah domestik b. menjalankan tugas penganggaran air limbah domestik c. menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD d. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait air limbah domestik	- Tim Anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diserahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik
Pengusaha	(tidak ada Keterlibatan Pengusaha)	(Tidak ada Keterlibatan Pengusaha)
BUMDes	disertifikasi kegiatan usaha di bidang sanitasi	- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik - Penyediaan SDM dalam pengeolahan air limbah domestik - Penyediaan lembaga atau pengelola dalam pengeolahan air limbah domestik
Organisasi Massa (Ormas): - Baznas Kabupaten Sukoharjo	peningkatan kualitas hidup dan sarana prasana lingkungan dan sanitasi	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi
Yayasan (BKM/KSM/LSM /PKK/Koperasi dan lain-lain)	(tidak ada Keterlibatan Yayasan)	(Tidak ada Keterlibatan Yayasan)
Tokoh Masyarakat	peningkatan kualitas hidup dan sarana prasana lingkungan dan sanitasi	- Pengaruh terhadap perilaku masyarakat

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Tabel II. 19
Pengaruh dan Keterlibatan Kelembagaan Non Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	a. alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD	- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	Sedang	Tinggi	Ya
	b. pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	- Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah			

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
		Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang			
Pengusaha	(tidak ada Keterlibatan Pengusaha)	(Tidak ada Keterlibatan Pengusaha)			
BUMDes	a. penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik b. penyediaan SDM dalam pengeolahan air limbah domestik c. penyediaan lembaga atau pengelola dalam pengeolahan air limbah domestik		Tinggi	Sedang	Ya
Organisasi Massa (Ormas): Baznas Kabupaten Sukoharjo	a. penyediaan SDM dalam pengeolahan air limbah domestik b. penyediaan lembaga atau pengelola dalam pengeolahan air limbah domestik	- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi - Fatwa MUI No 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Rendah	Sedang	Ya
	c. penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik				
Yayasan (BKM/KSM/LSM/PKK/K operasi dan lain-lain)	(tidak ada Keterlibatan Yayasan)	(Tidak ada Keterlibatan Yayasan)			
Tokoh Masyarakat	Pengaruh terhadap perilaku masyarakat		Sedang	Sedang	Ya

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

d. Regulasi

Aspek Pengaturan tentang air limbah di Kabupaten Sukoharjo masih cukup minim, sebagaimana yang tercantum pada Tabel II. 20. Kabupaten Sukoharjo sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Tabel II. 20
Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No	Komponen	Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik		v
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan:	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya		
4	Apakah Subtansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal subtansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD-S dan SPALD-T		v
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasioan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi		v
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan		v
d	Substansi pembinaan dan pengawasan		v
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman yang telah ada	Ada	Belum Ada
			v
6	Sebutkan semua turunan andate Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada		
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada	Belum Ada
		v	
	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

2.2.1.3. Komunikasi dan Media Air Limbah Domestik

Kegiatan komunikasi terkait promosi *hygiene* dan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan cukup baik yaitu dengan 22 macam kegiatan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan Lomba UKS, Pembangunan Jamban Sekolah, dan Pengadaan Tempat Cuci Tangan. Berikut kegiatan komunikasi terkait promosi *hygiene* dan Sanitasi di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel II. 21
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / Lomba Sekolah Sehat Jenjang TK	2018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan PNF)	Kampanye tentang PHBS	Siswa sekolah tingkat TK	Pemerintah Mengajak masyarakat dalam Peningkatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta Peningkatan akses sanitasi	Menciptakan suasana sekolah yang sehat dan berkarakter peserta didik untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat
2	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / Lomba Sekolah Sehat Jenjang TK	2019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan PNF)	Kampanye tentang PHBS	Siswa sekolah tingkat TK	Pemerintah Mengajak masyarakat dalam Peningkatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta Peningkatan akses sanitasi	Menciptakan suasana sekolah yang sehat dan berkarakter peserta didik untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat
3	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / Lomba Sekolah Sehat Jenjang TK	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan PNF)	Kampanye tentang PHBS	Siswa sekolah tingkat TK	Pemerintah Mengajak masyarakat dalam Peningkatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta Peningkatan akses sanitasi	Menciptakan suasana sekolah yang sehat dan berkarakter peserta didik untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat
4	Pembangunan Jamban Sekolah	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mewujudkan PHBS	Siswa sekolah	Pemerintah Mengajak masyarakat dalam Peningkatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta Peningkatan akses sanitasi	Mendidik warga sekolah untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
5	Pengadaan Tempat Cuci Tangan	2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan PNF) BOP	Kampanye pencegahan COVID-19 secara preventif	Siswa sekolah	Pemerintah Mengajak masyarakat untuk mewujudkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran COVID-19	Mewujudkan gerakan warga sekolah untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19
6	Pengadaan Tempat Cuci Tangan	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan PNF) BOP	Kampanye pencegahan COVID-19 secara preventif	Siswa sekolah	Pemerintah Mengajak masyarakat untuk mewujudkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran COVID-19	Mewujudkan gerakan warga sekolah untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19
7	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD	2018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sekolah Dasar tentang Usaha Kesehatan Sekolah termasuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Siswa sekolah tingkat SD	Pemerintah Mengajak warga Sekolah Dasar untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah	
8	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD	2019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sekolah Dasar tentang Usaha Kesehatan Sekolah termasuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Siswa sekolah tingkat SD	Pemerintah Mengajak warga Sekolah Dasar untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah	
9	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD	2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sekolah Dasar tentang Usaha Kesehatan Sekolah termasuk Perilaku	Siswa sekolah tingkat SD	Pemerintah Mengajak warga Sekolah Dasar untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan	

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
				Hidup Bersih dan Sehat		sehat di lingkungan sekolah	
10	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sekolah Dasar tentang Usaha Kesehatan Sekolah termasuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Siswa sekolah tingkat SD	Pemerintah Mengajak warga Sekolah Dasar untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah	
11	Pembangunan Jamban Sekolah	2018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya	Warga sekolah di Sekolah Dasar Negeri Pueangan 05 Kecamatan Kartasura, Sekolah Dasar Negeri Pucangan 06 Kecamatan Kartasura, Sekolah Dasar Negeri Makamhaji 01 Kecamatan Kartasura, dan Sekolah Dasar Negeri Makamhaji 03 Kecamatan Kartasura	Pemerintah berusaha memberikan sarana prasarana sekolah yang layak dan nyaman	Mengajarkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang air kecil/besar sembarangan
12	Pembangunan Jamban Sekolah	2019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan jamban sekolah	Warga sekolah di Sekolah Dasar Negeri Nguter 01 Kecamatan Nguter, Sekolah Dasar Negeri Jombor 02 Kecamatan Bendosari, Sekolah Dasar Negeri	Pemerintah berusaha memberikan sarana prasarana sekolah yang layak dan nyaman	Mengajarkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang air kecil/besar sembarangan

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
					Bakalan 02 Kecamatan Polokarto, Sekolah Dasar Negeri Telukan 02 Kecamatan Grogol		
13	Pembangunan Jamban Sekolah	2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru	Warga sekolah di Sekolah Dasar Negeri Ngadirejo 02 Kecamatan Kartasura, dan Sekolah Dasar Negeri Ngadirejo 03 Kecamatan Kartasura	Pemerintah berusaha memberikan sarana prasarana sekolah yang layak dan nyaman	Mengajarkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang air kecil/besar sembarangan
14	Pembangunan Jamban Sekolah	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru	Warga sekolah di Sekolah Dasar Negeri Gayam 01 Kecamatan Sukoharjo, Sekolah Dasar Negeri Mranggen 01 Kecamatan Polokarto, Sekolah Dasar Negeri Demakan 01 Kecamatan Mojolaban Sekolah Dasar Negeri Joho 04 Kecamatan Mojolaban, Sekolah Dasar Negeri Kragilan 02 Kecamatan Mojolaban, Sekolah Dasar Negeri Palur 02	Pemerintah berusaha memberikan sarana prasarana sekolah yang layak dan nyaman	Mengajarkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang air kecil/besar sembarangan

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
					Kecamatan Mojolaban, Sekolah Dasar Negeri Kartasura 01 Kecamatan Kartasura, Sekolah Dasar Negeri Krajan 02 Kecamatan Weru, Sekolah Dasar Negeri Jatisobo 01 Kecamatan Polokarto, Sekolah Dasar Negeri Gentan 01 Kecamatan Baki, Sekolah Dasar Negeri Jetis 01 Kecamatan Baki		
15	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMP	2018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kampanye tentang PHBS	Siswa sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	Pemerintah Mengajak Warga Sekolah dalam Peningkatan perubahan perilaku dan Peningkatan akses sanitasi	Pembelajaran perilaku hidup sehat kepada siswa SMP
16		2019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kampanye tentang PHBS	Siswa sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	Pemerintah Mengajak Warga Sekolah dalam Peningkatan perubahan perilaku dan Peningkatan akses sanitasi	Pembelajaran perilaku hidup sehat kepada siswa SMP
17		2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kampanye tentang PHBS	Siswa sekolah tingkat Sekolah	Pemerintah Mengajak Warga Sekolah dalam	Pembelajaran perilaku hidup sehat kepada siswa SMP

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
					Menengah Pertama	Peningkatan perubahan perilkudan Peningkatan akses sanitasi	
18		2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kampanye tentang PHBS	Siswa sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	Pemerintah Mengajak Warga Sekolah dalam Peningkatan perubahan perilkudan Peningkatan akses sanitasi	Pembelajaran perilaku hidup sehat kepada siswa SMP
19	Pembangunan /Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP	2018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kampanye tentang PHBS	Guru, Siswa dan Karyawan	Pemerintah Mengajak Warga Sekolah dalam Peningkatan perubahan perilaku dan Peningkatan akses sanitasi	Pembelajaran Pola Hidup Sehat kepada siswa SMP
20	Pembangunan /Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP	2019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kampanye tentang PHBS	Guru, Siswa dan Karyawan	Pemerintah Mengajak Warga Sekolah dalam Peningkatan perubahan perilaku dan Peningkatan akses sanitasi	Pembelajaran Pola Hidup Sehat kepada siswa SMP
21	Pembangunan /Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP	2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kampanye tentang PHBS	Guru, Siswa dan Karyawan	Pemerintah Mengajak Warga Sekolah dalam Peningkatan perubahan perilaku dan Peningkatan akses sanitasi	Pembelajaran Pola Hidup Sehat kepada siswa SMP
22	Pembangunan /Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kampanye tentang PHBS	Guru, Siswa dan Karyawan	Pemerintah Mengajak Warga Sekolah dalam Peningkatan	Pembelajaran Pola Hidup Sehat kepada siswa SMP

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
						n perubahan perilaku dan Peningkatan akses sanitasi	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022

Jenis media komunikasi dan kerjasama terkait air limbah Pemerintah Daerah yaitu berupa brosur, Siaran radio, sosialisasi, dan aplikasi *smartphone*. Media komunikasi dan kerjasama terkait air limbah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 22
Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	Brosur	Masyarakat umum	APBD	Mengenal IPAL D Kabupaten Sukoharjo	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lumpur tinja	Belum diketahui
2	Radio TOP FM 101.9 FM Mengenal IPAL D	Masyarakat umum	APBD	Mengenal IPAL D Kabupaten Sukoharjo	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuangan limbah ke IPAL	Belum diketahui
3	Sosialisasi melalui program STBM	Masyarakat umum	DAK	Sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mengelola limbah rumah tangga yang benar	Belum diketahui
4	Radio TOP FM : 101.9 FM: 2 jam bersama tata ruang	Masyarakat umum	APBD	Edukasi pemanfaatan lahan dan sarana prasarana	Sosialisasi tentang pengelolaan lumpur tinja	Belum diketahui
5	Aplikasi KIM WASH (kelompok informasi masyarakat water and sanitation hygiene)	Masyarakat umum	Swasta	Meningkatkan kualitas sanitasi	Memberikan wadah kepada masyarakat untuk mengirim pengaduan mengenai permasalahan sanitasi Menampilkan Informasi dan berita kegiatan sanitasi di	Belum diketahui

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
					Kabupaten Sukoharjo	

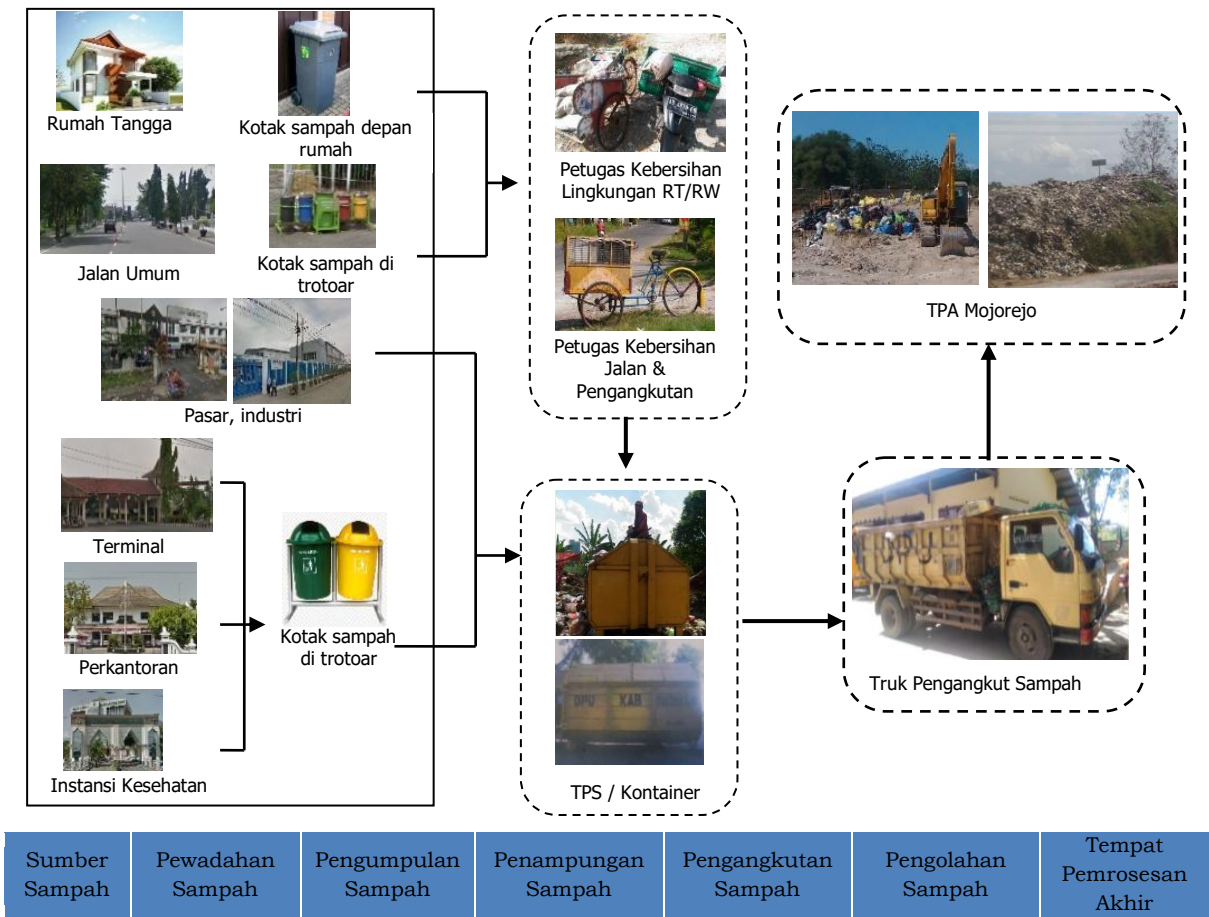
Sumber: Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2021

2.2.2. Pengelolaan Sampah

Saat ini sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo secara umum masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan pola kumpul angkut buang sebagaimana juga dilakukan oleh kota-kota provinsi lainnya di Indonesia. Namun telah dibentuk sistem pengelolaan sampah terpadu. Sistem pengelolaan sampah secara teknis terdiri dari sub sistem pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

2.2.2.1. Sistem dan Infrastruktur

Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Sukoharjo berasal dari kegiatan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, fasilitas pendidikan, pasar, jalan, taman serta area-area publik lainnya. Pengelolaan persampahan di sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo belum semua terlayani. Masih ada sebagian wilayah di Kabupaten Sukoharjo yang menggunakan sistem pembuangan pada lingkungan sekitar dengan ditimbun atau dibakar. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sukoharjo dimulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan pemrosesan akhir di TPA dapat dilihat pada Gambar 2. 13.



Gambar 2. 13
Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Perencanaan Masterplan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukoharjo, 2017

Cakupan penanganan sampah penanganan sampah Kabupaten Sukoharjo sebesar 55,2% jumlah tersebut sudah mencapai target jangka pendek penanganan sampah Kabupaten Sukoharjo, yaitu 55%. Sedangkan pengurangan sampah di Kabupaten Sukoharjo sudah mencapai 16,6% dengan target jangka pendek sebesar 18%. Namun sampah tidak terkelola di Kabupaten Sukoharjo sebesar 28,3%. Rekapitulasi akses pengelolaan sampah perkotaan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 23
Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	16,6%
2	Penanganan Sampah	55,2%
3	Sampah Tidak Terkelola	28,3%
Total		100,0%

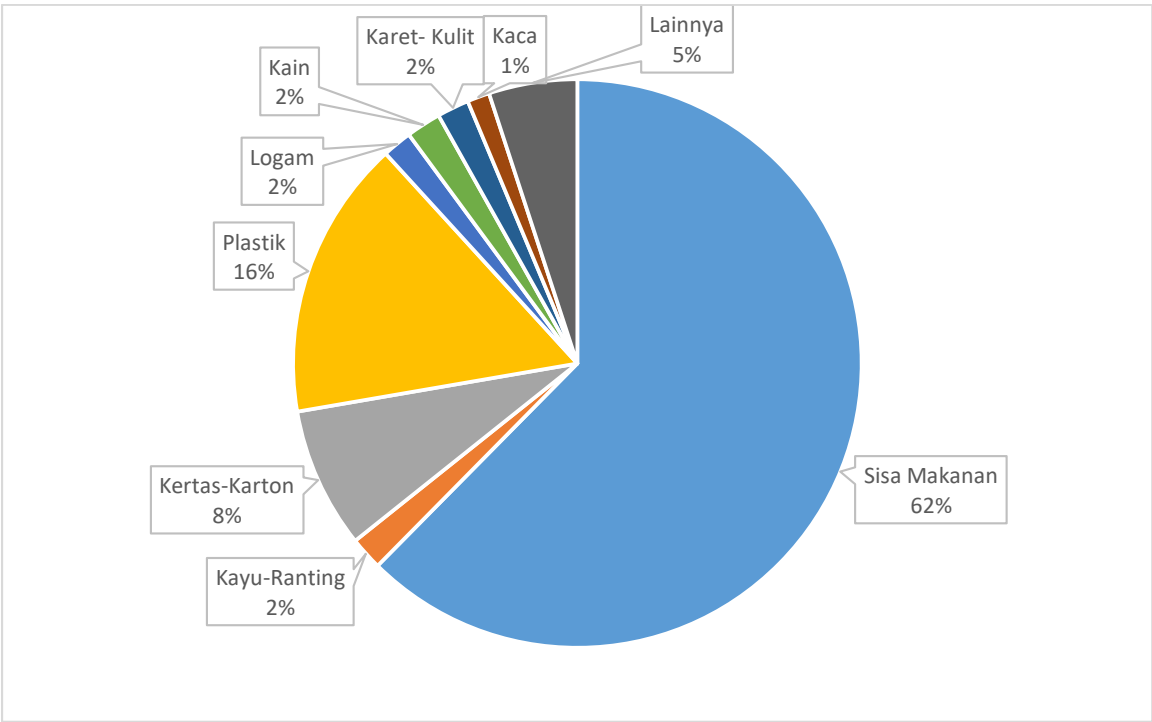
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Timbulan sampah Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sebesar 740,79 ton/hari dengan timbulan sampah perkotaan sebesar 689,39 ton/hari dan perdesaan sebesar 51,4 ton/hari. Untuk komposisi sampah organik sebesar 64% dan anorganik 36%. Timbulan sampah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 24
Timbulan Sampah Kabupaten Sukoharjo

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	740,79
	d. Perkotaan	ton/hari	689,39
	e. Perdesaan	ton/hari	51,4
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	64
		% anorganik	36

Sumber: diolah dari data DLH dan sipsn.menlhk.go.id, 2022



Gambar 2. 14
Komposisi Sampah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2022

Sub sistem teknis teknologis terdiri dari beberapa sub-sub sistem diantaranya yaitu pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

a. Pemilahan/Pewadahan

Pewadahan yang digunakan di Kabupaten Sukoharjo adalah kontainer dengan kapasitas 6 m³ yang ditempatkan di depo sebagai wadah sementara dari pengumpulan sampah baik domestik maupun non domestik. Untuk pewadahan di fasilitas-fasilitas umum seperti alun-alun, sepanjang jalan, tempat ibadah dan lain sebagainya, pada umumnya digunakan bin dengan kapasitas 50 liter. Pewadahan yang dilakukan pada permukiman penduduk menggunakan pewadahan milik masyarakat yang terdiri dari berbagai macam



Gambar 2. 15
Penyapuan Jalan Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Laporan Akhir Penyusunan FS TPA Regional Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo, 2016

b. Pengumpulan

Sarana pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan sampah dari rumah-rumah atau sumber sampah ke TPS adalah gerobak sampah dan becak sampah. Jumlah gerobak sampah yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42 unit. Sedangkan jumlah becak sampah sebanyak 61 unit. Rata-rata ritasi sebanyak 2 rit/hari. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 25.

Tabel II. 25
Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Sukoharjo

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	f. Gerobak	unit	42
	g. Gerobak Motor	unit	0
	h. Pick Up	unit	0
	i. Becak	unit	61
2	Kapasitas angkut total		
	j. Gerobak	m ³	63
	k. Gerobak Motor	m ³	0
	l. Pick Up	m ³	0
	m.Becak	m ³	91,5
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022



Gambar 2. 16
Gerobak Sampah
Sumber: UPTD Pengelolaan Sampah, 2022

Pemindahan sampah di Kabupaten Sukoharjo menggunakan sarana berupa TPS, dan terdapat TPS sejumlah 140 unit yang melayani 60 Kelurahan. TPS yang ada di Kabupaten Sukoharjo rata-rata berupa TPS Bak Permanen Tertutup, TPS Bak Permanen Terbuka, dan TPS Kontainer Tertutup. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 26.

c. Pengangkutan

Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam pengelolaan persampahan. Pengangkutan sampah dilakukan dari kontainer maupun dari TPS menuju ke TPA. Sarana pengangkutan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. *Dump Truck* sebanyak 27 (enam) unit

Kendaraan pengangkut sampah dengan bak terbuka yang memiliki lengan hidrolis yang tersambung dengan bak *truck*, dengan kapasitas 12 m³. Ritasi dump truk dalam melakukan pengangkutan sampah sebanyak 2 ritasi/hari.

2. *Arm roll Truck* sebanyak 10 (sebelas) unit

Kendaraan untuk mengangkut kontainer sampah sejumlah 26 unit kontainer yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Ritasi arm roll dalam melakukan pengangkutan sampah sebanyak 3-4 ritasi/hari.

Tabel II. 26
Penampungan Sementara dan Pengangkutan Sampah
Kabupaten Sukoharjo

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
-	Transfer depo	unit	0
-	TPS	unit	114
-	Kontainer	unit	26
-	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	0
2	Kapasitas TPS		
-	Transfer depo	m ³	0
-	TPS	m ³	6
-	Kontainer	m ³	6
-	Tong Sampah Pejalan Kaki	m ³	0
3	Jumlah Alat Angkut		
-	Compactor Truk	unit	0
-	Arm roll truck	unit	10
-	Dump Truk	unit	27
-	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
-	Compactor Truk	m ³	0
-	Arm roll truck	m ³	60
-	Dump Truk	m ³	324
-	Pick Up	m ³	0
5	Ritasi Pengangkutan	rit/hari	2

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022



Gambar 2. 17
 Sarana Pengangkutan Sampah Kabupaten Sukoharjo
 Foto diambil: 03/08/2022
Sumber: Dokumentasi Tim Penyusun, 2022

d. Pengolahan

Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, pengolahan sampah di Kabupaten Sukoharjo berada di TPS 3R. TPS 3R di Kabupaten Sukoharjo mempunyai 12 unit yang tersebar di 10 desa/Kelurahan. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai TPST, PDU (Pusat Daur Ulang), pengolahan menggunakan biodigester dan insenerator. Perlu dilakukan peningkatan pengolahan sampah dalam rangka pengurangan sampah berkelanjutan.

Tabel II. 27
Sub Sistem Pengolahan Sampah Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Pengolahan	Lokasi	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelolaan	Status Aset
1	Tidak Terdapat Pusat Daur Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tidak Terdapat TPST	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tidak Terdapat Biodigester	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tidak Terdapat Insenerator	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

e. Pemrosesan Akhir

Kabupaten Sukoharjo memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari dengan sistem open dumping. TPA Mojorejo tersebut berjarak ± 5 km dari pusat Kabupaten Sukoharjo. Sejak Tahun 2010, TPA yang memiliki luas wilayah awal sebesar 2,62 Ha ini, mengalami penambahan area sebesar 0,88 Ha. Luas landfill yang efektif seluas 4,5 ha dengan luas landfill terpakai 4,5 ha, sehingga tidak ada lahan untuk pengembangan zona landfill baru. Jika akan melakukan pengembangan maka diperlukan pembebasan lahan kembali, yang memerlukan waktu cukup lama. TPA Mojorejo sudah memakai sistem *controlled landfill*. Detail mengenai TPA Mojorejo dapat dilihat pada Tabel II. 28 berikut.

Tabel II. 28
Pemrosesan Akhir Sampah Kabupaten Sukoharjo

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA		TPA Mojorejo, Desa Mojorejo Kec Bendosari
	Wilayah Pelayanan		Kecamatan Weru, Bulu, Tawang Sari, Sukoharjo, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojokerto, Grogol, Baki, Gatak, Kartasura
2	Tahun pembangunan		1994
	Tahun Optimalisasi		2010
	Usia Pakai TPA (tahun)		0
3	Status aset (pilih salah satu)		Sudah
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	4,5
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	4,5
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Controlled Landfill
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: <i>bulldozer, excavator, backhoe</i>	Unit	Bulldozer: 2 Excavator: 2
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	184,1
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya)	Ton/hari	3,87

No	Deskripsi	Satuan	TPA
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)		Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	0,2

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

TPA Mojorejo dilengkapi dengan beberapa sarana dari fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang.

Tabel II. 29
Fasilitas Dasar TPA Mojorejo

No	Fasilitas Dasar	Keterangan
1	Jalan Masuk	Jalan masuk menuju TPA terdapat di Jalan Mulur-Puhgogor selebar 6 meter yang melewati permukiman dan dilengkapi penunjuk jalan disetiap tikungan ataupun persimpangan. Jalan masuk cukup baik untuk dilewati kendaraan <i>Dump Truck</i> dan <i>Armroll Truck</i> . Akses jalan sudah berupa aspal.
2	Pintu Gerbang	Terdapat 1 pintu gerbang masuk TPA Mojorejo, kondisi pintu masuk baik. Pintu utama digunakan untuk masuk kendaraan pengangkut sampah. Sesuai SOP TPA setiap kendaraan harus berhenti di Jembatan Timbang.
3	Jalan Operasional	Terdapat jalan operasional untuk menuju ke <i>landfill</i> .
4	Instalasi Listrik	Instalasi listrik sudah ada, berfungsi untuk kantor dan penerangan sekitar.
5	Saluran Drainase	Drainase di TPA Mojorejo terletak diantara <i>landfill</i> , bahu jalan dan keliling TPA. Kondisi drainase sangat baik, cukup untuk mengalirkan air saat hujan turun. Tetapi di beberapa titik ada sampah yang masuk dalam drainase.
6	Ketersediaan Air Bersih	Terdapat air bersih untuk mencukupi kebutuhan MCK pengelola TPA dan IPLT.
7	Papan Nama	Terdapat papan nama TPA Mojorejo di bagian timur gapura TPA. Papan nama sudah cukup terlihat dan dalam kondisi baik.
9	Kantor	Kondisi bangunan kantor TPA masih baik dan terawat. Kantor dilengkapi dengan ruang penyimpanan data TPA dan ruang rapat. Kantor berfungsi untuk inventaris alat-alat di TPA.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Tabel II. 30
Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA Mojorejo

No	Fasilitas Perlindungan	Keterangan
1	Sumur Pantau	Terdapat 3 buah sumur pantau di sekitar TPA
2	Instalasi Pengelolaan Air Lindi	Air lindi dialirkan dan diolah melalui 4 bak pengolahan air lindi.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Tabel II. 31
Fasilitas Operasional TPA Mojorejo

No	Fasilitas Operasional	Keterangan
1	Alat Berat	Terdiri dari 2 unit <i>excavator</i> dan 2 unit <i>buldozer</i>

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Tabel II. 32
Fasilitas Penunjang TPA Mojorejo

No	Fasilitas Penunjang	Keterangan
1	Bengkel	TPA Mojorejo telah memiliki bengkel yang digunakan untuk menyimpan alat berat yang rusak. Bangunan bengkel masih dalam kondisi baik.
2	Garasi	Garasi alat berat dapat menampung 2-3 unit dengan kondisi bangunan yang masih baik.
3	Tempat Cuci Alat Angkut dan Alat Berat	Terdapat tempat cuci alat angkut di TPA Mojorejo.
5	Jembatan Timbang	Terdapat jembatan timbang di TPA Mojorejo yang masih beroperasi.
5	Laboratorium	Belum terdapat laboratorium di TPA Mojorejo.
6	Tempat Parkir	Terdapat tempat parkir di TPA Mojorejo di daerah samping kantor untuk motor, sedangkan mobil dapat parkir di area depan kantor.
7	Taman	Terdapat taman di area sekitar kantor dengan dilengkapi dengan pohon rindang

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022



a.

b.

Gambar 2. 18

a. Gerbang Masuk TPA Mojorejo b. Area *landfill* TPA Mojorejo

Foto diambil: 03/08/2022

Sumber: Dokumentasi Tim Penyusun, 2022

a.

b.

Gambar 2. 19

Jembatan Timbang Kabupaten Sukoharjo

Foto diambil: b. 03/08/2022

*Sumber: a. UPTD Pengelolaan Sampah, 2022**b. Dokumentasi Tim Penyusun, 2022*

f. Kegiatan Pengurangan

Kegiatan pengurangan sampah dilakukan pada hulu dan hilir. Untuk pengolahan sampah pada hulu melibatkan masyarakat dan sekolah dalam pengurangan sampah baik di rumah tangga maupun dengan adanya bank sampah. Selain itu juga terdapat 12 unit TPS 3R yang melakukan pengomposan dan daur ulang sampah. Untuk bank sampah hingga tahun 2021 mencapai 170 unit. Pengurangan sampah di hilir dilakukan di TPA dengan melibatkan pemulung. Berikut ini adalah data jumlah pengurangan sampah yang dilakukan di bank sampah dan TPS 3R.

Tabel II. 33
Pengurangan Sampah Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Pengolahan	Lokasi	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelolaan	Status Aset
1	TPS 3R	Makamhaji	Beroperasi	2014	Pengomposan	5,6	5,5152	0,0848	KSM	Sudah Serah terima
2	TPS 3R	Kwarasan	Tidak	2016	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
3	TPS 3R	Gonilan	Beroperasi	2016	Pengomposan dan Daur Ulang	0,52	0,52	0	KSM	Sudah Serah terima
4	TPS 3R	Gumpang	Tidak	2016	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
5	TPS 3R	Ngabeyan	Beroperasi	2017	Daur Ulang	1,274	0,786	0,488	KSM	Sudah Serah terima
6	TPS 3R	Gedangan	Beroperasi	2021	Pengomposan dan Daur Ulang	8,8	7	1,8	KSM	Sudah Serah terima
7	TPS 3R	Sukoharjo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,002	0,000541667	0,001458333	KSM	Sudah Serah terima
8	TPS 3R	Dukuh	Beroperasi	2019	Pengomposan dan Daur Ulang	0,61	0,321	0,289	KSM	Sudah Serah terima
9	TPS 3R	Sonorejo	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,02	0,01425	0,00575	KSM	Sudah Serah terima
10	TPS 3R	Bulakan	Tidak	2019	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
11	TPS 3R	Ngabeyan	Beroperasi	2017	Pengomposan dan Daur Ulang	1,75	1,747	0,003	KSM	Sudah Serah terima
12	TPS 3R	Makamhaji	Beroperasi	2015	Pengomposan dan Daur Ulang	1,88	1,875	0,005	KSM	Sudah Serah terima
13	Bank Sampah	Gayam	Beroperasi	2013	Daur Ulang	0,007166667	0,007095	0,071666667	KSM	Sudah Serah terima
14	Bank Sampah	Gayam	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,0092	0,008903333	0,000296667	KSM	Sudah Serah terima
15	Bank Sampah	Joho	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,01	0,009418	0,000582	KSM	Sudah Serah terima
16	Bank Sampah	Sukoharjo	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,004333333	0,004008333	0,000325	KSM	Sudah Serah terima
17	Bank Sampah	Sukoharjo	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,0075	0,007498333	1,66667E-06	KSM	Sudah Serah terima
18	Bank Sampah	Joho	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,009433333	0,009395667	3,76667E-05	KSM	Sudah Serah terima
19	Bank Sampah	Gayam	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,008	0,007834667	0,000165333	KSM	Sudah Serah terima
20	Bank Sampah	Jetis	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,002	0,001768	0,000232	KSM	Sudah Serah terima
21	Bank Sampah	Sukoharjo	Beroperasi	2014	Pengomposan	0,003333333	0,002333333	0,001	KSM	Sudah Serah terima
22	Bank Sampah	Begajah	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,006666667	0,0064368	0,000229867	KSM	Sudah Serah terima
23	Bank Sampah	Gayam	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,006333333	0,006155	0,000178333	KSM	Sudah Serah terima
24	Bank Sampah	Kriwen	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,0035	0,003466667	3,33333E-05	KSM	Sudah Serah terima
25	Bank Sampah	Kriwen	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,002	0,001763333	0,000236667	KSM	Sudah Serah terima
26	Bank Sampah	Kenep	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,006666667	0,0065127	0,000153967	KSM	Sudah Serah terima
27	Bank Sampah	Jetis	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,002333333	0,002168333	0,000165	KSM	Sudah Serah terima
28	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,006666667	0,006656033	1,06333E-05	KSM	Sudah Serah terima
29	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,005333333	0,005329233	4,1E-06	KSM	Sudah Serah terima
30	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,006166667	0,006141667	0,000025	KSM	Sudah Serah terima
31	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,005166667	0,0051432	2,34667E-05	KSM	Sudah Serah terima
32	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,004333333	0,0043123	2,10333E-05	KSM	Sudah Serah terima

No	Jenis Pengolahan	Lokasi	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelolaan	Status Aset
33	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,0058	0,005755667	4,43333E-05	KSM	Sudah Serah terima
34	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,005333333	0,005298633	0,0000347	KSM	Sudah Serah terima
35	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,005	0,004991367	8,63333E-06	KSM	Sudah Serah terima
36	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,005333333	0,005308533	2,48E-05	KSM	Sudah Serah terima
37	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,005333333	0,00528778	4,55533E-05	KSM	Sudah Serah terima
38	Bank Sampah	Pandeyan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,006333333	0,00621598	0,000117353	KSM	Sudah Serah terima
39	Bank Sampah	Grogol	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,006333333	0,006293	4,03333E-05	KSM	Sudah Serah terima
40	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,008833333	0,008802167	3,11667E-05	KSM	Sudah Serah terima
41	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,00191	0,001873333	3,66667E-05	KSM	Sudah Serah terima
42	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,008333333	0,008302167	3,11667E-05	KSM	Sudah Serah terima
43	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,0084	0,008368833	3,11667E-05	KSM	Sudah Serah terima
44	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,008333333	0,008302167	3,11667E-05	KSM	Sudah Serah terima
45	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,010812	0,01077	4,2E-05	KSM	Sudah Serah terima
46	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2015	Pengomposan dan Daup Ulang	0,002426333	0,002391667	3,46667E-05	KSM	Sudah Serah terima
47	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,009041096	0,009025282	1,58137E-05	KSM	Sudah Serah terima
48	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,009041096	0,009025282	1,58137E-05	KSM	Sudah Serah terima
49	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,009041096	0,009025282	1,58137E-05	KSM	Sudah Serah terima
50	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,008945753	0,008939178	6,57534E-06	KSM	Sudah Serah terima
51	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,008383562	0,008367748	1,58137E-05	KSM	Sudah Serah terima
52	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,008416438	0,008367748	4,86904E-05	KSM	Sudah Serah terima
53	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,008219178	0,008203364	1,58137E-05	KSM	Sudah Serah terima
54	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,002327671	0,002321096	6,57534E-06	KSM	Sudah Serah terima
55	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,008219178	0,008203364	1,58137E-05	KSM	Sudah Serah terima
56	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,008219178	0,008203364	1,58137E-05	KSM	Sudah Serah terima
57	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2015	Daur Ulang	0,008219178	0,008203364	1,58137E-05	KSM	Sudah Serah terima
58	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,000841644	0,000810411	3,12329E-05	KSM	Sudah Serah terima
59	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,00739726	0,007336734	6,0526E-05	KSM	Sudah Serah terima
60	Bank Sampah	Gonilan	Beroperasi	2018	Pengomposan dan Daup Ulang	0,010576438	0,010540274	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
61	Bank Sampah	Gonilan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,007203288	0,007180274	2,30137E-05	KSM	Sudah Serah terima
62	Bank Sampah	Gonilan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,005789589	0,005750137	3,94521E-05	KSM	Sudah Serah terima
63	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,007561644	0,007336734	0,00022491	KSM	Sudah Serah terima
64	Bank Sampah	Kartasura	Beroperasi	2017	Pengomposan dan Daup Ulang	0,007364384	0,00734137	2,30137E-05	KSM	Sudah Serah terima
65	Bank Sampah	Kertonatan	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,004372603	0,004538959	-0,000166356	KSM	Sudah Serah terima
66	Bank Sampah	Gonilan	Tidak	2019	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
67	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,002015342	0,001972603	4,27397E-05	KSM	Sudah Serah terima

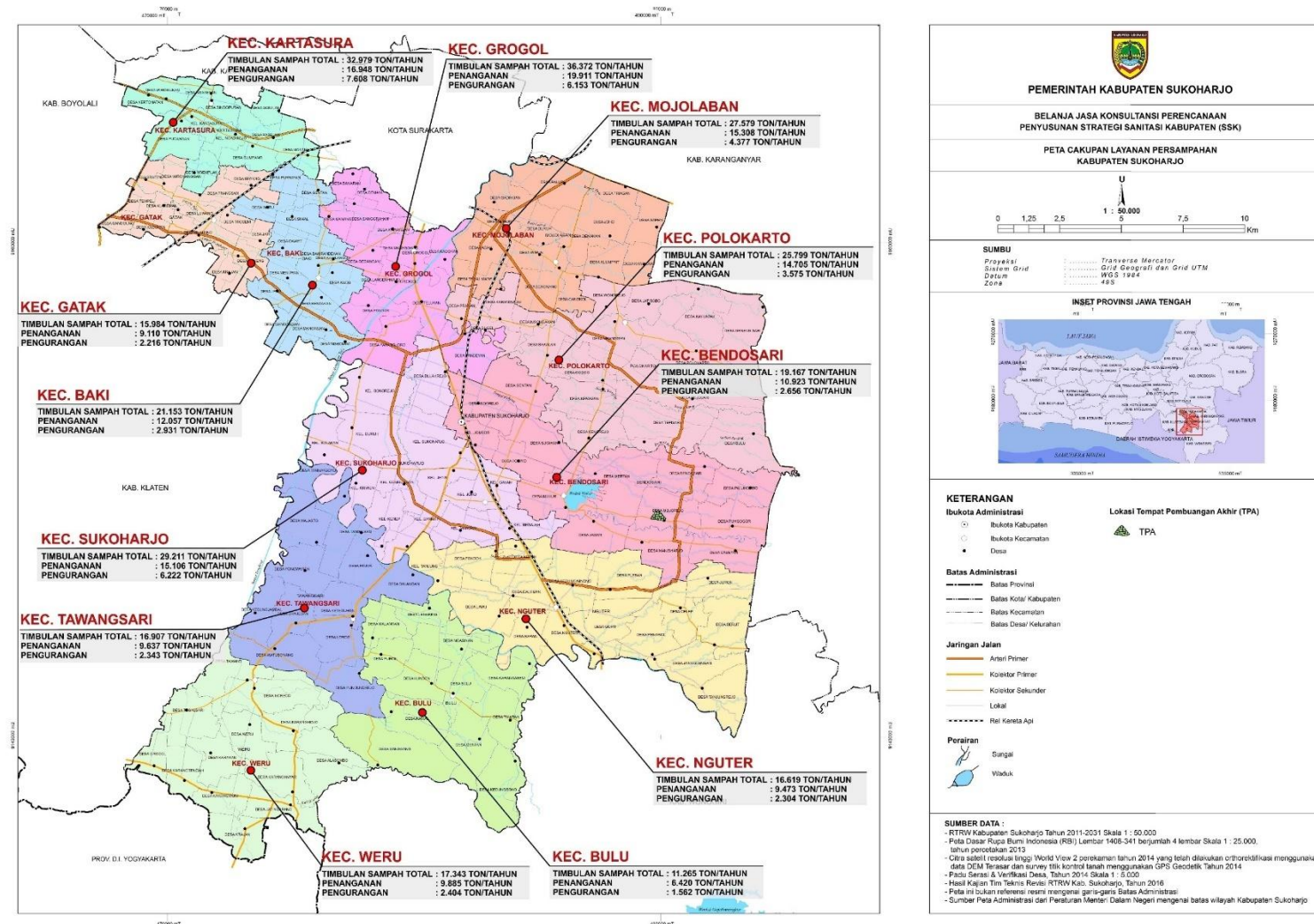
No	Jenis Pengolahan	Lokasi	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelolaan	Status Aset
68	Bank Sampah	Gonilan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,001847671	0,001808219	3,94521E-05	KSM	Sudah Serah terima
69	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,001311781	0,001275616	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
70	Bank Sampah	Gumpang	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,002229041	0,002166575	6,24658E-05	KSM	Sudah Serah terima
71	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	2019	Pengomposan dan Daur Ulang	0,010001096	0,009955068	4,60274E-05	KSM	Sudah Serah terima
72	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,003455342	0,003383014	7,23288E-05	KSM	Sudah Serah terima
73	Bank Sampah	Pucangan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,003486575	0,00341589	7,06849E-05	KSM	Sudah Serah terima
74	Bank Sampah	Gonilan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,002376986	0,002340822	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
75	Bank Sampah	Gonilan	Tidak	2019	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
76	Bank Sampah	Kartasura	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,004106301	0,004066849	3,94521E-05	KSM	Sudah Serah terima
77	Bank Sampah	Pucangan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,002524932	0,002485479	3,94521E-05	KSM	Sudah Serah terima
78	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	2019	Pengomposan dan Daur Ulang	0,006404384	0,006364932	3,94521E-05	KSM	Sudah Serah terima
79	Bank Sampah	Pabelan	Tidak	2017	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
80	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,010849315	0,010823342	2,59726E-05	KSM	Sudah Serah terima
81	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,003616438	0,003615452	9,86301E-07	KSM	Sudah Serah terima
82	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,00690411	0,006881096	2,30137E-05	KSM	Sudah Serah terima
83	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,00690411	0,006881096	2,30137E-05	KSM	Sudah Serah terima
84	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,006936986	0,006881096	5,58904E-05	KSM	Sudah Serah terima
85	Bank Sampah	Gonilan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,003336986	0,003297534	3,94521E-05	KSM	Sudah Serah terima
86	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0,005855342	0,005848767	6,57534E-06	KSM	Sudah Serah terima
87	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,003616438	0,003547397	6,90411E-05	KSM	Sudah Serah terima
88	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0,003294247	0,003221918	7,23288E-05	KSM	Sudah Serah terima
89	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,006936986	0,006891945	4,50411E-05	KSM	Sudah Serah terima
90	Bank Sampah	Pucangan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,001903562	0,001867397	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
91	Bank Sampah	Pucangan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,002314521	0,002278356	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
92	Bank Sampah	Pucangan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,003756164	0,003728219	2,79452E-05	KSM	Sudah Serah terima
93	Bank Sampah	Kartasura	Tidak	2020	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
94	Bank Sampah	Kedungwinong	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,006575342	0,006563178	1,21644E-05	KSM	Sudah Serah terima
95	Bank Sampah	Pondok	Beroperasi	2017	Daur Ulang	0,006575342	0,006563178	1,21644E-05	KSM	Sudah Serah terima
96	Bank Sampah	Tanjung	Beroperasi	2017	Daur Ulang	0,007923288	0,007666126	0,000257162	KSM	Sudah Serah terima
97	Bank Sampah	Tanjungrejo	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,013150685	0,013055014	9,56712E-05	KSM	Sudah Serah terima
98	Bank Sampah	Jombor	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,017631781	0,017470685	0,000161096	KSM	Sudah Serah terima
99	Bank Sampah	Jombor	Tidak	2015	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
100	Bank Sampah	Jombor	Tidak	2015	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
101	Bank Sampah	Jombor	Tidak	2015	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
102	Bank Sampah	Gentan	Tidak	2016	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima

No	Jenis Pengolahan	Lokasi	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelolaan	Status Aset
103	Bank Sampah	Jombor	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,011506849	0,011396055	0,000110795	KSM	Sudah Serah terima
104	Bank Sampah	Jombor	Tidak	2016	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
105	Bank Sampah	Jombor	Tidak	2016	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
106	Bank Sampah	Sugihan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,009863014	0,009831123	3,18904E-05	KSM	Sudah Serah terima
107	Bank Sampah	Jombor	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,001098082	0,001068493	2,9589E-05	KSM	Sudah Serah terima
108	Bank Sampah	Kenokorejo	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,009863014	0,009831123	3,18904E-05	KSM	Sudah Serah terima
109	Bank Sampah	Kragilan	Beroperasi	2014	Pengomposan dan Da ur Ulang	0,000841644	0,000831781	9,86301E-06	KSM	Sudah Serah terima
110	Bank Sampah	Gadingan	Tidak	2016	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
111	Bank Sampah	Tegalsari	Beroperasi	2014	Daur Ulang	0,009205479	0,009180493	2,49863E-05	KSM	Sudah Serah terima
112	Bank Sampah	Puron	Beroperasi	2016	Daur Ulang	0,009205479	0,009180493	2,49863E-05	KSM	Sudah Serah terima
113	Bank Sampah	Tiyanan	Beroperasi	2017	Pengomposan dan Da ur Ulang	0,001012603	0,000973151	3,94521E-05	KSM	Sudah Serah terima
114	Bank Sampah	Puron	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,009205479	0,009180493	2,49863E-05	KSM	Sudah Serah terima
115	Bank Sampah	Tiyanan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,001010959	0,000969863	4,10959E-05	KSM	Sudah Serah terima
116	Bank Sampah	Tiyanan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,008547945	0,008522959	2,49863E-05	KSM	Sudah Serah terima
117	Bank Sampah	Tiyanan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,005483836	0,005447671	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
118	Bank Sampah	Tiyanan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,008580822	0,008522959	5,7863E-05	KSM	Sudah Serah terima
119	Bank Sampah	Tiyanan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,000230137	0,000213699	1,64384E-05	KSM	Sudah Serah terima
120	Bank Sampah	Tiyanan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,006575342	0,006517479	5,7863E-05	KSM	Sudah Serah terima
121	Bank Sampah	Grajegan	Beroperasi	2017	Daur Ulang	0,006575342	0,006517479	5,7863E-05	KSM	Sudah Serah terima
122	Bank Sampah	Pojok	Beroperasi	2017	Pengomposan dan Da ur Ulang	0,007232877	0,007189151	4,3726E-05	KSM	Sudah Serah terima
123	Bank Sampah	Trangsan	Beroperasi	2018	Daur Ulang	0,013545205	0,013532055	1,31507E-05	KSM	Sudah Serah terima
124	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,006575342	0,006517479	5,7863E-05	KSM	Sudah Serah terima
125	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	-	Pengomposan dan Da ur Ulang	0,008590685	0,008515068	7,56164E-05	KSM	Sudah Serah terima
126	Bank Sampah	Kartasura	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,001140822	0,001104658	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
127	Bank Sampah	Kartasura	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,002590685	0,002557151	3,35342E-05	KSM	Sudah Serah terima
128	Bank Sampah	Kartasura	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,006608219	0,006550356	5,7863E-05	KSM	Sudah Serah terima
129	Bank Sampah	Kartasura	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,002120548	0,002081096	3,94521E-05	KSM	Sudah Serah terima
130	Bank Sampah	Purbayan	Beroperasi	2020	Pengomposan dan Da ur Ulang	0,01060274	0,010497534	0,000105205	KSM	Sudah Serah terima
131	Bank Sampah	Kertonatan	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,00509589	0,005053151	4,27397E-05	KSM	Sudah Serah terima
132	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,000657534	0,000595068	6,24658E-05	KSM	Sudah Serah terima
133	Bank Sampah	Ngabeyan	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,000907397	0,000851507	5,58904E-05	KSM	Sudah Serah terima
134	Bank Sampah	Grogol	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,009073973	0,010315397	-0,001241425	KSM	Sudah Serah terima
135	Bank Sampah	Ngadirejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,008252055	0,008221041	3,10137E-05	KSM	Sudah Serah terima
136	Bank Sampah	Singopuran	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,000614795	0,000565479	4,93151E-05	KSM	Sudah Serah terima
137	Bank Sampah	Sanggung	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,008219178	0,008148164	7,10137E-05	KSM	Sudah Serah terima

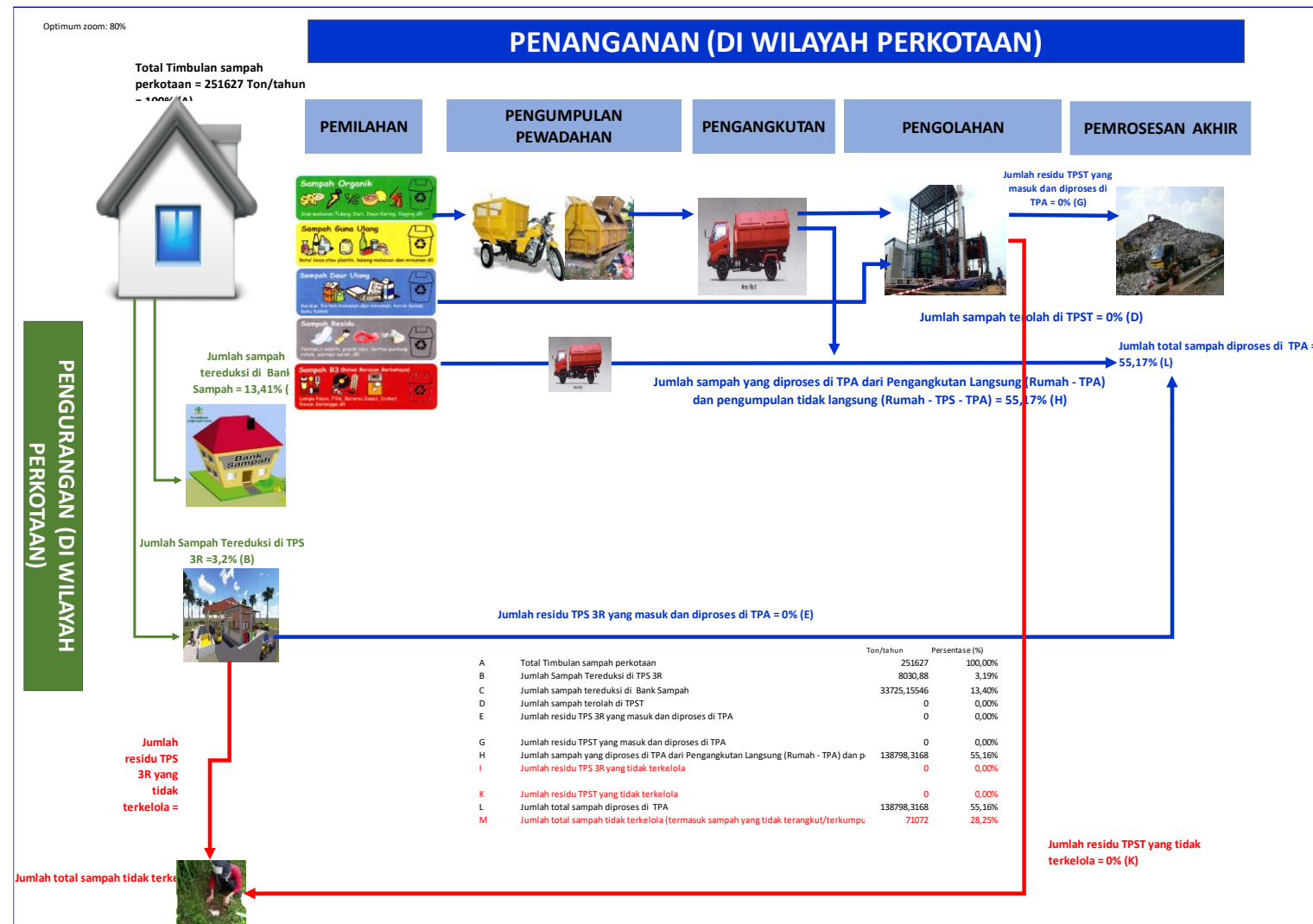
No	Jenis Pengolahan	Lokasi	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelolaan	Status Aset
138	Bank Sampah	Menuran	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,008219178	0,008213918	5,26027E-06	KSM	Sudah Serah terima
139	Bank Sampah	Purbayan	Beroperasi	2021	Daur Ulang	0,001334795	0,00129863	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
140	Bank Sampah	Gentan	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,007561644	0,007556712	4,93151E-06	KSM	Sudah Serah terima
141	Bank Sampah	Pondok	Beroperasi	2021	Daur Ulang	0,008219178	0,008214345	4,83288E-06	KSM	Sudah Serah terima
142	Bank Sampah	Parangjoro	Beroperasi	2021	Daur Ulang	0,008219178	0,008214345	4,83288E-06	KSM	Sudah Serah terima
143	Bank Sampah	Genengsari	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,007232877	0,007228044	4,83288E-06	KSM	Sudah Serah terima
144	Bank Sampah	Kenokorejo	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,007265753	0,007228044	3,77096E-05	KSM	Sudah Serah terima
145	Bank Sampah	Kayuapak	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,006575342	0,006574139	1,20329E-06	KSM	Sudah Serah terima
146	Bank Sampah	Combongan	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,006575342	0,006547506	2,78367E-05	KSM	Sudah Serah terima
147	Bank Sampah	Karangmojo	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,001578082	0,001553425	2,46575E-05	KSM	Sudah Serah terima
148	Bank Sampah	Begajah	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,003287671	0,003017753	0,000269918	KSM	Sudah Serah terima
149	Bank Sampah	Jetis	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,008876712	0,008648219	0,000228493	KSM	Sudah Serah terima
150	Bank Sampah	Serut	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,012164384	0,012026301	0,000138082	KSM	Sudah Serah terima
151	Bank Sampah	Tanjungrejo	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,001315068	0,001252945	6,21238E-05	KSM	Sudah Serah terima
152	Bank Sampah	Kedungwinong	Tidak	-	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
153	Bank Sampah	Dalangan	Tidak	2021	Daur Ulang	0	0	0	KSM	Sudah Serah terima
154	Bank Sampah	Tangkisan	Beroperasi	2019	Daur Ulang	0,000394521	0,000336	5,85205E-05	KSM	Sudah Serah terima
155	Bank Sampah	Kateguhan	Beroperasi	2021	Daur Ulang	0,000493151	0,00042411	6,90411E-05	KSM	Sudah Serah terima
156	Bank Sampah	Karangmojo	Beroperasi	2020	Daur Ulang	0,001709589	0,001619178	9,0411E-05	KSM	Sudah Serah terima
157	Bank Sampah	Grogol	Beroperasi	2017	Daur Ulang	0,004076712	0,004066849	9,86301E-06	KSM	Sudah Serah terima
158	Bank Sampah	Tegalsari	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,004109589	0,004043836	6,57534E-05	KSM	Sudah Serah terima
159	Bank Sampah	Karanganyar	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,001150685	0,001094795	5,58904E-05	KSM	Sudah Serah terima
160	Bank Sampah	Gonilan	Beroperasi	-	Daur Ulang	5,58904E-05	5,26027E-05	3,28767E-06	KSM	Sudah Serah terima
161	Bank Sampah	Singopuran	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,004448219	0,004412055	3,61644E-05	KSM	Sudah Serah terima
162	Bank Sampah	Singopuran	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,004339726	0,00426411	7,56164E-05	KSM	Sudah Serah terima
163	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,010638904	0,010629041	9,86301E-06	KSM	Sudah Serah terima
164	Bank Sampah	Makamhaji	Beroperasi	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0,005194521	0,005187945	6,57534E-06	KSM	Sudah Serah terima
165	Bank Sampah	Klumprit	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,000468493	0,000463562	4,93151E-06	KSM	Sudah Serah terima
166	Bank Sampah	Palur	Beroperasi	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0,001762192	0,001755616	6,57534E-06	KSM	Sudah Serah terima
167	Bank Sampah	Palur	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,004421918	0,00441863	3,28767E-06	KSM	Sudah Serah terima
168	Bank Sampah	Palur	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,00033863	0,000335342	3,28767E-06	KSM	Sudah Serah terima
169	Bank Sampah	Demakan	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,002077808	0,00206137	1,64384E-05	KSM	Sudah Serah terima
170	Bank Sampah	Joho	Beroperasi	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0,001719452	0,001699726	1,9726E-05	KSM	Sudah Serah terima
171	Bank Sampah	Sapen	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,001847671	0,001844384	3,28767E-06	KSM	Sudah Serah terima
172	Bank Sampah	Laban	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,000647671	0,000627945	1,9726E-05	KSM	Sudah Serah terima

No	Jenis Pengolahan	Lokasi	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelolaan	Status Aset
173	Bank Sampah	Laban	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,000243288	0,00024	3,28767E-06	KSM	Sudah Serah terima
174	Bank Sampah	Laban	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,000516164	0,000506301	9,86301E-06	KSM	Sudah Serah terima
175	Bank Sampah	Palur	Beroperasi	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0,001400548	0,001380822	1,9726E-05	KSM	Sudah Serah terima
176	Bank Sampah	Palur	Beroperasi	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0,001867397	0,001867397	0	KSM	Sudah Serah terima
177	Bank Sampah	Kadilangu	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,00086137	0,000841644	1,9726E-05	KSM	Sudah Serah terima
178	Bank Sampah	Gentan	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,016724384	0,016724384	0	KSM	Sudah Serah terima
179	Bank Sampah	Gentan	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,00014137	0,000128219	1,31507E-05	KSM	Sudah Serah terima
180	Bank Sampah	Gentan	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,001272329	0,001265753	6,57534E-06	KSM	Sudah Serah terima
181	Bank Sampah	Sanggung	Beroperasi	-	Pengomposan dan Daur Ulang	0,019860822	0,019857534	3,28767E-06	KSM	Sudah Serah terima
182	Bank Sampah	Karangasem	Beroperasi	-	Daur Ulang	0,000608219	0,000601644	6,57534E-06	KSM	Sudah Serah terima

Sumber: UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukoharjo, 2022



Gambar 2. 20
 Peta Cakupan Layanan Sampah Perkotaan
 Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022



Gambar 2. 21
Rantai Layanan Persampahan Kabupaten Sukoharjo
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 target persampahan dalam penanganan sebesar 80% dan pengurangan sampah 20%. Sedangkan target Provinsi Jawa Tengah sampai Tahun 2024 sebesar 75% untuk penanganan dan 25% untuk pengurangan. Target Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun 2024 sebesar 60% untuk penanganan sampah dan 20% untuk pengurangan sampah.

Capaian penanganan sampah Kabupaten Sukoharjo pada saat ini sudah mencapai 55,2% sedangkan pengurangan mencapai 16,6%, sehingga terdapat GAP terhadap Taget Tahun 2024 sebesar 3,4% untuk penanganan sampah perkotaan dan 4,8% untuk pengurangan sampah perkotaan. Tabel II. 34 merupakan analisis GAP pencapaian akses persampahan berdasarkan Target RPJMN 2020-2024.

Tabel II. 34
Analisis Gap Pencapaian Akses Persampahan Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	75,0%	60,0%	55,0%	55,2%	4,8%	-0,2%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	25,0%	20,0%	18,0%	16,6%	3,4%	1,4%

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

2.2.2.2. Kelembagaan dan Kebijakan/Pengaturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sukoharjo terdapat peran pemerintah yang menjalankan fungsi dan kepentingannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, adapun peran pemangku kepentingan dan peraturan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel II. 35 berikut.

Tabel II. 35

Tabel Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Urusan Persampahan

No	Perangkat Daerah	Urusan Persampahan
1	Dinas Lingkungan Hidup	Perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, monitoring dan evaluasi, berfungsi sebagai regulator persampahan
2	UPT TPA	Operator pengelolaan persampahan

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Perangkat daerah yang menangani persampahan di Kabupaten Sukoharjo adalah Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Seksi Pengurangan Sampah dan Seksi Penanganan Sampah, dan juga UPT Pengelolaan Sampah.

1. Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kebijakan pengurangan sampah, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah, dan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri.
2. Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kebijakan penanganan sampah daerah, penyediaan sarana prasarana penanganan sampah, dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
3. Tugas UPT Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukoharjo adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan sampah.

Tabel II. 36

Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan Sebagain ya
Perencanaan			
a. menyusun target pengelolaan persampahan skala Kabupaten Sukoharjo	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
b. menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian Target	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
c. menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian Target	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
Pengadaan Sarana			

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan Sebagain ya
a. menyediakan sarana pewadahan pada fasilitas umum	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
b. menyediakan sarana pengumpulan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
c. membangun sarana penampungan sementara (TPS)	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
d. menyediakan sarana pengangkutan sampah (TPS ke TPA)	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
e. menyediakan sarana pengolahan sampah (TPS 3R, TPST)	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
f. membangun sarana (TPS 3R, TPST)	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
g. membangun sarana TPA dan IPL	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Pengelolaa n Sampah	-
Pengelolaan			
a. menyediakan layanan pengelolaan persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Pengelolaa n Sampah	-
b. mengelola TPST dan TPA		UPTD Pengelolaa n Sampah	-
c. melakukan penarikan retribusi pelayanan persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
d. memberikan izin usaha pengangkutan persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
Pengaturan dan Pembinaan			
a. mengatur prosedur penyediaan layanan persampahan (sarana pengumpulan, pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
b. melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah liar	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
Monitoring dan Evaluasi			
a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan Sebagain ya
pengelolaan persampahan skala Kabupaten Sukoharjo	pada Dinas Lingkungan Hidup		
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-
d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu IPL	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	-	-

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

b. Kelembagaan Masyarakat

Sedangkan peran masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam pembangunan infrastruktur persampahan dapat dilihat pada Tabel II. 37.

Tabel II. 37
Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2022

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah Anggota/Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
1	TPS 3R	Kantil	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Makamhaji	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif
2	TPS 3R	Bina Sakinah	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Kwarasan	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Tidak Aktif
3	TPS 3R	Gonilan Bersih	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Gonilan	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif
4	TPS 3R	Gumpang	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Gumpang	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Tidak Aktif
5	TPS 3R	Ngabeyan	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Ngabeyan	Iuran Warga, Penjualan sampah Terpilah, Penjualan Kompos	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif
6	TPS 3R	Gedang Selirang	KSM	11	Operasional TPS 3R	Gedangan	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif
7	TPS 3R	Ngudi Mulyo	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Kelurahan Sukoharjo	Iuran Warga, Penjualan sampah Terpilah, Penjualan Kompos	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif
8	TPS 3R	Sejahtera Makmur	KSM	12	Operasional TPS 3R	Dukuh	Iuran Warga, Penjualan sampah Terpilah, Penjualan Kompos	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif
9	TPS 3R	Sido Makmur	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Sonorejo	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif
10	TPS 3R	Manunggal Jaya	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Bulakan	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Tidak Aktif
11	TPS 3R	Gugur Gunung	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Ngabeyan	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif
12	TPS 3R	Karya Makmur	KSM	Tidak Ada Data	Operasional TPS 3R	Grenjen Makamhaji	Iuran Warga dan Penjualan sampah Terpilah	Infrastruktur Bangunan dan Mesin Pengolah Sampah	Aktif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, 2022

c. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah di Kabupaten Sukoharjo terdapat Pemetaan Kelembagaan Non-Pemerintah yang menjalankan fungsi dan kepentingannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, adapun Pemetaan Kelembagaan Non-Pemerintah dalam bidang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 38
Pemetaan Kelembagaan Non-Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Menjalankan tugas legislasi persampahan - Menjalankan tugas penganggaran persampahan - Menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait persampahan	- Tim Anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diserahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
Pengusaha - CV Panca Sakti - PT Astra Daihatsu - PT Sritex	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER/reputasi dan penghargaan lingkungan	- CV Panca Sakti melakukan pembangunan TPS di Desa Sanggrahan - PT. Astra Daihatsu dan PT. Sritex melakukan Pengadaan sarana prasarana persampahan
BUMDes	- disertifikasi kegiatan usaha di bidang sanitasi	- Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan - Penyediaan SDM dalam pengolahan persampahan - Penyediaan lembaga atau pengelola dalam pengeolahan persampahan
Organisasi Massa (Ormas):	- (Tidak ada keterlibatan Ormas)	(Tidak ada keterlibatan Ormas)
Yayasan (BKM/KSM/LSM/P KK/Koperasi dan lain-lain)	- (Tidak ada keterlibatan Yayasan)	(Tidak ada keterlibatan Yayasan)
Tokoh Masyarakat	- Peningkatan kualitas hidup dan sarana prasana lingkungan dan sanitasi	- Pengaruh terhadap perilaku masyarakat

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Tabel II. 39
Pengaruh dan Keterlibatan Kelembagaan Non Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan	- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan	Sedang	Tinggi	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
	sampah dalam APBD	Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan			
	- Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang			
Pengusaha - CV Panca Sakti - PT Astra Daihatsu - PT Sritex	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	- Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas - Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Sedang	Tinggi	Ya
BUMDes	- Penyediaan fasilitas pengelolaan air sampah - Penyediaan SDM dalam sampah - Penyediaan lembaga atau pengelola dalam sampah		Tinggi	Sedang	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Organisasi Massa (Ormas):	(Tidak ada keterlibatan Ormas)	(Tidak ada keterlibatan Ormas)			
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dan lain-lain)	(Tidak ada keterlibatan Yayasan)	(Tidak ada keterlibatan Yayasan)			
Tokoh Masyarakat	Pengaruh terhadap perilaku masyarakat		Sedang	Sedang	Ya

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

d. Regulasi

Aspek Pengaturan tentang persampahan di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana yang tercantum pada Tabel II. 40 Kabupaten Sukoharjo sudah mempunyai peraturan tentang retribusi sampah yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Tabel II. 40
Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan

No	Komponen	Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Sampah	v	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan:		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Subtansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal subtansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengeloaan Sampah, mohon di chek-list daftar berikut:	v	
a	Substansi pengaturan: tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah	v	
b	Substansi pengaturan: tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah		v
c	Substansi pengaturan: pengaturan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah)	v	
d	Substansi pengaturan: Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	v	
e	Substansi pengaturan: pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	v	

No	Komponen	Ada	Tidak Ada
f	Substansi pengaturan: Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	v	
h	Substansi pengaturan: Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	v	
i	Substansi pengaturan: larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	v	
j	Substansi pengaturan: Pengawasan pengelolaan sampah	v	
k	Substansi pengaturan: Penerapan sanksi administratif	v	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/peraturan Kepala Dinas/pedoman sudah ada?	v	
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
7		Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

2.2.2.3. Komunikasi dan Media Persampahan

Kegiatan komunikasi terkait promosi *hygiene* dan sanitasi persampahan di Kabupaten Sukoharjo yang sudah berjalan sebanyak 4 macam kegiatan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan sosialisasi sekolah adiwiyata untuk menjaga kebersihan sekolah.

Tabel II. 41
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi Persampahan

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Sosialisasi Sekolah Adiwiyata	2018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sekolah Dasar tentang Adiwiyata	Kepala Sekolah dan Guru	Pemerintah Mengajak Kepala Sekolah dan Guru untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah	Menciptakan suasana sekolah yang bersih
2	Sosialisasi Sekolah Adiwiyata	2019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sekolah Dasar tentang Adiwiyata	Kepala Sekolah dan Guru	Pemerintah Mengajak Kepala Sekolah dan Guru untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah	Menciptakan suasana sekolah yang bersih
3	Sosialisasi Sekolah Adiwiyata	2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sekolah Dasar tentang Adiwiyata	Kepala Sekolah dan Guru	Pemerintah Mengajak Kepala Sekolah dan Guru untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah	Menciptakan suasana sekolah yang bersih
4	Sosialisasi Sekolah Adiwiyata	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sekolah Dasar tentang Adiwiyata	Kepala Sekolah dan Guru	Pemerintah Mengajak Kepala Sekolah dan Guru untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah	Menciptakan suasana sekolah yang bersih

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2021

Jenis media komunikasi dan kerjasama terkait air limbah Pemerintah Daerah yaitu berupa Sosialisasi. Media komunikasi dan kerjasama terkait persampahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 42
Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektvitas
1	Sosialisasi	Perangkat Desa/ Kelurahan	APBD	Sosialisasi Budidaya Maggot Untuk Mengatasi Masalah Sampah	Memberikan informasi kepada Perangkat Desa/Kelurahan Mengenai Budidaya Maggot	Belum diketahui
2	Sosialisasi	Pelajar SMP	APBD	Sosialisasi pembuatan POC atau ecoenzim	Mengajarkan kepada pelajar SMP ap aitu POC dan Ecoenzim dan bagaimana cara membuatnya	Belum diketahui

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, 2021



Gambar 2. 22
Sosialisasi Pembuatan POC atau Ecoenzim ke Pelajar SMP
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, 2022

2.2.3. Drainase

Kabupaten Sukoharjo secara umum merupakan dataran landai dengan ketinggian rata-rata 89 – 125 mdpl. Secara topografi Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu daerah datar yang meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban, sedangkan daerah yang miring meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, nguter, Bulu, dan Weru. Untuk tempat tertinggi diatas permukaan air laut adalah Kecamatan Polokarto yaitu 125 mdpl dan yang terendah adalah Kecamatan Grogol yaitu 89 mdpl. Berdasarkan kondisi topografi tersebut, maka sistem drainase perkotaan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilakukan dengan mengandalkan sistem gravitasi murni.

Pembagian Sistem dan Sub DAS drainase penanganan banjir Kabupaten Sukoharjo mengikuti pola dari daerah aliran sungai. Konsep ini merupakan penerapan one river (catchment) one management yang diharapkan akan dapat mempermudah penanganan sistem drainase secara keseluruhan. Sebagai sistem satu DAS satu manajemen maka satu DAS tersebut dapat dikatakan sebagai satu Sistem. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka penanganan satu zona sistem drainase mengacu pada penanganan satu DAS secara keseluruhan. Pembagian Sistem drainase dalam penanganan banjir di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 3 Wilayah Sistem yaitu:

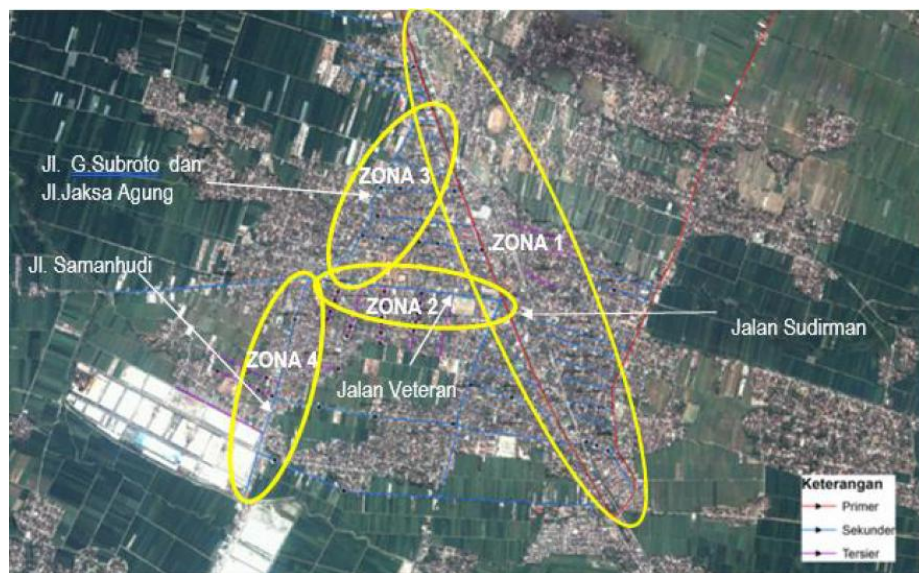
1. Wilayah Sistem Drainase Barat, terdiri dari 2 sub sistem:
 - a. Sub Sistem Drainase Pepe
 - b. Sub Sistem Drainase Baki
2. Wilayah Sistem Drainase Timur, terdiri dari 4 sub sistem:
 - a. Sub Sistem Drainase Siwuluh
 - b. Sub Sistem Drainase Samin
 - c. Sub Sistem Drainase Jlantah
 - d. Sub Sistem Drainase Gadingan
3. Wilayah Sistem Drainase Selatan, terdiri dari 1 sub system yaitu Sub Sistem Drainase Dengkeng

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sukoharjo drainase Kawasan perkotaan Kabupaten Sukoharjo meliputi Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kartasura, dan Kecamatan Grogol.

- a. Kecamatan Sukoharjo;

Wilayah kegiatan penanganan drainase di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari berdasarkan Laporan Perencanaan Masterplan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, inventori untuk

saluran adalah sebagai berikut Kecamatan Sukoharjo, meliputi Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Joho dan Kelurahan Bulakrejo dan Kecamatan Bendosari meliputi Kelurahan Jombor dan Kelurahan Sidorejo. Sistem Drainase di wilayah kegiatan Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari masuk dalam Sub Sistem Drainase Sungai Samin. Sistem drainase tersebut dibagi dalam 4 zona drainase (Gambar 2.9) yang terdiri dari Zona 1 (Jalan Sudirman); Zona 2 (Jalan Veteran); Zona 3 (Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jaksa Agung dan Zona 4 (Jalan Samanhudi).



Gambar 2. 23

Pembagian Zona Drainase Wilayah Kecamatan Sukoharjo Dan Bendosari

Sumber: Laporan Perencanaan Master Plan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

b. Kecamatan Kartasura

Berdasarkan laporan Perencanaan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, Drainase Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo merupakan Sub Sistem Drainase Baki, Sub Sistem Drainase Samin, dan Sub Sistem Drainase Pepe.

c. Kecamatan Grogol.

Berdasarkan laporan Perencanaan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, Drainase Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo merupakan Sub Sistem Drainase Baki, Sub Sistem Drainase Samin, dan Sub Sistem Drainase Pepe.

a. Kecamatan Sukoharjo

1. Zona 1

Kondisi dan permasalahan sistem drainase di wilayah kegiatan untuk Zona 1 (Jalan Sudirman) berdasarkan Laporan Perencanaan Master Plan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, saluran drainase

Jalan Sudirman sebagai saluran primer (saluran sebelah kanan) terjadi banjir/genangan, hal ini adanya pemasukan air dari kawasan pemukiman, lahan sawah, pintu sadap colo timur dan pengambilan colo timur dengan permasalahan saluran drainase tidak cukup menampung air. Saluran primer drainase Jalan Jenderal Sudirman (saluran sebelah kiri) tidak terjadi genangan, dan yang terjadi genangan adalah saluran sekunder yang masuk ke saluran primer sebelah kiri Jalan Jenderal Sudirman meliputi Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo, Dukuh Dompilan, Jalan Kyai Mawardi, dukuh Calen 02, hal ini karena kapasitas tampungan terbatas dan saluran drainase rusak.

2. Zona 2

Kondisi dan permasalahan sistem drainase di wilayah kegiatan untuk Zona 2 (Jalan Veteran) berdasarkan Laporan Perencanaan Master Plan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, saluran drainase Jalan Veteran sebagai saluran sekunder terjadi banjir/genangan, hal ini adanya pemasukan air dari kawasan pemukiman dan lahan sawah, saluran dari alun-alun dan Jalan Slamet Riyadi dengan permasalahan saluran drainase tidak cukup menampung air, daerahnya rendah, dan saluran rusak. Dan terjadi genangan pada saluran tersier meliputi Jalan Kantil, Dukuh Pandean, Jalan Mawar, dan Jalan Wijaya Kusuma, hal ini karena kapasitas tampungan terbatas dan saluran drainase rusak.

3. Zona 3

Kondisi dan permasalahan sistem drainase di wilayah kegiatan untuk Zona 3 (Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jaksa Agung) berdasarkan Laporan Perencanaan Master Plan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, saluran drainase Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jaksa Agung sebagai saluran sekunder, pemasukan air dari kawasan. Dan terjadi genangan pada saluran sekunder meliputi Jalan Prof. Dr. Supomo, Jalan M. Sunaryo, dan Jalan Lettu Ismail, hal ini karena kapasitas tampungan terbatas dan saluran drainase rusak kecil-kecil.

4. Zona 4

Kondisi dan permasalahan sistem drainase di wilayah kegiatan untuk Zona 4 (Jalan Samanhudi) berdasarkan Laporan Perencanaan Master Plan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, saluran drainase Jalan Samanhudi sebagai saluran sekunder terjadi banjir / genangan, hal ini adanya pemasukan air dari kawasan pemukiman, lahan sawah, dan Kawasan industri Sritex dengan permasalahan saluran drainase tidak

cukup menampung air. Kemudian yang terjadi genangan adalah saluran sekunder yang masuk ke saluran Jalan Samanhudi meliputi Jalan Diponegoro, Jalan Rajawali, sedangkan saluran tersier meliputi dukuh Seliran, dukuh tegalrejo dan Jetis Kawasan industri Sritex, hal ini karena kapasitas tampungan terbatas karena sedimentasi.

b. Kecamatan Kartasura

Berdasarkan Laporan Perencanaan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, terdapat beberapa titik lokasi yang akan cepat sekali tergenang air dengan volume yang cukup tinggi, adapun titik-titik lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jalan Songgorunggi – Malangsari, Kecamatan Nguter

Sudah ditangani dalam beberapa tahun baik dengan pemeliharaan ataupun dengan peningkatan jalan. Penanganan pada ruas jalan dan bangunan pelengkapanya (saluran) dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk normalisasi dan pembesihan saluran serta oleh Bidang Bina Marga DPU Sukoharjo dalam bentuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Pada Tahun anggaran 2015 sudah dilaksanakan rehabilitasi ruas Jalan Songgorunggi–Malangsari dengan dana sebesar 4 Milyar rupiah.

2. Jalan Kompleks Sritex, termasuk depan kantor DPRD Sukoharjo, Jalan Rajawali, dan Rumah Dinas Bupati, Kecamatan Sukoharjo

Jalan pada kompleks PT. Sritex sudah mendapatkan penanganan dengan pembangunan saluran dari pasangan batu kali namun demikian fungsinya masih belum bisa optimal karena selalu dipenuhi dengan lumpur, area di depan Kantor DPRD Sukoharjo (Jalan Veteran) sudah dilakukan normalisasi saluran drainase yang ada pada tahun 2014, sedangkan terjadinya genangan/banjir di dalam Kota Sukoharjo (Rumah Dinas Bupati Sukoharjo) dan area lain tersebut di atas salah satu cara penanganannya adalah dengan melakukan kegiatan Normalisasi Kali Langsur.

3. Jalan Telukan–Cluringan (depan Pasar Telukan Sukoharjo),

Jalan Telukan–Cluringan (ruas Jalan Surakarta–Sukoharjo) merupakan ruas jalan provinsi. Pada Tahun 2014 yang lalu sudah dilakukan penanganan terhadap saluran drainase yang ada, selanjutnya pada Tahun 2015 sudah dilanjutkan pembangunan saluran drainase Telukan–Cluringan, Kecamatan Grogol dengan anggaran fisik sebesar

Rp3.525.000.000,00 sehingga kawasan ini dapat segera terbebas dari genangan banjir.

4. Jalan Kompleks Solo Baru dan Langenharjo, Kecamatan Grogol,
Banjir yang sering terjadi di kawasan Solo baru utamanya pada ruas Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo akan segera ditangani dengan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase; Trotoar; dan Taman Jalan Ir. Soekarno, Solo Baru pada tahun 2014 yang lalu dan dilanjutkan pada tahun 2015 dengan ruas yang ditangani adalah saluran drainase di sepanjang segmen Polsek Grogol–Patung Pandawa–Jembatan Bacem dengan total dana Rp9.355.000.000,00
5. Jalan Kawasan Palur, Kecamatan Mojolaban (Area Luwes),
Banjir yang terjadi relatif sudah berkurang.
6. Kawasan Tawangsari,
Sudah ditangani dalam beberapa tahun ini.
7. Daerah Karangmojo, Kecamatan Weru,
Pada tahun 2015 sudah dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Saluran Pembuang Karangmojo, Kecamatan Weru oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan anggaran senilai total 1 Milyar rupiah.

c. Kecamatan Grogol

Dari hasil survei inventarisasi jaringan drainase dan permasalahan dilapangan dalam Laporan Perencanaan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, permasalahan-permasalahan masing-masing Desa disebutkan sebagai berikut :

1. Desa Madegondo
 - a. Terjadinya penyempitan saluran Drainase dimana lebar disebelah hulu ± 5 m, menyempit menjadi ± 2 m sebelum Jalan Ir. Soekarno. Di Jalan Ir. Soekarno di depan Toyota, ada pipa PDAM yang melintang di badan gorong-gorong, sehingga aliran air terhambat oleh tumpukan sampah yang tersangkut pada pipa PDAM. Setelah melewati Jalan Ir. Soekarno tepatnya di Jalan Diponegoro saluran menyempit menjadi ± 1 m. Akibat kondisi tersebut daerah Kawasan Dukuh Soka dan badan Jalan Ir. Soekarno mengalami genangan.
 - b. Terjadinya banjir di dusun Kaliwingko yang diakibatkan aliran air dari sungai Kaliwingko yang melimpas, ditambah lagi dari limpasan air dari saluran drainase yang mengarah ke utara menuju sungai Kaliwingko

(sejajar dengan Jalan Brigjen Sudiarto). Disamping limpasan dari Sungai Kaliwingko dan saluran drainase yang menuju Sungai Kaliwingko, banjir disebabkan karena aliran air saluran drainase Kawasan yg menuju Sungai Kaliwingko tidak bisa masuk karena ketinggian muka air banjir Sungai Kaliwingko yang cukup tinggi.

- c. Ada genangan di kompleks (sebelah barat masjid Baitul Makmur), disebabkan adanya pendangkalan saluran di belakang masjid Baitul Makmur. Saluran tersebut terletak di bawah bangunan-bangunan rumah sehingga kesulitan dalam perawatan, terutama dari sedimentasi.

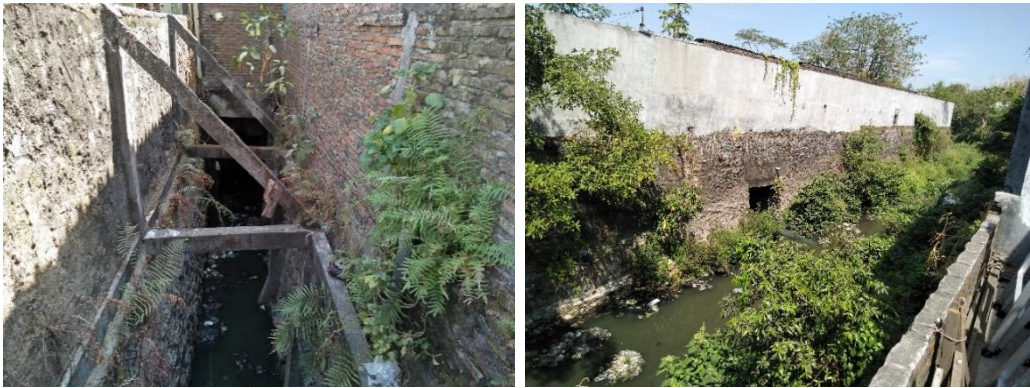
2. Desa Langenharjo

- a. Terjadinya banjir di perumahan yang ada dibelakang Hotel Brothers terjadi karena air yang mengalir dari barat ke timur yang melalui saluran yang berada pada Jalan Kanguru 1 (menuju jembatan bacem) meluap, dimana posisi dari perumahan tersebut lebih rendah dari jalan, begitu juga jika Sungai Bengawan Solo sedang banjir (tinggi MAB nya) jadi air yang mengalir dari barat menuju Sungai Bengawan Solo tidak bisa masuk ke badan sungai.
- b. Banjir di bundaran Pandawa terjadi karena debit air dari barat yang menuju kearah timur (bengawan solo) melalui saluran di Jalan Kanguru 1 sangat tinggi dan drainase yang ada kurang dapat mampu menampung air yang melintas dan saat Bengawan Solo sedang meluap air tidak mampu mengalir dan kembali.
- c. Semua air dari kedua Kawasan di atas bermuara di pintu air Bacem, yang Cuma 1 pintu dengan dimensi $b=2,4$ m dan $h=2,4$ m. Pada saat Sungai Bengawan Solo banjir pintu air ditutup sehingga air di kedua Kawasan diatas tidak bias masuk ke Sungai Bengawan Solo.
- d. Penyempitan dan pendangkalan alur sungai kali Pepe.
- e. Aliran air yang ada di Desa Langenharjo hampir tiap saluran mengalir ke sungai Pepe, sementara sungai Pepe sudah membawa air dari Kecamatan Baki sehingga debit air yang menuju sungai Pepe sangat besar dan mengalir ke pintu air yang berada di sebelah selatan Desa Langenharjo. Di lokasi tersebut sudah terdapat pompa air dengan kapasitas sebesar 1.000lt/detik. Pada saat debit besar pompa tersebut dimatikan karena dianggap tidak mampu memompa air yang menggenangi Desa Langenharjo.

- f. Banjir di Jalan Dlopo (mulai depan RS. Dr. Oen, RS Indriyati dan depan Kantor Kelurahan Langenharjo) terjadi karena derasnya air yang mengalir dari Kecamatan Baki menuju ke arah timur mengakibatkan saluran yang ada tidak mampu menampung air yang mengalir. Awalnya saluran yang berada di sepanjang jalan Baki-Langenharjo adalah saluran irigasi, sesuai konsepnya maka semakin ke hilir dimensi saluran semakin mengecil karena adanya pengambilan di setiap pintu sadap. Sekarang saluran tersebut berfungsi juga sebagai saluran drainase yang secara konsep semakin ke hilir dimensi saluran harus semakin besar.
 - g. Gorong-gorong di RW 3 Desa Langenharjo lebar kecil sehingga tidak mampu menampung debit air pada saat banjir.
3. Desa Kwarasan
- a. Di Dusun Ngasinan yang berbatasan langsung dengan kota Surakarta, di bagian wilayah Surakarta sudah dibuat tanggul yang lebih tinggi dari yang ada di Dusun Ngasinan, dan adanya pompa air di Surakarta yang arah pembuangannya langsung ke sungai yang berbatasan langsung dengan Dukuh Ngasinan. Dukuh ngasinan merupakan daerah cekungan.
 - b. Dusun Tanjunganom tidak mempunyai saluran pengeluaran yang cukup untuk menampung air ketika hujan, karena saluran keluarnya sangat kecil sehingga mengakibatkan terjadinya genangan dahulu untuk beberapa saat.
 - c. Terjadinya pendangkalan sungai Desa yang diakibatkan mengendapnya sedimensedimen.
4. Desa Gedangan
- a. Saluran yang berada di dekat GOR Pandawa merupakan titik pertemuan beberapa saluran sebelum diteruskan meneju ke timur ke arah patung pandawa, debit air yang akan keluar sangat besar sedangkan saluran menuju keluarnya sangat kecil.
 - b. Banyak saluran disekitar permukiman warga tidak pernah dibersihkan sehingga menyebabkan saluran-saluran itu tersumbat dan tidak berfungsi sebagai mana mestinya.
5. Desa Grogol
- a. Terjadinya banjir yang ada di Desa Grogol diakibatkan karena derasnya air yang mengalir dari Solo baru ke arah timur, tidak terdapatnya saluran air yang ada di jalan Brigjen Sudiarto mengakibatkan air dari

Solo Baru tidak dapat mengalir ke utara dan selatan, disebabkan saluran drainase yang sejajar dengan Jalan Brigjen Sudiarto dimensinya kecil. Akibatnya air melimpas dan mengalir menuju Kawasan Desa Grogol.

- b. Sedimentasi dan penyempitan di alur Sungai Mati, dimana Sungai Mati masih berfungsi sebagai badan air yang menerima air dari saluran-saluran yang ada di Desa Grogol.
- c. Kawasan perumahan yang terletak sebelum pertemuan Sungai Mati dengan Sungai Kaliwingko pada musim hujan mengalami genangan. Genangan disebabkan debit air di Sungai Kaliwingko yang masuk ke Sungai Jenis pada musim hujan harus dipompa, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menuntaskan debit air Sungai Kaliwingko.



Gambar 2. 24

saluran drainase yang sejajar dengan Jalan Brigjen Sudiarto

Sumber: Laporan Perencanaan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Grogol Kabupaten Sukoharjo, 2018

6. Desa Kadokan

- a. Adanya TPS yang berada pada pinggir sungai yang berbatasan dengan Desa Grogol mengakibatkan hampir setengah lebar sungai tertutup oleh sampah.
- b. Sebagian besar saluran drainase di Desa Kadokan bermuara di Sungai Mati, pada saat air Sungai Mati debitnya tinggi air dari Kawasan pemukiman tidak bisa masuk ke Sungai Mati. Alur Sungai Mati bertemu dengan Sungai Kaliwingko, dan selanjutnya bertemu dengan Sungai Jenis. Pembuangan debit air dari Sungai Kaliwingko ke Sungai Jenis memakai pintu air dan pompa air.

7. Desa Telukan

- a. Banjir di Desa Telukan yang ada pada perumahan guru diakibatkan karena saluran yang ada dikawasan perumahan tidak belum

tersambung dengan saluran drainase di tepi jalan utama sehingga pada musim hujan terjadi genangan.

- b. Terjadinya banjir di Desa Telukan terdapat pada satu dusun yang berada pada tengah tengah Kali Langsur dan saluran pembuang yang menuju langsung ke Kali Samin. Saat Kali Samin banjir dengan debit besar aliran air dari Kali Langsur dan saluran tersebut tidak mampu masuk ke Kali Samin sehingga mengakibatkan areal tersebut tergenang air mencapai 2 m dan baru surut 1-2 hari.
- c. Banjir Jalan Telukan - Cluringan (depan Pasar Telukan Sukoharjo), disebabkan karena sedimentasi pada saluran yang berada pada ruas jalan tersebut.

8. Desa Cemani

- a. Daerah bantaran sungai tepatnya di Jalan Pinang yang berbatasan langsung dengan kota Surakarta sering mengalami genangan setiap hujan, dikarenakan air Sungai Jenis pada saat banjir melimpas ke pemukiman.
- b. Banyaknya saluran yang sudah ditutup oleh masyarakat sehingga perawatannya menjadi sangat sulit dan banyak menumpuknya sedimen-sedimen di gorong-gorongnya sehingga mengakibatkan salurannya menjadi tidak lancar.

9. Desa Sanggrahan

- a. Banyaknya saluran yang mampet di sekitar permukiman warga, kapasitas saluran dirasa masih kurang saat musim hujan, sehingga mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa titik.
- b. Alur sungai Ngece dan Pleret mengalami sedimentasi, sehingga kapasitas sungai menjadi berkurang. Akibatnya daerah di sekitar kawasan bantaran Sungai Ngece dan Pleret terdapat lokasi permukiman yang pasti tergenang pada saat hujan deras, karena limpasan air sungai.

10. Desa Pondok

Hampir semua saluran drainase di Kawasan Desa Pondok membuang air ke Sungai Pepe sehingga saat kapasitas Sungai Pepe besar maka air dari Kawasan Desa Pondok tidak bias masuk ke Sungai Pepe, yang mengakibatkan terjadinya genangan di sekitar alur Sungai Pepe.

11. Desa Pandeyan

Kawasan permukiman di Desa Pandemulyo yang berada di sekitar bekas alur Sungai Bengawan Solo yang disebut juga sungai mati pada musim

hujan tergenang air. Walaupun sungai tersebut fungsinya sudah berkurang, tetapi sungai tersebut tiap musim hujan masih menampung air dan masih memiliki hilir yang masuk ke Sungai Samin.

12. Desa Parangrojo

Meluapnya Sungai Langsur mengakibatkan sebagian perumahan yang ada di tepi sungai tergenang oleh luapan air tersebut. Sungai Langsur meluap disebabkan pada Kawasan tersebut tidak ada bangunan tanggul. Debit air yang masuk ke Sungai Langsur dari arah Sukoharjo Kota tiap tahunnya mengalami peningkatan dan mengakibatkan air yang mengalir menuju hilir debitnya besar.

13. Desa Banaran

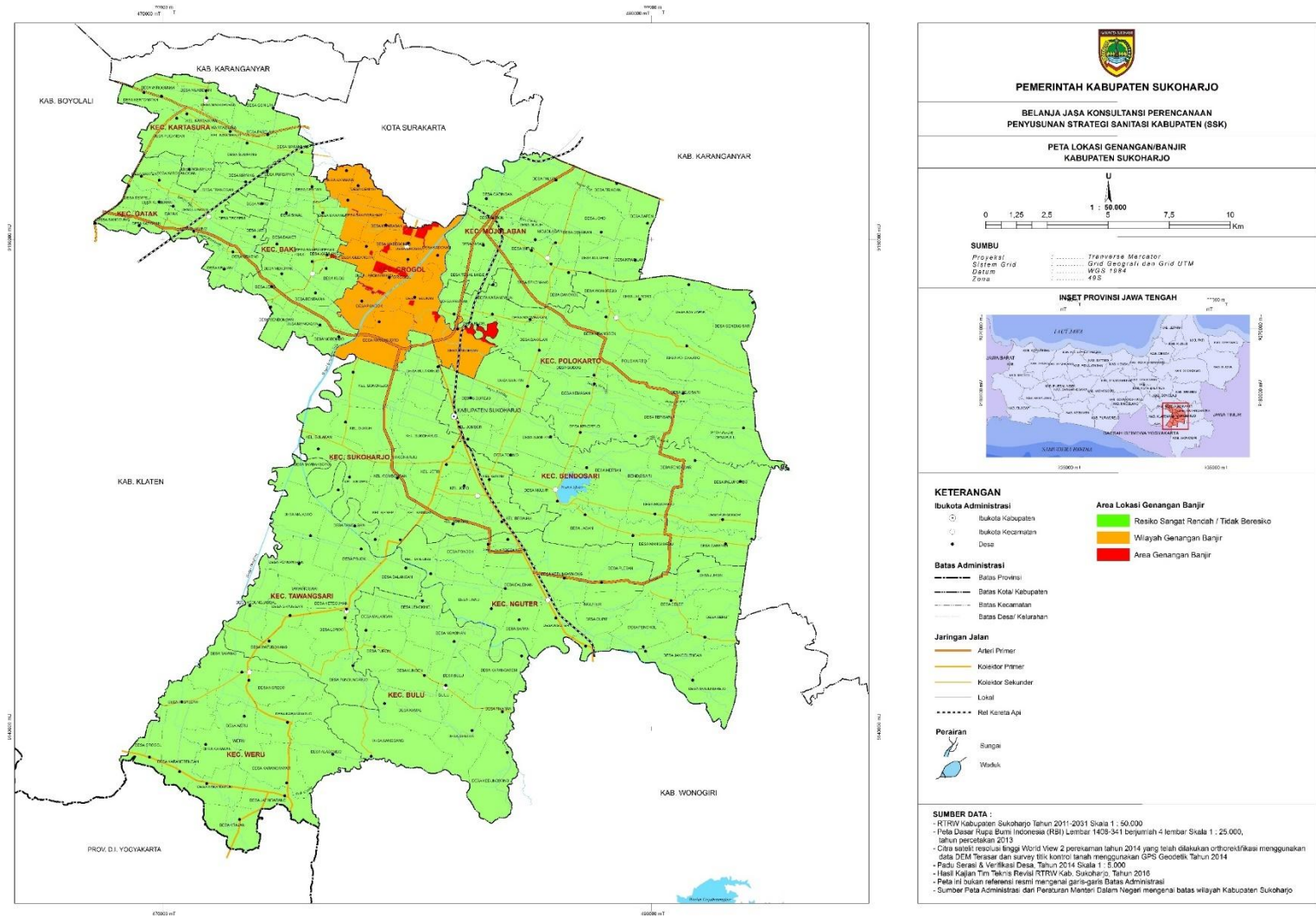
Di beberapa daerah di daerah utara Desa Banaran yang berbatasan dengan Kota Surakarta yang berada di bibir Sungai Jenis terjadi genangan, dengan ketinggian sampai setinggi orang dewasa. Hal ini juga terjadi karena penyempitan sungai dan tidak adanya tanggul.

Tabel II. 43

Lokasi Genangan dan Banjir Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Genangan	Luas Genangan (Ha ²)
1	Kecamatan Grogol	Desa Banaran	Genangan	0.609
2	Kecamatan Grogol	Desa Cemani	Genangan	1.833
3	Kecamatan Grogol	Desa Gedangan	Genangan	2.103
4	Kecamatan Grogol	Desa Grogol	Genangan	20.965
5	Kecamatan Grogol	Desa Kadokan	Genangan	9.270
6	Kecamatan Grogol	Desa Kwarasan	Genangan	3.220
7	Kecamatan Grogol	Desa Langenharjo	Genangan	47.966
8	Kecamatan Grogol	Desa Madegondo	Genangan	20.678
9	Kecamatan Grogol	Desa Pandeyan	Genangan	52.186
10	Kecamatan Grogol	Desa Parangjoro	Genangan	0.794
11	Kecamatan Grogol	Desa Pondok	Genangan	4.432
12	Kecamatan Grogol	Desa Sanggrahan	Genangan	1.663
13	Kecamatan Grogol	Desa Telukan	Genangan	12.185

Sumber: Laporan Perencanaan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Grogol Kabupaten Sukoharjo, 2018



Gambar 2. 25
Peta lokasi genangan
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

2.2.3.1. Sistem dan Infrastruktur

Berdasarkan Laporan Perencanaan Master Plan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, Laporan Perencanaan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dan Laporan Perencanaan Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, kondisi eksisting drainase yang ada di Kabupaten Sukoharjo mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan yang biasa di Kabupaten Sukoharjo yaitu banyaknya sampah yang ada di drainase serta tingga sedimen yang menumpuk. Oleh karena itu saluran drainase di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan pembersihan dan normalisasi saluran. Berikut kondisi saluran drainase yang ada di Jalan Prof. Dr. Supomo.



Gambar 2. 26

Drainase Jalan Prof. Dr. Supomo Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo
Sumber: Perencanaan Master Plan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo, 2017

Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana drainase lingkungan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II. 44
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	Sistem Drainase Kecamatan Sukoharjo							
	a. Sub Sistem Jalan Perum Kopri	m						
	- Jalan Perum Kopri	m	Segi empat	0,4	0,5	Baik		
	- Jalan Perum Kopri	m	Trapesium	0,2	0,2	Baik		
	- Jalan Perum Kopri	m	Segi empat	0,35	0,3	Baik		
	- Jalan Perum Kopri	m	Segi empat	0,3	0,38	Baik		
	- Jalan Perum Kopri	m	Segi empat	0,4	0,6	Baik		
	- Jalan Perum Kopri	m	Segi empat	0,35	0,4	Baik		
	b. Sub Sistem Jalan KH Agus Salim	m						
	- Jalan KH Agus Salim	m	Segi empat	0,7	0,8	Rusak		
	- Jalan KH Agus Salim	m	Segi empat	0,2	0,16	Baik		
	- Jalan KH Agus Salim	m	Segi empat	0,64	0,67	Baik		
	- Jalan KH Agus Salim	m	Segi empat	0,5	0,55	Baik		
	- Jalan KH Agus Salim	m	Trapesium	0,6	0,93	Baik		
	- Jalan KH Agus Salim	m	Segi empat	0,49	0,39	Baik		
	c. Sub Sistem Jalan Sidomukti	m						
	- Jalan Sidomukti	m	Segi empat	0,35	0,67	Baik		
	- Jalan Sidomukti	m	Segi empat	0,4	0,04	Baik		
	- Jalan Sidomukti	m	Segi empat	0,4	0,38	Baik		
	- Jalan Sidomukti	m	Segi empat	0,37	0,5	Baik		
	- Jalan Sidomukti	m	Segi empat	0,49	0,54	Baik		
	- Jalan Sidomukti	m	Segi empat	0,4	0,45	Baik		
	d. Sub Sistem Jalan Sidoluhur	m						

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Sidoluhur	m	Segi empat	0,39	0,4	Baik		
	- Jalan Sidoluhur	m	Segi empat	0,4	0,35	Baik		
	- Jalan Sidoluhur	m	Segi empat	0,4	0,5	Baik		
	- Jalan Sidoluhur	m	Segi empat	0,4	0,4	Baik		
	- Jalan Sidoluhur	m	Segi empat	1,3	0,55	Baik		
	- Jalan Sidoluhur	m	Segi empat	0,5	0,78	Baik		
	e. Sub Sistem Jalan Sidomulyo	m						
	- Jalan Sidomulyo	m	Segi empat	0,28	0,45	Baik		
	- Jalan Sidomulyo	m	Segi empat	0,42	0,45	Baik		
	- Jalan Sidomulyo	m	Segi empat	0,22	0,2	Baik		
	- Jalan Sidomulyo	m	Segi empat	0,28	0,3	Baik		
	- Jalan Sidomulyo	m	Segi empat	0,28	0,48	Baik		
	- Jalan Sidomulyo	m	Segi empat	0,27	0,25	Baik		
	f. Sub Sistem Jalan Suwarno Honggopat	m						
	- Jalan Suwarno Honggopat	m	Segi empat	0,45	0,54	Baik		
	- Jalan Suwarno Honggopat	m	Segi empat	0,4	0,55	Baik		
	- Jalan Suwarno Honggopat	m	Segi empat	0,45	0,5	Baik		
	- Jalan Suwarno Honggopat	m	Segi empat	0,4	0,55	Baik		
	- Jalan Suwarno Honggopat	m	Segi empat	0,25	0,3	Baik		
	- Jalan Suwarno Honggopat	m	Segi empat	0,47	0,7	Baik		
	g. Sub Sistem Jalan Durian	m						
	- Jalan Durian	m	Segi empat	0,6	0,67	Baik		
	- Jalan Durian	m	Segi empat	0,6	0,6	Baik		
	- Jalan Durian	m	Segi empat	0,65	0,42	Baik		
	- Jalan Durian	m	Segi empat	0,48	0,5	Baik		
	- Jalan Durian	m	Segi empat	0,47	0,5	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Durian	m	Segi empat	0,53	0,48	Baik		
	h. Sub Sistem Jalan Nangka	m						
	- Jalan Nangka	m	Segi empat	0,43	0,65	Baik		
	- Jalan Nangka	m	Segi empat	0,45	0,6	Baik		
	- Jalan Nangka	m	Segi empat	0,47	0,54	Baik		
	- Jalan Nangka	m	Segi empat	0,55	0,3	Baik		
	- Jalan Nangka	m	Segi empat	0,77	0,6	Baik		
	- Jalan Nangka	m	Segi empat	0,6	0,48	Baik		
	i. Sub Sistem Jalan Dr. Muwardi	m						
	- Jalan Dr. Muwardi	m	Segi empat	1,8	0,3	Baik		
	- Jalan Dr. Muwardi	m	Segi empat	1,6	0,9	Baik		
	j. Sub Sistem Jalan Lumba-Lumba	m						
	- Jalan Lumba-Lumba	m	Segi empat	0,46	0,35	Baik		
	- Jalan Lumba-Lumba	m	Segi empat	0,4	0,5	Baik		
	- Jalan Lumba-Lumba	m	Segi empat	0,42	0,6	Baik		
	- Jalan Lumba-Lumba	m	Segi empat	0,4	0,5	Baik		
	- Jalan Lumba-Lumba	m	Segi empat	0,6	0,7	Baik		
	- Jalan Lumba-Lumba	m	Segi empat	0,5	0,6	Baik		
	k. Sub Sistem Jalan Mujair	m						
	- Jalan Mujair	m	Segi empat	0,35	0,4	Baik		
	- Jalan Mujair	m	Segi empat	0,53	0,65	Baik		
	- Jalan Mujair	m	Segi empat	0,3	0,8	Baik		
	- Jalan Mujair	m	Segi empat	0,55	0,65	Baik		
	- Jalan Mujair	m	Segi empat	0,3	0,35	Baik		
	- Jalan Mujair	m	Segi empat	0,55	0,55	Baik		
	l. Sub Sistem Jalan Sadewo	m						

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Sadewo	m	Segi empat	0,56	0,35	Rusak		
	- Jalan Sadewo	m	Segi empat	0,55	0,37	Baik		
	- Jalan Sadewo	m	Segi empat	0,38	0,5	Baik		
	- Jalan Sadewo	m	Segi empat	0,25	0,5	Baik		
	- Jalan Sadewo	m	Segi empat	0,3	0,2	Baik		
	- Jalan Sadewo	m	Segi empat	0,3	0,55	Baik		
	m. Sub Sistem Jalan Serang	m						
	- Jalan Serang	m	Segi empat	0,5	0,4	Baik		
	- Jalan Serang	m	Segi empat	0,5	0,5	Baik		
	- Jalan Serang	m	Segi empat	0,7	0,45	Baik		
	- Jalan Serang	m	Segi empat	0,5	0,45	Baik		
	- Jalan Serang	m	Segi empat	0,65	0,6	Baik		
	- Jalan Serang	m	Segi empat	0,35	0,5	Baik		
	n. Sub Sistem Jalan Kresno	m						
	- Jalan Kresno	m	Segi empat	0,45	0,25	Baik		
	- Jalan Kresno	m	Segi empat	0,45	0,5	Baik		
	- Jalan Kresno	m	Segi empat	0,38	0,65	Baik		
	- Jalan Kresno	m	Segi empat	0,35	0,75	Baik		
	- Jalan Kresno	m	Segi empat	0,45	0,5	Baik		
	- Jalan Kresno	m	Segi empat	0,5	0,75	Baik		
	o. Sub Sistem Jalan Nakulo	m						
	- Jalan Nakulo	m	Segi empat	0,45	0,5	Baik		
	- Jalan Nakulo	m	Segi empat	0,5	0,7	Baik		
	- Jalan Nakulo	m	Segi empat	0,4	0,5	Baik		
	- Jalan Nakulo	m	Segi empat	0,37	0,7	Baik		
	- Jalan Nakulo	m	Segi empat	0,55	0,55	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Nakulo	m	Segi empat	0,5	0,55	Baik		
	q. Sub Sistem Jalan Jetis	m						
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,7	0,3	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Segi empat	0,5	0,8	Baik		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,16	0,3	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Segi empat	0,45	0,43	Baik		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	1,38	0,35	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,4	0,74	Baik		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,9	0,67	Baik		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,6	0,3	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Segi empat	0,9	0,85	Baik		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,5	0,77	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,3	0,27	Baik		
	- Jalan Jetis	m	Segi empat	0,5	0,56	Baik		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,35	0,55	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,5	0,4	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,75	0,55	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,75	0,64	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,5	0,55	Rusak		
	- Jalan Jetis	m	Trapesium	0,6	0,41	Rusak		
	r. Sub Sistem Jalan Dukuh Seliran	m						
	- Jalan Dukuh Seliran	m	Trapesium	0,28	0,75	Sedang		
	- Jalan Dukuh Seliran	m	Trapesium	0,47	0,44	Baik		
	- Jalan Dukuh Seliran	m	Trapesium	0,23	0,27	Rusak		
	- Jalan Dukuh Seliran	m	Trapesium	0,1	0,39	Rusak		
	- Jalan Dukuh Seliran	m	Trapesium	0,25	0,43	Sedang		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Dukuh Seliran	m	Segi empat	0,35	0,35	Baik		
	s. Sub Sistem Jalan Tegalrejo	m						
	- Jalan Tegalrejo	m	Trapesium	0,26	0,51	Baik		
	- Jalan Tegalrejo	m	Trapesium	0,25	0,36	Baik		
	- Jalan Tegalrejo	m	Segi empat	0,3	0,56	Baik		
	- Jalan Tegalrejo	m	Trapesium	0,25	0,57	Rusak		
	- Jalan Tegalrejo	m	Trapesium	0,5	0,45	Baik		
	- Jalan Tegalrejo	m	Trapesium	0,3	0,69	Baik		
	t. Sub Sistem Jalan Kantil	m						
	- Jalan Kantil	m	Segi empat	0,28	0,29	Baik		
	- Jalan Kantil	m	Segi empat	0,28	0,36	Baik		
	- Jalan Kantil	m	Trapesium	0,15	0,27	Rusak		
	- Jalan Kantil	m	Segi empat	0,2	0,38	Rusak		
	- Jalan Kantil	m	Segi empat	0,25	0,2	Rusak		
	- Jalan Kantil	m	Trapesium	0,25	0,45	Baik		
	u. Sub Sistem Jalan Dukuh Pandean	m						
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,3	0,45	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,45	0,35	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,35	0,59	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,3	0,32	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,45	0,66	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,5	0,72	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,5	0,35	Sedang		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,2	0,18	Rusak		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,4	0,57	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,4	0,38	Rusak		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,3	0,54	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,15	0,28	Baik		
	v. Sub Sistem Jalan Mawar	m						
	- Jalan Mawar	m	Segi empat	0,5	0,29	Sedang		
	- Jalan Mawar	m	Trapesium	0,4	0,26	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Segi empat	0,76	0,41	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Segi empat	0,78	0,86	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Segi empat	0,59	0,5	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Segi empat	0,63	0,55	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Segi empat	0,37	0,2	Rusak		
	- Jalan Mawar	m	Segi empat	0,6	0,6	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Trapesium	0,3	0,48	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Trapesium	0,55	0,5	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Segi empat	0,3	0,45	Baik		
	- Jalan Mawar	m	Trapesium	0,4	0,7	Baik		
	w. Sub Sistem Jalan Dukuh Pandean	m						
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,3	0,52	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,4	0,23	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,37	0,31	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Segi empat	0,23	0,37	Sedang		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,3	0,44	Baik		
	- Jalan Dukuh Pandean	m	Trapesium	0,35	0,36	Sedang		
	x. Sub Sistem Jalan Wijaya Kusuma	m						
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,5	0,52	Baik		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,5	0,28	Rusak		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Trapesium	0,4	0,48	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,5	0,45	Baik		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,5	0,55	Baik		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,6	0,65	Baik		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,86	0,26	Rusak		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,38	0,31	Baik		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,56	0,33	Baik		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Trapeسيوم	0,38	0,57	Baik		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	0,6	0,9	Baik		
	- Jalan Wijaya Kusuma	m	Segi empat	1,6	0,73	Rusak		
	y. Sub Sistem Jalan Cempaka							
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,6	0,6	Baik		
	- Jalan Cempaka	m	Trapeسيوم	0,45	0,66	Baik		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,53	0,26	Sedang		
	- Jalan Cempaka	m	Trapeسيوم	0,36	0,5	Baik		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,6	0,5	Sedang		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,43	0,35	Baik		
	z. Sub Sistem Jalan Cempaka	m						
	- Jalan Cempaka	m	Trapeسيوم	0,55	0,65	Baik		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,43	0,2	Rusak Sedang		
	- Jalan Cempaka	m	Trapeسيوم	0,55	0,55	Baik		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,6	0,4	Baik		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,36	0,4	Rusak		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,64	0,35	Baik		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,4	0,17	Rusak Sedang		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,3	0,35	Baik		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,4	0,23	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,2	0,2	Rusak		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,43	0,25	Rusak		
	- Jalan Cempaka	m	Segi empat	0,38	0,35	Baik		
	aa. Sub Sistem Jalan Nuri	m						
	- Jalan Nuri	m	Segi empat	0,35	0,36	Rusak Sedang		
	- Jalan Nuri	m	Segi empat	0,5	0,55	Baik		
	- Jalan Nuri	m	Segi empat	0,85	0,34	Baik		
	- Jalan Nuri	m	Segi empat	0,37	0,2	Baik		
	- Jalan Nuri	m	Segi empat	0,6	0,5	Baik		
	- Jalan Nuri	m	Segi empat	1	0,8	Baik		
	ab. Sub Sistem Jalan Diponegoro	m						
	- Jalan Diponegoro	m	Segi empat	0,65	0,6	Baik		
	- Jalan Diponegoro	m	Trapesium	0,75	0,8	Baik		
	- Jalan Diponegoro	m	Segi empat	0,3	0,61	Rusak		
	- Jalan Diponegoro	m	Segi empat	0,75	0,64	Baik		
	- Jalan Diponegoro	m	Segi empat	0,49	0,54	Baik		
	- Jalan Diponegoro	m	Segi empat	0,4	0,45	Baik		
	ac. Sub Sistem Jalan Agus Salim	m						
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,58	0,55	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,57	0,6	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,62	0,6	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,66	0,63	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,35	0,6	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,7	0,6	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,45	0,5	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,9	0,72	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,5	0,75	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Trapeسيوم	0,75	0,75	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Segi empat	0,55	0,38	Baik		
	- Jalan Agus Salim	m	Trapeسيوم	0,7	0,72	Baik		
	ad. Sub Sistem Jalan Rajawali	m						
	- Jalan Rajawali	m	Segi empat	0,92	0,85	Baik		
	- Jalan Rajawali	m	Segi empat	1,15	0,8	Baik		
	- Jalan Rajawali	m	Segi empat	1,1	0,5	Rusak		
	- Jalan Rajawali	m	Segi empat	0,7	0,4	Rusak		
	- Jalan Rajawali	m	Segi empat	1	0,8	Baik		
	- Jalan Rajawali	m	Trapeسيوم	1	1,05	Baik		
	ae. Sub Sistem Jalan Wonoyo Pranoto	m						
	- Jalan Wonoyo Pranoto	m	Segi empat	0,78	0,85	Baik		
	- Jalan Wonoyo Pranoto	m	Segi empat	0,5	0,6	Baik		
	- Jalan Wonoyo Pranoto	m	Trapeسيوم	0,6	1,02	Baik		
	- Jalan Wonoyo Pranoto	m	Segi empat	0,56	0,5	Baik		
	- Jalan Wonoyo Pranoto	m	Segi empat	0,3	0,3	Baik		
	- Jalan Wonoyo Pranoto	m	Segi empat	0,75	0,62	Baik		
	- Jalan Wonoyo Pranoto	m	Segi empat	0,9	0,95	Baik		
	- Jalan Wonoyo Pranoto	m	Trapeسيوم	1	0,9	Baik		
	af. Sub Sistem Jalan Carikan -Serenan	m						
	- Jalan Carikan -Serenan	m	Segi empat	1,1	1	Baik		
	- Jalan Carikan -Serenan	m	Segi empat	0,9	0,75	Baik		
	- Jalan Carikan -Serenan	m	Segi empat	1,3	1,3	Baik		
	- Jalan Carikan -Serenan	m	Trapeسيوم	1,6	1,35	Baik		
	- Jalan Carikan -Serenan	m	Segi empat	1,1	1,3	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Carikan -Serenan	m	Trapesium	1,5	1,2	Baik		
	ag. Sub Sistem Jalan Calen 1	m						
	- Jalan Calen 1	m	Segi empat	0,25	0,8	Baik		
	- Jalan Calen 1	m	Segi empat	0,7	1,1	Baik		
	- Jalan Calen 1	m	Segi empat	0,5	0,5	Baik		
	- Jalan Calen 1	m	Trapesium	0,27	0	Baik		
	ah. Sub Sistem Jalan Calen IV	m						
	- Jalan Calen IV	m	Trapesium	0,5	0,7	Baik		
	- Jalan Calen IV	m	Segi empat	0,7	0,7	Baik		
	- Jalan Calen IV	m	Segi empat	0,9	0,6	Baik		
	ai. Sub Sistem Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo	m						
	- Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo	m	Segi empat	1,2	0,6	Baik		
	- Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo	m	Segi empat	0,9	0,8	Baik		
	- Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo	m	Segi empat	1,2	0,6	Baik		
	- Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo	m	Segi empat	0,9	0,4	Baik		
	- Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo	m	Segi empat	1,2	0,6	Baik		
	- Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo	m	Segi empat	0,7	0,4	Baik		
	aj. Sub Sistem Jalan Kyai Mawardi	m						
	- Jalan Kyai Mawardi	m	Segi empat	0,6	0,9	Baik		
	- Jalan Kyai Mawardi	m	Segi empat	0,6	1,5	Baik		
	- Jalan Kyai Mawardi	m	Segi empat	0,6	0,9	Baik		
	- Jalan Kyai Mawardi	m	Segi empat	0,8	0,6	Baik		
	- Jalan Kyai Mawardi	m	Segi empat	0,6	0,9	Baik		
	- Jalan Kyai Mawardi	m	Segi empat	0,45	0,45	Baik		
	ak. Sub Sistem Jalan Dompilan 01 & 02	m						
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,26	0,5	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,25	0,25	Baik		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,35	0,2	Baik		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,2	0,2	Rusak		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,2	0,3	Baik		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,5	0,4	Baik		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,78	0,65	Baik		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,3	0,2	Baik		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Trapeسيوم	0,6	0,2	Rusak		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,27	0,17	Rusak		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Trapeسيوم	0,5	0,25	Rusak		
	- Jalan Dompilan 01 & 02	m	Segi empat	0,16	0,2	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 03 RW 01	m	Segi empat	0,36	0,4	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 03 RW 01	m	Segi empat	0,6	0,6	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 03 RW 01	m	Segi empat	0,42	0,39	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 03 RW 01	m	Segi empat	0,55	0,5	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 03 RW 01	m	Segi empat	0,39	0,56	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 03 RW 01	m	Segi empat	0,62	0,9	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 02 RW 01	m	Trapeسيوم	0,2	0,2	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 02 RW 01	m	Segi empat	0,52	0,49	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 02 RW 01	m	Segi empat	0,32	0,35	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 02 RW 01	m	Segi empat	0,45	0,5	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 02 RW 01	m	Segi empat	0,26	0,35	Baik		
	- Jalan Dompilan RT 02 RW 01	m	Segi empat	0,48	0,25	Baik		
	al. Sub Sistem Jalan Calen II	m						
	- Jalan Calen II	m	Trapeسيوم	0,15	0,45	Baik		
	- Jalan Calen II	m	Trapeسيوم	0,15	0,2	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Calen II	m	Segi empat	0,2	0,2	Baik		
	- Jalan Calen II	m	Trapesium	0,3	0,3	Baik		
	- Jalan Calen II	m	Trapesium	0,2	0,12	Baik		
	- Jalan Calen II	m	Trapesium	0,2	0,3	Rusak		
	am. Sub Sistem Jalan Calen III	m						
	- Jalan Calen III	m	Trapesium	0,15	0,1	Baik		
	- Jalan Calen III	m	Segi empat	0,9	0,77	Baik		
	- Jalan Calen III	m	Trapesium	0,5	0,26	Baik		
	- Jalan Calen III	m	Segi empat	0,55	0,55	Baik		
	- Jalan Calen III	m	Segi empat	0,3	0,3	Baik		
	- Jalan Calen III	m	Segi empat	0,26	0,3	Rusak		
	an. Sub Sistem Jalan Sumatra	m						
	- Jalan Sumatra	m	Segi empat	0,35	0,56	Baik		
	- Jalan Sumatra	m	Segi empat	0,4	0,38	Baik		
	- Jalan Sumatra	m	Segi empat	0,35	0,6	Baik		
	- Jalan Sumatra	m	Trapesium	0,2	0,6	Baik		
	- Jalan Sumatra	m	Trapesium	0,5	0,74	Baik		
	- Jalan Sumatra	m	Trapesium	0,2	1	Baik		
	ao. Sub Sistem Jalan Jawa	m						
	- Jalan Jawa	m	Segi empat	0,43	0,46	Baik		
	- Jalan Jawa	m	Segi empat	0,48	0,5	Baik		
	- Jalan Jawa	m	Segi empat	0,5	0,5	Baik		
	- Jalan Jawa	m	Segi empat	0,48	0,48	Baik		
	- Jalan Jawa	m	Segi empat	0,45	0,6	Baik		
	- Jalan Jawa	m	Segi empat	0,48	0,48	Baik		
	ap. Sub Sistem Jalan Kalimantan	m						

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Kalimantan	m	Segi empat	0,4	0,5	Baik		
	- Jalan Kalimantan	m	Segi empat	1,1	0,48	Baik		
	- Jalan Kalimantan	m	Segi empat	0,4	0,4	Baik		
	- Jalan Kalimantan	m	Segi empat	1,4	0,5	Baik		
	- Jalan Kalimantan	m	Segi empat	0,8	0,65	Baik		
	- Jalan Kalimantan	m	Segi empat	1,5	0,7	Baik		
	aq. Sub Sistem Jalan Prof. Dr. Supomo	m						
	- Jalan Prof. Dr. Supomo	m	Segi empat	0,3	0,25	Baik		
	- Jalan Prof. Dr. Supomo	m	Segi empat	0,38	0,2	Baik		
	- Jalan Prof. Dr. Supomo	m	Segi empat	0,5	0,6	Baik		
	- Jalan Prof. Dr. Supomo	m	Trapeسيوم	0,3	0,6	Baik		
	- Jalan Prof. Dr. Supomo	m	Segi empat	0,9	0,6	Baik		
	- Jalan Prof. Dr. Supomo	m	Trapeسيوم	0,6	0,4	Baik		
	ar. Sub Sistem Jalan M. Sunaryo	m						
	- Jalan M. Sunaryo	m	Segi empat	1	0,6	Baik		
	- Jalan M. Sunaryo	m	Trapeسيوم	0,6	1	Baik		
	- Jalan M. Sunaryo	m	Trapeسيوم	0,6	1	Baik		
	as. Sub Sistem Jalan Lettu Ismail	m						
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,4	0,4	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,4	0,5	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Trapeسيوم	0,5	1	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,46	0,7	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,6	0,6	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,45	0,7	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Trapeسيوم	0,2	0,5	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,45	0,6	Baik		

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (lebar)	H (kedalaman)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,2	0,3	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,3	0,3	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,4	0,56	Baik		
	- Jalan Lettu Ismail	m	Segi empat	0,4	0,7	Baik		
	at. Sub Sistem Jalan Jend. Sudirman	m						
	- Jalan Jend. Sudirman	m	Trapesium	3	2,5	Baik		
	- Jalan Jend. Sudirman	m	Segi empat	2	3	Baik		
	- Jalan Jend. Sudirman	m	Segi empat	2	3	Baik		
	au. Sub Sistem Jalan Slamet Riyadi	m						
	- Jalan Slamet Riyadi	m	Segi empat	1,9	3	Baik		
	- Jalan Slamet Riyadi	m	Segi empat	1,9	3	Baik		
	- Jalan Slamet Riyadi	m	Segi empat	2	3	Baik		
	- Jalan Slamet Riyadi	m	Trapesium	1,7	2,5	Baik		
	- Jalan Slamet Riyadi	m	Trapesium	2	3	Baik		
	- Jalan Slamet Riyadi	m	Segi empat	1,5	2	Baik		
	- Jalan Slamet Riyadi	m	Segi empat	1,5	2	Baik		
	- Jalan Slamet Riyadi	m	Segi empat	1	1,2	Baik		
	av. Sub Sistem Jalan Veteran	m						
	- Jalan Veteran	m	Segi empat	1	0,45	Baik		
	- Jalan Veteran	m	Segi empat	1,5	2	Baik		

Sumber: Perencanaan Master Plan Drainase Perkotaan Kabupaten Sukoharjo, 2017

2.2.3.2. Kelembagaan

Lembaga pengelola drainase lingkungan di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kepentingan dan fungsi masing masing dalam mengelola drainase lingkungan di Kabupaten Sukoharjo. Dinas yang menangani tentang drainase di Kabupaten Sukoharjo adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengetahui peran pemangku kepentingan dan peraturan pengelolaan drainase Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel II. 45.

Tabel II. 45
Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan

No	Fungsi	Pemangku Kepentingan		
		Pemerintah Daerah	Swasta	Masyarakat
A Perencanaan				
1	Menyusun Target Pengelolaan Drainase Skala Kota	V		
2	Menyusun Rencana Program Drainase Dalam Rangka Pencapaian Target	V		
3	Menyusun Rencana Anggaran Program Drainase Dalam Rangka Pencapaian Target	V		
B Pengadaan Sarana				
1	Menyediakan/Membangun Sarana Drainase Lingkungan	V	V	V
C Pengelolaan				
1	Membersihkan Saluran Drainase Lingkungan	V	V	V
2	Memperbaiki Saluran Drainase Lingkungan Yang Rusak	V		V
3	Melakukan Pengecekan Kelengkapan Utilitas Teknis Bangunan (Saluran Drainase Lingkungan) dalam Mengurus IMB	V	V	V
D Pengaturan Dan Pembinaan				
1	Menyediakan Advis Planning Untuk Pengembangan Kawasan Permukiman, Termasuk Penataan Drainase Lingkungan Di Wilayah Yang Akan Dibangun	V	V	V
2	Memastikan Integrasi Sistem Drainase Lingkungan (Sekunder) Dengan Sistem Drainase Sekunder Dan Primer	V		
3	Melakukan Sosialisasi Peraturan, dan Pembinaan dalam Hal Pengelolaan Drainase Lingkungan	V		
4	Memberikan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Drainase Lingkungan	V		
E Monitoring Dan Evaluasi				
1	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Target Pengelolaan Drainase Lingkungan Skala Kota	V		
2	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kapasitas Infrastruktur Sarana Pengelolaan Drainase Lingkungan	V		
3	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Efektivitas Layanan Drainase Lingkungan, Dan Atau Menampung Serta Mengelola Keluhan Atas Kemacetan Fungsi Drainase Lingkungan	V		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

2.3. Area Berisiko dan Permasalahan Sanitasi

Penetapan area berisiko sanitasi bertujuan untuk memetakan kecamatan dan kelurahan yang berada dalam kota yang memiliki risiko tinggi. Pengklasifikasian area berisiko dan permasalahan-permasalahan mendesak ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pelaksanaan program kegiatan pembangunan sistem sanitasi. Berikut penjelasan tentang area berisiko dan permasalahan sanitasi.

a. Air Limbah Domestik

Dari hasil penentuan area berisiko untuk Kabupaten Sukoharjo didapat sebanyak 18 desa/kelurahan dengan risiko sanitasi air limbah domestik sangat tinggi yang tersebar di 8 kecamatan. Dan untuk area berisiko tinggi terdapat di 63 Desa/kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan. Adapun tabel area berisiko sanitasi air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel II. 46.

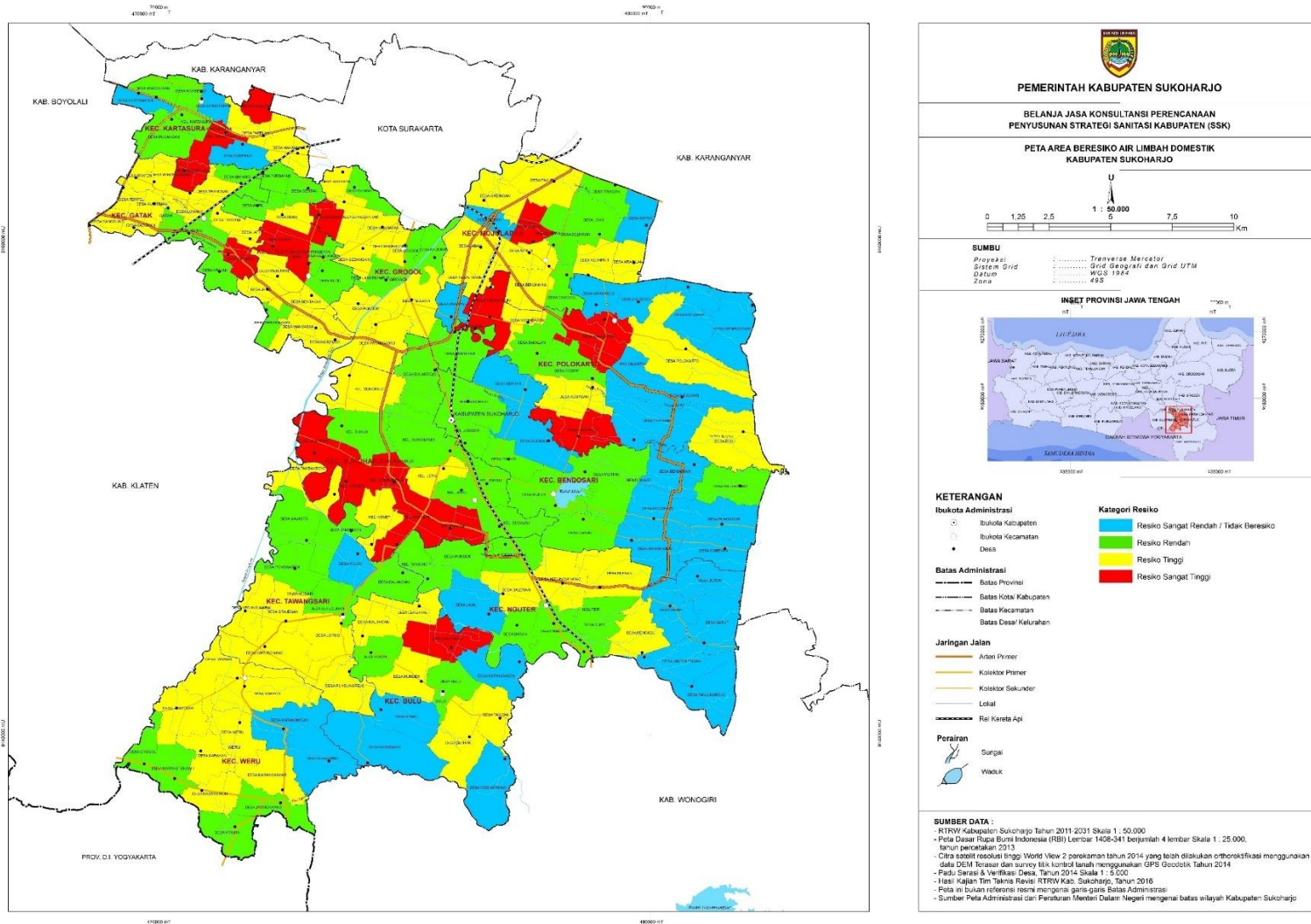
Pada Tabel II. 46 area berisiko sangat tinggi ditandai dengan warna merah dan untuk area berisiko tinggi ditandai dengan warna kuning.

Tabel II. 46
Area Risiko Sanitasi Air Limbah Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Kelurahan	Area Berisiko Air Limbah	No	Kecamatan	Kelurahan	Area Berisiko Air Limbah
1	Weru	Karangwuni	3,0	32	Polokarto	Bugel	4,0
2	Weru	Karanganyar	3,0	33	Polokarto	Karangwuni	4,0
3	Weru	Weru	3,0	34	Polokarto	Ngombakan	3,0
4	Weru	Karakan	3,0	35	Polokarto	Kemasan	3,0
5	Weru	Tegalsari	3,0	36	Polokarto	Kenokorejo	4,0
6	Weru	Tawang	3,0	37	Polokarto	Bulu	3,0
7	Weru	Ngreco	3,0	38	Polokarto	Polokarto	3,0
8	Bulu	Gentan	3,0	39	Polokarto	Mranggen	4,0
9	Bulu	Tiyaran	3,0	40	Mojolaban	Tegalmade	3,0
10	Bulu	Kunden	3,0	41	Mojolaban	Laban	3,0
11	Bulu	Malangan	3,0	42	Mojolaban	Wirun	3,0
12	Bulu	Lengking	3,0	43	Mojolaban	Bekonang	3,0
13	Bulu	Ngasinan	4,0	44	Mojolaban	Klumprit	3,0
14	Tawangsari	Watubonang	3,0	45	Mojolaban	Kragilan	3,0
15	Tawangsari	Pundungrejo	3,0	46	Mojolaban	Dukuh	4,0
16	Tawangsari	Lorog	3,0	47	Mojolaban	Gadingan	3,0
17	Tawangsari	Grajan	3,0	48	Mojolaban	Palur	3,0
18	Tawangsari	Kedungjambal	3,0	49	Grogol	Pondok	3,0
19	Tawangsari	Tambakboyoy	3,0	50	Grogol	Parangjoro	3,0
20	Sukoharjo	Kenep	3,0	51	Grogol	Teluk	3,0
21	Sukoharjo	Banmati	4,0	52	Grogol	Madegondo	3,0
22	Sukoharjo	Mandan	4,0	53	Grogol	Gedangan	3,0
23	Sukoharjo	Jetis	3,0	54	Grogol	Kwarasan	3,0
24	Sukoharjo	Combongan	4,0	55	Grogol	Sanggrahan	3,0
25	Sukoharjo	Kriwen	4,0	56	Grogol	Manang	4,0
26	Sukoharjo	Bulakan	4,0	57	Grogol	Banaran	3,0
27	Sukoharjo	Sonorejo	3,0	58	Baki	Ngrombo	3,0
28	Nguter	Pengkol	3,0	59	Baki	Mancasan	3,0
29	Nguter	Plesan	3,0	60	Baki	Jetis	3,0
30	Nguter	Kedungwinong	3,0				
31	Nguter	Daleman	3,0				

No	Kecamatan	Kelurahan	Area Berisiko Air Limbah
61	Baki	Bentakan	3,0
62	Baki	Bakipandeyan	4,0
63	Baki	Menuran	3,0
64	Baki	Duwet	4,0
65	Baki	Siwal	3,0
66	Gatak	Sanggung	3,0
67	Gatak	Kagokan	3,0
68	Gatak	Geneng	4,0
69	Gatak	Jati	3,0
70	Gatak	Trosemi	3,0
71	Gatak	Luwang	3,0
72	Gatak	Klaseman	3,0
73	Gatak	Tempel	3,0
74	Gatak	Sraten	3,0
75	Gatak	Wironanggan	3,0
76	Gatak	Trangsan	3,0
77	Kartasura	Ngemplak	4,0
78	Kartasura	Makamhaji	3,0
79	Kartasura	Pabelan	3,0
80	Kartasura	Ngadirejo	4,0
81	Kartasura	Gonilan	4,0

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022



Gambar 2. 27
Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Permasalahan mendesak pada pengelolaan air limbah domestik dibagi menjadi dua aspek yaitu, aspek teknis dan non-teknis. Aspek teknis permasalahan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Sukoharjo adalah terkait dengan infrastruktur (Sarana dan Prasarana). Sedangkan aspek non-teknis mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan pendanaan (anggaran belanja), kelembagaan pengelolaan, peran serta masyarakat serta belum adanya peraturan daerah terkait. Adapun permasalahan tersebut dirincikan pada Tabel II. 47 sebagai berikut ini.

Tabel II. 47
Permasalahan Air Limbah Domestik Kabupaten Sukoharjo

No	Permasalahan
A	Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan teknis
	SPALD-Setempat
1	Akses terhadap jamban yang tidak layak 12,1%
2	Jumlah truk tinja kurang memadai (hanya 2 unit)
3	Praktek pengurusan tinja sangat rendah pertahun (2,5%)
4	Kondisi IPLT Mojorejo kurang berfungsi optimal (ada kapasitas idle)
5	Lumpur tinja berpotensi meluap saat loading dari truk tinja karena ukuran bar screen hanya berukuran 50 cm x 30 cm
6	Lumpur tinja yang telah kering dapat dimanfaatkan, belum ada pemanfaatan
7	Tangga bak SSC yang dibangun memiliki kemiringan yang curam sekitar 45° berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja
8	Air yang terdapat dalam bak anaerobik I dan II berwarna kehijauan karena tumbuhnya alga di permukaan bak anaerobik, dimana pertumbuhan alga seharusnya tidak dapat terjadi dalam bak anaerobik karena tidak adanya oksigen.
9	Saat ini Bak Fakultatif terisi oleh air hujan dan airnya berwarna kehijauan
10	Pada IPLT belum terdapat unit desinfeksi, untuk memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2017
11	Belum terdapat SOP IPLT, dan operasional serta perawatan IPLT tidak berjalan
12	Inlet dari penyedotan lumpur tinja masih sangat minim (rata-rata 1 truk per bulan)
13	Kondisi tangki septik di masyarakat yang tidak belum penuh meskipun sudah >10 tahun
	SPALD-Terpusat
1	Pembangunan IPAL Permukiman belum merata di wilayah Kabupaten Sukoharjo
2	Pembangunan IPAL Permukiman belum disertai dengan monitoring dan evaluasi terkait kinerja KSM pengelola, dan juga efisiensi pengolahan IPAL Permukiman terbangun
3	Belum ada pengujian effluent yang dihasilkan oleh IPAL Permukiman yang telah terbangun
B	Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta. Komunikasi
	Pengaturan
1	Belum ada Perda yang menangani tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
2	Belum ada Peraturan tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal (LLTT)
3	Belum ada kebijakan daerah terkait limbah domestik bagi pengembangan perumahan.
	Kelembagaan
1	Lemahnya fungsi lembaga pengelolaan air limbah permukiman
2	Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah

No	Permasalahan
3	Perlu ditingkatkannya koordinasi antara instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah domestik
4	Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
5	Belum optimalnya operasional kelembagaan di UPT Air Limbah
6	Kurangnya sosialisasi tentang penyedotan lumpur tinja dan tangki septik aman
	Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta serta Komunikasi
1	Kesadaran masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam penyedotan lumpur tinja masih rendah, kecuali tangki septik penuh.
2	Rendahnya pengembangan pelanggan pada IPAL Permukiman terbangun
3	Persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi khususnya terkait air limbah domestik belum menjadi kebutuhan yang mendesak
4	Belum terdapat data mengenai tangki septik milik masyarakat yang sudah memenuhi SNI
5	Pengetahuan masyarakat terkait keberadaan IPLT di Kabupaten Sukoharjo masih kurang
6	Tingkat kesadaran masyarakat tentang penyedotan lumpur tinja dari tangki septik secara berkala masih kurang
7	Pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik, khususnya tangki septik yang memenuhi standart masih rendah
	Keuangan
1	Belum terdata dengan baik anggaran untuk pengelolaan air limbah khususnya untuk limbah domestik
2	Masih terbatasnya alokasi pendanaan pemerintah daerah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi sistem pengelolaan air limbah terpusat
3	Peraturan Daerah tentang retribusi penyedotan lumpur tinja diperlukan review berdasarkan biaya operasional yang diperlukan
4	Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi
5	Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.
6	Belum adanya anggaran pemeliharaan sektor air limbah untuk IPAL yang sudah terbangun

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

b. Persampahan

Dari hasil penentuan area berisiko untuk Kabupaten Sukoharjo di dapat sebanyak 65 desa/kelurahan dengan risiko sanitasi persampahan sangat tinggi yang tersebar di 10 kecamatan dan terdapat 26 Desa/kelurahan risiko sanitasi persampahan tinggi. Adapun tabel area berisiko sanitasi persampahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel II. 48.

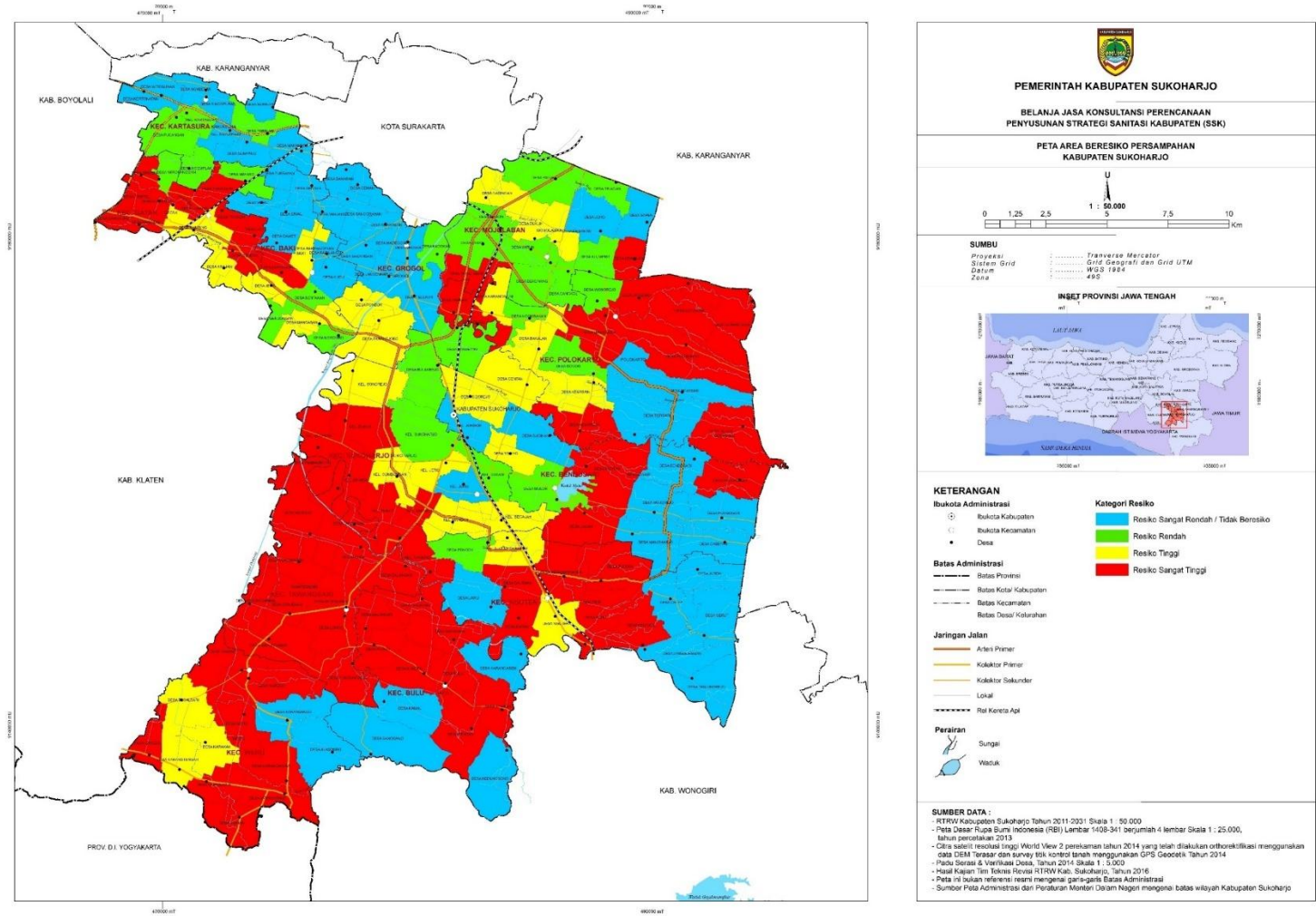
Pada Tabel II. 48 area berisiko sangat tinggi ditandai dengan warna merah, sedangkan area berisiko tinggi ditandai dengan warna kuning.

Tabel II. 48
Area Risiko Sanitasi Persampahan Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Kelurahan	Area Berisiko Persampahan
1	Weru	Grogol	4,0
2	Weru	Karangtengah	3,0
3	Weru	Karangwuni	4,0
4	Weru	Krajan	4,0
5	Weru	Jatingarang	4,0
6	Weru	Karanganyar	4,0
7	Weru	Weru	4,0
8	Weru	Karakan	3,0
9	Weru	Tegalsari	3,0
10	Weru	Tawang	4,0
11	Weru	Ngreco	4,0
12	Bulu	Gentan	4,0
13	Bulu	Tiyaran	4,0
14	Bulu	Bulu	4,0
15	Bulu	Kunden	4,0
16	Bulu	Puron	4,0
17	Bulu	Malangan	4,0
18	Bulu	Lengking	4,0
19	Bulu	Ngasinan	4,0
20	Tawang Sari	Watubonang	4,0
21	Tawang Sari	Pundungrejo	4,0
22	Tawang Sari	Lorog	4,0
23	Tawang Sari	Grajan	4,0
24	Tawang Sari	Kedungjambal	4,0
25	Tawang Sari	Ponowaren	4,0
26	Tawang Sari	Kateguhan	4,0
27	Tawang Sari	Dalangan	4,0
28	Tawang Sari	Pojok	4,0
29	Tawang Sari	Tangkisan	4,0
30	Tawang Sari	Majasto	4,0
31	Tawang Sari	Tambakboyo	4,0
32	Sukoharjo	Kenep	4,0
33	Sukoharjo	Banmati	4,0
34	Sukoharjo	Mandan	3,0
35	Sukoharjo	Begajah	3,0
36	Sukoharjo	Jetis	3,0
37	Sukoharjo	Combongan	3,0
38	Sukoharjo	Kriwen	4,0
39	Sukoharjo	Bulakan	4,0
40	Sukoharjo	Dukuh	4,0
41	Sukoharjo	Sonorejo	3,0
42	Nguter	Baran	4,0
43	Nguter	Nguter	3,0
44	Nguter	Gupit	4,0
45	Nguter	Pengkol	4,0
46	Nguter	Plesan	4,0
47	Nguter	Kedungwinong	4,0

No	Kecamatan	Kelurahan	Area Berisiko Persampahan
48	Nguter	Daleman	4,0
49	Nguter	Kepuh	3,0
50	Nguter	Tanjung	4,0
51	Bendosari	Jagan	4,0
52	Bendosari	Paluhombo	4,0
53	Bendosari	Mertan	4,0
54	Bendosari	Toriyo	3,0
55	Bendosari	Sidorejo	3,0
56	Bendosari	Gentan	3,0
57	Polokarto	Pranan	4,0
58	Polokarto	Bugel	4,0
59	Polokarto	Karangwuni	3,0
60	Polokarto	Bakalan	3,0
61	Polokarto	Kemasan	3,0
62	Polokarto	Kenokorejo	4,0
63	Polokarto	Bulu	4,0
64	Polokarto	Polokarto	4,0
65	Polokarto	Mranggen	4,0
66	Polokarto	Jatisobo	4,0
67	Polokarto	Kayuapak	4,0
68	Polokarto	Genengsari	4,0
69	Mojolaban	Tegalmade	4,0
70	Mojolaban	Kragilan	4,0
71	Mojolaban	Demakan	3,0
72	Mojolaban	Dukuh	3,0
73	Mojolaban	Gadingan	3,0
74	Grogol	Pondok	3,0
75	Grogol	Parangjoro	3,0
76	Baki	Mancasan	3,0
77	Baki	Jetis	3,0
78	Baki	Bakipandeyan	3,0
79	Baki	Menuran	4,0
80	Gatak	Sanggung	4,0
81	Gatak	Kagokan	4,0
82	Gatak	Blimbing	3,0
83	Gatak	Krajan	3,0
84	Gatak	Geneng	4,0
85	Gatak	Jati	4,0
86	Gatak	Trosemi	4,0
87	Gatak	Luwang	4,0
88	Gatak	Klaseman	4,0
89	Gatak	Tempel	4,0
90	Gatak	Sraten	4,0
91	Gatak	Trangsan	4,0

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022



Gambar 2. 28
Peta Area Beresiko Persampahan
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Permasalahan mendesak pada pengelolaan persampahan dibagi menjadi dua aspek yaitu, aspek teknis dan non-teknis. Aspek teknis permasalahan pengelolaan persampahan Kabupaten Sukoharjo adalah terkait dengan infrastruktur (Sarana dan Prasarana). Sedangkan aspek non-teknis mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan pendanaan (anggaran belanja), kelembagaan pengelolaan, peran serta masyarakat serta belum adanya peraturan daerah terkait. Adapun permasalahan tersebut dirincikan pada Tabel II. 49 sebagai berikut ini.

Tabel II. 49
Permasalahan Persampahan Kabupaten Sukoharjo

No	Permasalahan
A	Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan teknis
1	Belum tercapainya target pengurangan persampahan 30%, Tahun 2022 baru mencapai 16,6%
2	Belum terdapat sarana pengolah sampah yang dapat mengurangi sampah dalam jumlah besar, seperti TPST/PLTSA dan sejenisnya
3	Jumlah TPS 3R masih kurang optimal, baru terdapat 12 buah di seluruh Kabupaten Sukoharjo
4	Terdapat beberapa lokasi yang menjadi buangan sampah liar, terutama daerah yang jauh dari TPA Mojorejo
5	Pelayanan persampahan Kabupaten Sukoharjo belum mencapai 100%
6	Jumlah sarana pengumpul dan pengangkut sampah masih kurang untuk pelayanan persampahan ideal
7	Belum terdapat pemantauan kondisi TPS 3R
8	Masih rendahnya pengurangan sampah pada sumber
9	Umur landfill TPA Mojorejo yang semakin berkurang, sehingga diperlukan pengembangan landfill dan pengurangan sampah secara progresif
10	Pengolahan IPL kurang optimal
11	Pengembangan landfill TPA menggunakan konstruksi sanitary landfill
12	Masterplan Persampahan pada Tahun 2017 sehingga perlu dilakukan review
B	Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta. Komunikasi
	Pengaturan
1	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah harus dievaluasi karena terakhir Perda Tahun 2011
2	Review Peraturan Daerah tentang retribusi persampahan
	Kelembagaan
1	Peningkatan program masif untuk pengurangan sampah dan pengomposan sampah pada rumah tangga
2	Peningkatan kerjasama antara pihak swasta dan Pemda Kabupaten Sukoharjo untuk pengelolaan persampahan
3	Kurangnya sosialisasi tentang pengurangan dan penanganan sampah ke masyarakat
4	Peningkatan kuantitas (jumlah) dan kualitas SDM operator sampah
	Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta serta Komunikasi
1	Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis
2	Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah langsung ke TPS sehingga tidak terdata dan tidak membayar retribusi persampahan
3	Cakupan pelayanan pengangkutan sampah masih belum menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sehingga masih ada masyarakat yang membakar sampah atau membuang ke sungai
4	Kurangnya pemilahan sampah di tingkat masyarakat

No	Permasalahan
5	Terbatasnya penerimaan jenis sampah di bank sampah
	Keuangan
1	Terbatasnya Dana APBD Kabupaten Sukoharjo dalam bidang persampahan
2	Peraturan Daerah tentang retribusi persampahan diperlukan review berdasarkan biaya operasional yang diperlukan, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
3	Kurang optimalisasi pola penarikan retribusi persampahan

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

c. Drainase

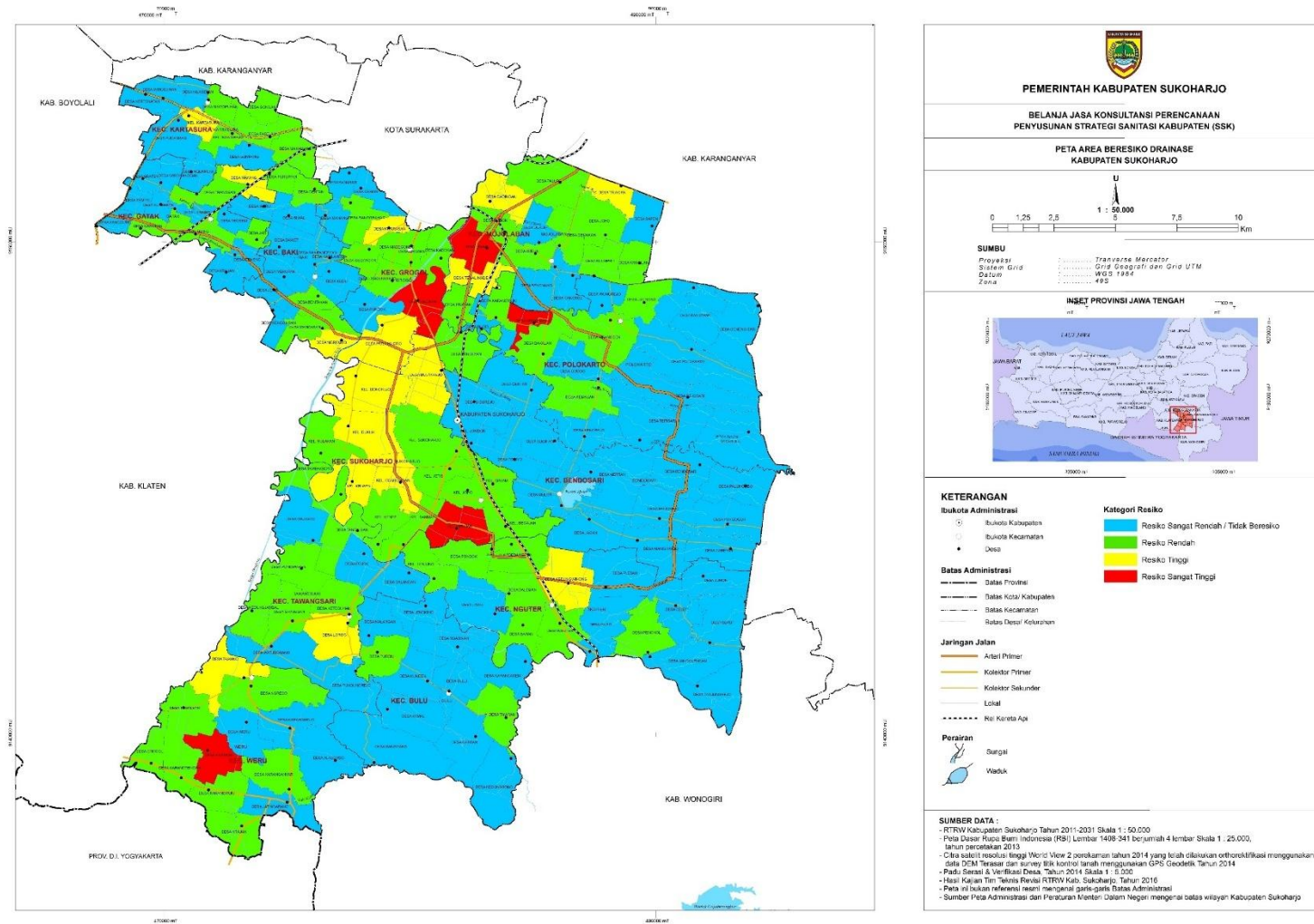
Dari hasil penentuan area berisiko untuk Kabupaten Sukoharjo di dapat sebanyak 5 desa/kelurahan dengan risiko sanitasi drainase sangat tinggi yang tersebar di 5 kecamatan sedangkan risiko sanitasi drainase tinggi terdapat di 16 Desa/kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan. Adapun tabel area berisiko sanitasi drainase di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel II. 50.

Pada Tabel II. 48 area berisiko sangat tinggi ditandai dengan warna merah, dan untuk area berisiko tinggi ditandai dengan warna kuning.

Tabel II. 50
Area Resiko Sanitasi Drainase Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Kelurahan	Area Berisiko Drainase
1	Weru	Karakan	4,0
2	Weru	Tawang	3,0
3	Tawang Sari	Lorog	3,0
4	Sukoharjo	Mandan	4,0
5	Sukoharjo	Combongan	3,0
6	Sukoharjo	Kriwen	3,0
7	Sukoharjo	Dukuh	3,0
8	Sukoharjo	Bulakrejo	3,0
9	Sukoharjo	Sonorejo	3,0
10	Nguter	Kedungwinong	3,0
11	Polokarto	Ngombakan	4,0
12	Mojolaban	Tegalmade	3,0
13	Mojolaban	Laban	4,0
14	Mojolaban	Triyagan	3,0
15	Mojolaban	Gadingan	3,0
16	Grogol	Parangjoro	3,0
17	Grogol	Teluk	4,0
18	Grogol	Kwarasan	3,0
19	Baki	Ngrombo	3,0
20	Gatak	Mayang	3,0
21	Kartasura	Kartasura	3,0

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022



Gambar 2. 29
 Peta Area Beresiko Drainase Perkotaan
 Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Permasalahan mendesak pada pengelolaan drainase dibagi menjadi dua aspek yaitu, aspek teknis dan non-teknis. Aspek teknis permasalahan pengelolaan drainase Kabupaten Sukoharjo adalah terkait dengan infrastruktur (Sarana dan Prasarana). Sedangkan aspek non-teknis mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan pendanaan (anggaran belanja), kelembagaan pengelolaan, peran serta masyarakat serta belum adanya peraturan daerah terkait. Adapun permasalahan tersebut dirincikan pada Tabel II. 51 sebagai berikut ini.

Tabel II. 51
Permasalahan Drainase Kabupaten Sukoharjo

No	Permasalahan
A	Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan teknis
1	Berkurangnya kapasitas saluran drainase/banjir yang disebabkan sedimentasi, sampah, bangunan liar
2	Meningkatnya beban drainase akibat alih fungsi lahan yang tidak diikuti dengan pengembalian fungsi resapan dan tampungan
3	Operasi dan pemeliharaan saluran drainase eksisting yang masih kurang optimal
4	Saluran drainase selain mengalirkan air hujan namun juga air limbah domestik
5	Kurangnya perawatan sarana drainase seperti pintu air
6	Terjadinya penyempitan saluran Drainase
7	Bantaran sungai dan saluran drainase yang menyempit akibat dari bangunan-bangunan liar
8	Masih terdapat jalan yang tidak memiliki saluran pada sisi kanan-kiri jalan sehingga menyebabkan genangan
9	Saat debit Sungai Bengawan Solo, semua air dari saluran-saluran dan anak sungai tidak bisa mengalir ke Bengawan Solo sehingga terjadi backwater dan saluran menggenangi Kawasan permukiman
10	Tumpukan sampah yang menyangkut di saluran drainase menyebabkan air tidak bisa mengalir
11	Banyak saluran disekitar permukiman warga tidak pernah dibersihkan sehingga menyebabkan saluran-saluran itu tersumbat dan tidak berfungsi sebagai mana mestinya
12	Adanya TPS yang berada pada pinggir sungai yang berbatasan dengan Desa Grogol mengakibatkan hampir setengah lebar sungai tertutup oleh sampah
13	Belum tersusunnya pola aliran dan pembagian sub sistem pengelolaan drainase, sehingga menyulitkan penanganan drainase secara komprehensif dan berkelanjutan oleh pihak Pengelola Drainase
14	Masterplan drainase belum menyeluruh mencakup wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo
B	Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta. Komunikasi
	Pengaturan
1	Belum adanya peraturan daerah terkait pengelolaan drainase
	Kelembagaan
1	Perlu ditingkatkan kembali sinergi antar lembaga pengelola prasarana drainase
2	Penanganan Drainase Kabupaten Sukoharjo hendaknya mengacu pada Masterplan Drainase dengan berbagai penyesuaian dengan kondisi terakhir di lapangan.
	Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta serta Komunikasi
1	Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase dan sungai
2	Masyarakat membuat bangunan di atas saluran drainase

3	Masyarakat masih membuang air limbah grey water dan bahkan black water (dari toilet) ke sungai
5	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan menjaga saluran drainase
	Keuangan
1	Anggaran operasional dan pemeliharaan sarana drainase yang masih rendah
2	Porsi belanja fisik sub sektor drainase < 5% dari APBD

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

BAB III
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Visi merupakan suatu pemikiran atau pandangan kedepan tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan. Dengan kata lain, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Misi adalah pernyataan yang luas atau umum tentang sesuatu yang akan dikerjakan, dengan siapa atau untuk siapa, dan kenapa. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. Dalam misi dinyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu melalui strategi yang telah dipilih. Bersama ini, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2027 yang tergambarkan pada Tabel III. 1.

Tabel III. 1
Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2027

Visi Kabupaten Sukoharjo	Misi Kabupaten Sukoharjo	Visi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo	Misi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo
(RPJMD Tahun 2021-2026)	(RPJPD Tahun 2021-2026)		
Sukoharjo Yang Maju, Adil dan Makmur		Terwujudnya sanitasi Kabupaten Sukoharjo yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis maysarakat	Misi Air Limbah Domestik
	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius		Meningkatkan akses pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas terutama untuk masyarakat miskin dan MBR
	Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan		Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam peningkatan pelayanan air limbah
	Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat		Meningkatkan kesadaran masyarakat dan budaya pola hidup bersih dan sehat yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah
	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) didukung oleh aparaturn Pemerintah Daerah		Menigkatkan peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah

Visi Kabupaten Sukoharjo	Misi Kabupaten Sukoharjo	Visi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo	Misi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo
(RPJMD Tahun 2021-2026)	(RPJPD Tahun 2021-2026)		
	yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan		Misi Persampahan
			Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan yang terpadu dan efisien.
			Meningkatkan pengurangan sampah dengan peran serta masyarakat dan swasta.
			Misi Drainase Perkotaan
			Meningkatkan sarana drainase yang berkelanjutan
			Meningkatkan masyarakat sehat melalui pembangunan drainase lingkungan
			Meningktkan peran serta masyarakat dalam penanganan genangan dan pemeliharaan drainase

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1. Tujuan Sasaran Pengembangan Sanitasi

3.2.1.1. Tujuan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain visi dan misi sanitasi juga diperlukan penajaman dari visi dan misi tersebut yang dituangkan menjadi sebuah tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Di dalam sektor air limbah domestik, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. 2
Tujuan dan Sasaran Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan akses aman air limbah domestik.	Tersedianya akses aman ke fasilitas pengolahan air limbah 15 % pada tahun 2027.	Akses aman Kabupaten Sukoharjo hanya 2,5%
Peningkatan pelayanan lumpur tinja dan optimalisasi pelayanan IPLT	Meningkatnya akses layak pengelolaan air limbah domestik menjadi 100% di tahun 2023	Akses Layak Kabupaten Sukoharjo mencapai 88%
Tersusunnya perencanaan air limbah yang komprehensif dan berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepedulian lingkungan, perilaku PHBS dan keterlibatan dalam program pengelolaan air limbah	Praktek pengurusan tinja sangat rendah pertahun (2,5%)
	Peningkatan Anggaran Pengelolaan Air Limbah	Minimnya anggaran terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
	Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2026	Minimnya peran dan kesadaran masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang air limbah domestik dan Peraturan Bupati tentang LLTT Pada Tahun 2023	Belum adanya peraturan daerah tentang air limbah domestik dan Peraturan Bupati tentang LLTT
	Peningkatan pelayanan IPAL Domestik	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

3.2.1.2. Tujuan Sasaran Pembangunan Persampahan

Permasalahan dalam sektor persampahan di Kabupaten Sukoharjo adalah jumlah armada yang tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Pengurangan sampah di TPS 3R dan bank sampah yang ada belum berjalan optimal dan umur TPA yang sudah habis. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tabel III. 3
Tujuan dan Sasaran Pencapaian Pengembangan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan persentase penanganan dan pengurangan sampah	1.Tercapainya penanganan persampahan sebesar 60% pada tahun 2024	1. Tingkat penanganan sampah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 mencapai 55,2%
Terbangunnya fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi berkelanjutan	2. Tercapainya pengurangan sampah 20% pada tahun 2024	2. Tingkat pengurangan sampah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 mencapai 16,6%
	3.Meningkatnya sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	3.Pelayanan persampahan belum mencapai 100%
	4.Peningkatan Anggaran Pengelolaan Persampahan sesuai dengan kebutuhan sampai Tahun 2027	4.Masih kurangnya anggaran dalam pengelolaan persampahan selama 5 tahun terakhir
	5.Pengembangan Potensi masyarakat secara sitematik dalam pemilahan sampah rumah tangga pada Tahun 2024	5. Pengurangan sampah di rumah tangga dan sumber masih rendah
	6. Sosialisasi pada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan ber PHBS mulai Tahun 2023	6. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai/saluran drainase

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Sesuai dengan visi dan misi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo, maka pengembangan sanitasi Kabupaten Sukoharjo difokuskan pada 2 (dua) sub sektor yaitu Sub Sektor Air Limbah dan Sub Sektor Persampahan. Tahap

pengembangan untuk jangka pendek diarahkan untuk periode sampai dengan 1 (satu) tahun, sedangkan pengembangan jangka menengah diarahkan untuk periode sampai dengan 5 (lima) tahun, dan pengembangan jangka panjang diarahkan untuk periode sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

3.2.2.1. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Tahapan pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo yang didasarkan pada pengembangan secara bertahap (Jangka Pendek, dan Jangka Menengah).

Tabel III. 4
Tabel Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Sukoharjo

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Wilayah Perkotaan				
A	BABS di Tempat Terbuka	0%		
B	BABS di Tempat Tertutup	0%		0
C	Akses Belum Layak	11,2%	0%	0
D	Akses Layak	79,30%	100%	100%
E	Akses Aman	2,53%	4%	6,0%
Wilayah Perdesaan				
A	BABS di Tempat Terbuka	0%		
B	BABS di Tempat Tertutup	0%		
C	Akses Belum Layak	0,9%		
D	Akses Layak	6,1%		
E	Akses Aman	0,05%		
Total		100%	100%	100%

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Capaian air limbah domestik Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2022 untuk akses aman sebesar 2,5%, sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar 6% sehingga terdapat gap target 2024 untuk akses aman sebesar 3,4%. Untuk capaian akses layak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 88%. Sedangkan gap akses layak pada target jangka pendek sebesar 12%.

3.2.2.2. Tahapan Pengembangan Persampahan

Tahapan pengembangan persampahan di Kabupaten Sukoharjo yang didasarkan pada pengembangan secara bertahap (Jangka Pendek, dan Jangka Menengah).

Tabel III. 5
Tabel Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Wilayah Perkotaan				
1	Pengurangan Sampah	16,6%	18,0%	20,0%
2	Penanganan Sampah	55,2%	55,0%	60,0%
3	Sampah Tidak Terkelola	28,3%	27,0%	20,0%
Total		100%	100%	100%

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Capaian persampahan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2022 untuk penanganan sampah sebesar 55,2%, sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar 60% sehingga terdapat gap target 2024 sebesar 4,8%. Untuk capaian pengurangan sampah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 16,6%. Sedangkan gap pengurangan pada target jangka pendek sebesar 1,4%.

Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun ditampilkan pada Tabel III. 6 sebagai berikut.

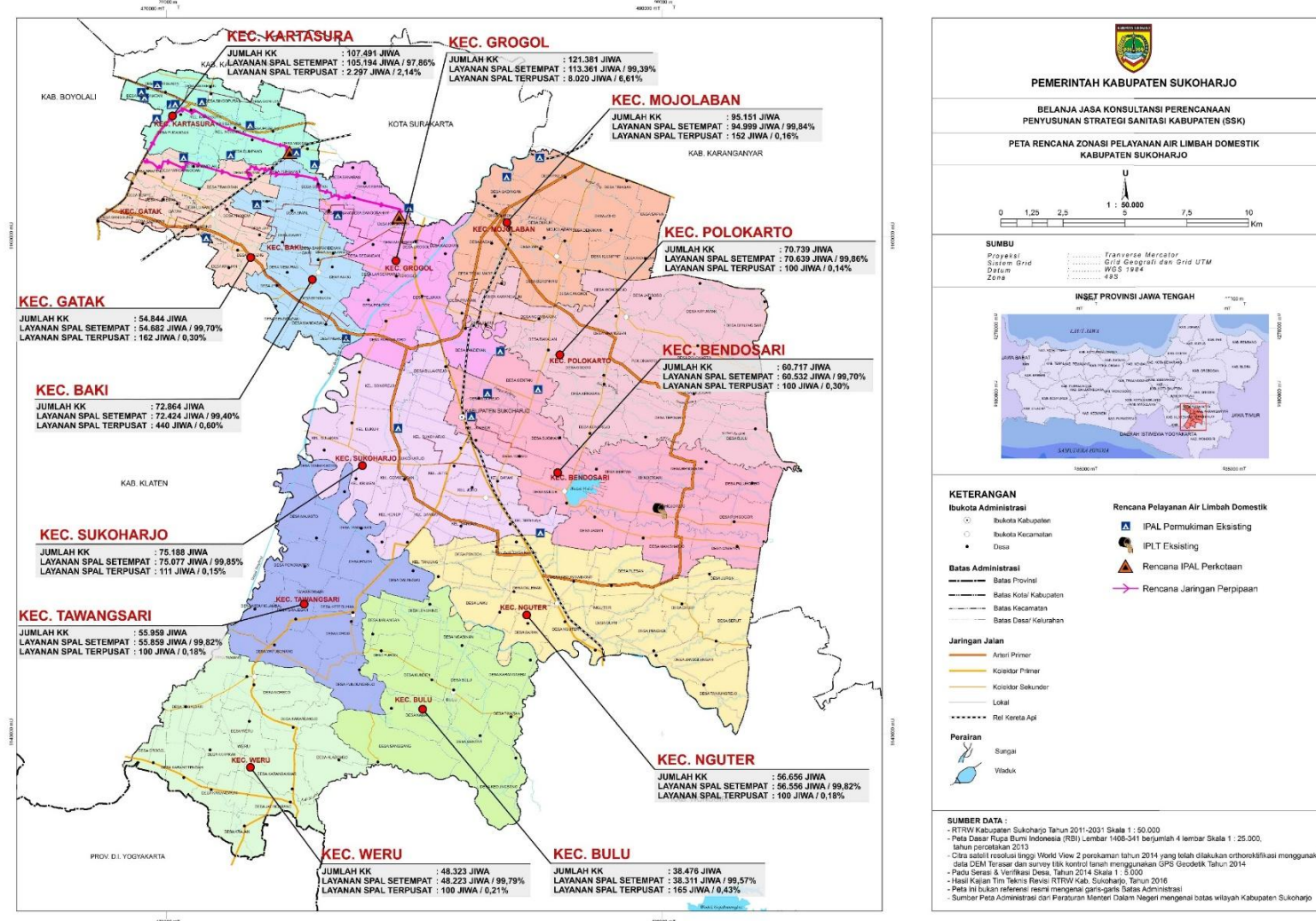
Tabel III. 6
Skenario Pencapaian Sasaran Sanitasi

Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Akses Aman	2,50%	4,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10%
Akses Layak	88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	83,8%	91,00%	88,00%	85,50%	84,50%	83,50%
Akses Layak Bersama	1,6%	5,00%	6,00%	6,50%	6,50%	6,50%
Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belum Layak	12,1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BABS di Tempat Terbuka	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengurangan Sampah	16,6%	18,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%
Penanganan Sampah	55,2%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	65,00%
Sampah tidak terkelola	28,3%	27,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%

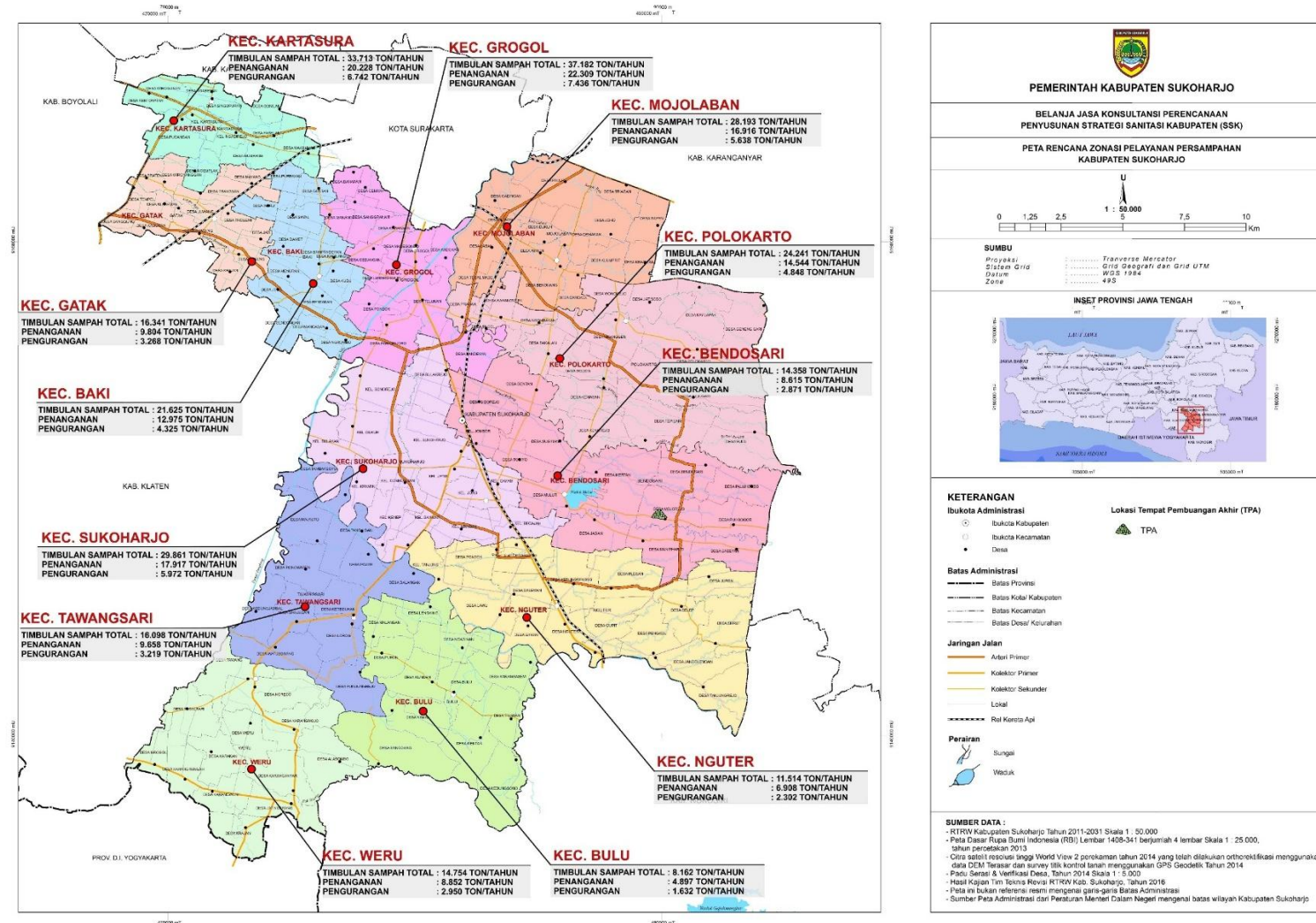
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Pada Tabel III. 6 menunjukkan skenario pencapaian sasaran sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam 5 tahun kedepan. Pada bidang Air Limbah Domestik, Akses aman Tahun 2022 mencapai 2,50% dengan target pada Tahun 2027 sebesar 10%. Sedangkan untuk akses layak individu Tahun 2022 sudah mencapai 88% dengan target pada Tahun 2027 sebesar 100%. Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2017 sudah deklarasi ODF sehingga pada Tahun 2022 tidak ada BABS terbuka maupun tertutup.

Pada persampahan, capaian pengurangan sampah Tahun 2022 mencapai 16,60% dengan target pada Tahun 2027 sebesar 35%. Sedangkan untuk capaian penanganan sampah Tahun 2022 sudah mencapai 55,2% dengan target pada Tahun 2027 sebesar 65%.



Gambar 2. 30
Peta zonasi air limbah domestik
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022



Gambar 2. 31
Peta zonasi persampahan
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Sub bab ini berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan skenario pembangunan sanitasi yang hasilnya akan menjadi bagian dari Bab 4 dan Bab 5.

Tabel III. 7
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sukoharjo untuk Sanitasi

No	Uraian	Tahun (dalam ribuan)					Rata-rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	9.070.207	23.750.800	29.292.877	20.158.872	23.471.743	12,38%
1.1	Air Limbah Domestik	50.000	254.765	228.000	180.189	2.122.949	33,40%
1.2	Sampah	6.673.406	11.094.600	11.314.277	9.261.877	15.657.264	15,12%
1.3	Drainase	2.346.801	12.401.435	17.750.600	10.716.806	5.691.530	10,68%
2	Dana Alokasi Khusus		0	0	0	0	0,00%
2.1	DAK Sanitasi		0	0	0	0	0,00%
2.2	DAK Lingkungan Hidup		0	0	0	0	0,00%
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman		0	0	0	0	0,00%
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi		0	0	0	0	0,00%
	Belanja APBD murni untuk sanitasi (1-2-3)	9.070.207	23.750.800	29.292.877	20.158.872	23.471.743	12,38%
	Total Belanja Langsung	772.552.615	1.012.726.172	1.117.575.724	903.802.291	1.932.202.804,032	15,67%
	% APBD murni terhadap Belanja Langsung	1,17%	2,35%	2,62%	2,23%	1,21%	
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi kedepan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							

Sumber: APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021, diolah.

Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sukoharjo untuk Sanitasi pada Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel III. 7. Belanja APBD murni untuk sanitasi pada Tahun 2021 sebesar Rp23.471.743.000,00 jumlah tersebut hanya sebesar 1,21% dari total belanja langsung. Belanja APBD murni untuk sanitasi pada Tahun 2021 lebih besar dibanding dengan Tahun 2020 yang sempat menurun dari Tahun 2019.

Tabel III. 8
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan (x Rp. 1 Juta)

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Belanja Langsung	2.592.187,8	2.851.406,6	3.136.547,2	3.450.202,0	3.795.222,2	15.825.565,7
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	36.772,6	37.875,8	39.012,1	40.182,4	41.387,9	195.230,9
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	17.478,3	20.640,0	17.581,2	17.466,9	20.309,7	93.476,1

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Prakiraan besaran pendanaan kedepan yaitu Tahun 2021-2027 dapat dilihat pada Tabel III. 8. Perkiraan APBD murni untuk sanitasi pada Tahun 2023 sebesar Rp36.772.600,00 dengan perkiraan komitmen pendanaan sanitasi sebesar Rp17.478.000,00. Diperkirakan APBD murni untuk sanitasi akan terus meningkat setiap tahunnya. Hingga Tahun 2027 diperkirakan sebesar Rp41.387.900,00.

Tabel III. 9
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sukoharjo untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi (x Rp1000)

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (x Rp1000)					Rata-rata Pertumbuh an
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi						
1.1.	Air Limbah Domestik						
	Biaya Operasional / Pemeliharaan	0,00	254.765	228.000	180.189	201.600	-9,22%
1.2.	Sampah Domestik						
	Biaya Operasional / Pemeliharaan	5.824.606	9.964.350	10.994.167	9.080.620	0	-5,85%
1.3.	Drainase						
	Biaya Operasional / Pemeliharaan	-	0	0	0	0	0,00%

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Perkiraan Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Sukoharjo untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi di Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel III. 9. Pada sektor air limbah domestik terjadi fluktuasi biaya Operasional/Pemeliharaan dengan pendanaan terbesar

pada Tahun 2018 sebesar Rp254.765.000,00 dan menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp254.765.000,00 kemudian Kembali menurun pada Tahun 2020 ke angka Rp180.188.999,00. Pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp201.600.000,00. Hal ini juga terjadi pada sektor persampahan yang mengalami fluktuasi dari Tahun 2017 – 2021.

Tabel III. 10
Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Sukoharjo untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2027
(x Rp. 1 Juta)

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (x Rp. 1 Juta)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja Sanitasi	13.744	14.443	15.184	15.970	16.803	76.144
1.1.	Air Limbah Domestik						
1.1.	Biaya Operasional / Pemeliharaan	490	490	490	490	490	2.450
1.2.	Sampah Domestik						
1.2.	Biaya Operasional / Pemeliharaan	12.254	12.953	13.694	14.480	15.313	68.694

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Tabel III. 10 menunjukkan Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Sukoharjo untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2027. Pada sektor air limbah domestik diperkirakan biaya operasional/pemeliharaan memiliki besaran yang sama setiap tahunnya hingga Tahun 2027 yaitu sebesar Rp490.000.000,00. Berbeda dengan sektor sampah domestik yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 sebesar Rp15.313.000,00.

Tabel III. 11
Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Sukoharjo dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (x Rp. 1 Juta)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	13.744	14.443	15.184	15.970	16.803	76.144
2	Perkiraan APBD murni untuk Sanitasi	36.773	37.876	39.012	40.182	41.388	195.231
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	17.478	20.640	17.581	17.467	20.310	93.476
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni)	23.029	23.433	23.828	24.213	24.585	119.087
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen)	3.735	6.197	2.397	1.497	3.507	17.333

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Tabel III. 11 menunjukkan Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Sukoharjo dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK. Diperkirakan kemampuan mendanai SSK (APBD Murni) akan meningkat setiap tahunnya hingga Tahun 2027. Sedangkan kemampuan mendanai SSK (komitmen) diperkirakan mengalami fluktuasi. Dengan perkiraan terendah pada Tahun 2026 yaitu sebesar Rp1.497.000,00.

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

5.1. Ringkasan

Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini. Dalam perumusan strategi sanitasi di Kabupaten Sukoharjo, maka rumusannya akan digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisis strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi.

Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*). Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama mengenai Isu Strategis, Permasalahan Mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) per sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing persektor yaitu sektor air limbah domestik, pengelolaan sampah dan drainase. Dengan acuan hasil tersebut, maka Strategi Pengembangan Sanitasi telah dirumuskan strategi. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini.

5.2. Air Limbah Domestik

Strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan isu strategis yang ada saat ini serta kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan air limbah domestik. Adapun strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten Sukoharjo untuk pengelolaan Air Limbah Domestik selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

- Strategi I : Tersedianya Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal (LLTT)
Strategi Menyediakan Peraturan Daerah terkait Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal (LLTT) dalam upaya pengelolaan Air Limbah dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan akses aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Strategi II : Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah (Terpusat dan Setempat)
Strategi Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Umum terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam upaya peningkatan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah baik terpusat maupun setempat.
- Strategi III : Meningkatkan SPALD terpusat (IPAL Permukiman, Kawasan dan Perkotaan)
Strategi Meningkatkan SPALD terpusat (IPAL Permukiman, Kawasan dan Perkotaan) dalam upaya terwujudnya penyelenggaraan sanitasi akses aman, layak, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Strategi IV : Menyediakan sarana pengelolaan air limbah aman
Strategi Menyediakan sarana pengelolaan air limbah aman dalam penyediaan prasarana sarana sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan. guna meningkatkan akses air limbah aman.
- Strategi V : Meningkatkan pelayanan lumpur tinja
Strategi Meningkatkan pelayanan lumpur tinja yang ada yang bertujuan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengolahan air limbah seperti penyedotan limbah tinja rumah tangga sehingga terciptanya kawasan permukiman yang ramah lingkungan.

Strategi VI : Meningkatkan sarana dan prasarana layanan lumpur tinja (pengangkutan dan pengolahan di IPLT)

Strategi Meningkatkan sarana dan prasarana layanan lumpur tinja (pengangkutan dan pengolahan di IPLT) juga bertujuan meningkatkan pelayanan lumpur tinja. Pelayanan lumpur tinja secara berkelanjutan membutuhkan komponen teknis prasarana dan sarana pelayanan lumpur tinja.

Strategi VII : Pembangunan fasilitas SPALD Kawasan dan Permukiman

Strategi Pembangunan fasilitas SPALD Kawasan dan Permukiman dengan maksud meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan masyarakat, dan melindungi kualitas air tanah dari pencemaran serta mengurangi pencemaran badan air.

Strategi VIII : Optimalisasi IPAL Permukiman eksisting

Optimalisasi IPAL Permukiman eksisting guna meningkatkan pelayanan air limbah dengan maksud meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan masyarakat, dan melindungi kualitas air tanah dari pencemaran serta mengurangi pencemaran badan air.

Strategi IX : Review Mansterplan Air Limbah Domestik

Strategi Review masterplan air limbah domestik guna meninjau ulang program pengelolaan air limbah yang sudah berjalan dan merencanakan program kedepannya.

Strategi X : Perencanaan IPAL Kawasan

Strategi Perencanaan IPAL Kawasan dalam upaya terwujudnya penyelenggaraan sanitasi akses aman, layak, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel IV. 1
Kerangka Kerja Logis Air Limbah

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
A	Teknis-Teknologis						
	- SPALD-Setempat						
	1 Akses terhadap jamban yang tidak layak 12%	1 Belum adanya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	1 Meningkatkan akses aman air limbah domestik.	1 Tersedianya akses aman ke fasilitas pengolahan air limbah 15 % pada tahun 2027.	1 Tersedainya Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal (LLTT)	1 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik setempat	1 Hibah pembangunan jamban individu
	2 Jumlah truk tinja kurang memadai (hanya 2 unit)	2 Kurang sosialisasi kepada masyarakat dari lembaga terkait	2 Peningkatan pelayanan lumpur tinja dan optimalisasi pelayanan IPLT	2 Meningkatnya akses layak pengelolaan air limbah domestik menjadi 100% di tahun 2023	2 Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah (Terpusat dan Setempat)	2 Pengembangan kinerja pengelolaan IPLT	1 Operasional IPLT
	3 Praktek pengurasan tinja sangat rendah pertahun (2,5%)	3 Kemampuan APBD Kabupaten dalam membiayai pembangunan sanitasi belum optimal.	3 Tersusunnya perencanaan air limbah yang komprehensif dan berkelanjutan	3 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepedulian lingkungan, perilaku PHBS dan keterlibatan dalam program pengelolaan air limbah	3 Meningkatkan SPALD terpusat (IPAL Permukiman, Kawasan dan Perkotaan)		2 Operasional sarana pengangkut lumpur tinja

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	4 Kondisi IPLT Mojorejo kurang berfungsi optimal (ada kapasitas idle)	4 Rendahnya target dan capaian retribusi air limbah		4 Peningkatan Anggaran Pengelolaan Air Limbah	4 Menyediakan sarana pengelolaan air limbah aman		3 Optimalisasi pengolahan di IPLT
	5 Lumpur tinja berpotensi meluap saat loading dari truk tinja karena ukuran bar screen hanya berukuran 50 cm x 30 cm	5 Kurangnya jumlah truk penyedot lumpur tinja		5 Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2026	4 Meningkatkan pelayanan lumpur tinja		4 Pemeliharaan truk tangki tinja
	6 Lumpur tinja yang telah kering dapat dimanfaatkan, belum ada pemanfaatan	6 Masih banyak tangki septik masyarakat yang tidak memenuhi standart teknis/SNI		6 Penyusunan Peraturan Daerah tentang air limbah domestik dan Peraturan Bupati tentang LLTT Pada Tahun 2023	5 Meningkatkan sarana dan prasarana layanan lumpur tinja (pengangkutan dan pengolahan di IPLT)		5 Penambahan sarana pengangkut lumpur tinja (truk penyedot lumpur tinja)
	7 Tangga bak SSC yang dibangun memiliki kemiringan yang curam sekitar 45° berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja	7 Jumlah IPAL belum memadai		7 Peningkatan pelayanan IPAL Domestik	6 Pembangunan fasilitas SPALD Kawasan dan Permukiman	3 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik terpusat	1 Perencanaan dan Pembangunan IPAL Permukiman
	8 Air yang terdapat dalam bak anaerobik I dan II berwarna kehijauan karena tumbuhnya alga di permukaan bak anaerobik, dimana pertumbuhan alga seharusnya tidak dapat	8 Kurangnya optimalisasi IPLT Mojorejo dalam operasional dan perawatan			7 Optimalisasi IPAL Permukiman eksisting	5 Peningkatan pelayanan air limbah domestik	1 Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan sekolah tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	terjadi dalam bak anaerobik karena tidak adanya oksigen.						dengan pendekatan STBM
9	Saat ini Bak Fakultatif terisi oleh air hujan dan airnya berwarna kehijauan	9 Masih banyak masyarakat yang membuang air limbah domestik ke saluran drainase			8 Review mansterplan air limbah domestik		2 Sosialisasi Masyarakat terkait perda air limbah domestik
10	Pada IPLT belum terdapat unit desinfeksi, untuk memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2017	10 Rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan tangki septik standart			9 Perencanaan IPAL Kawasan		3 Pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap sarana SPALD terbangun baik Setempat maupun Terpusat
11	Belum terdapat SOP IPLT, dan operasional serta perawatan IPLT tidak berjalan	11 Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam menangani permasalahan air limbah.					4 Peningkatan kualitas SDM pada pengelolaan air limbah domestik
12	Inlet dari penyedotan lumpur tinja masih sangat minim (rata-rata 1 truk per bulan)						5 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL)
13	Kondisi tangki septik di masyarakat yang tidak belum penuh meskipun sudah >10 tahun						6 Kajian dan Penyusunan Naskah Akademik Ranperkada /Peraturan Bupati

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
							tentang Pengelolaan Lumpur Tinja dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
							7 Sosialisasi penyedotan lumpur tinja ke IPLT
	- SPALD-Terpusat						
	1 Pembangunan IPAL Permukiman belum merata di wilayah Kabupaten Sukoharjo						
	2 Pembangunan IPAL Permukiman belum disertai dengan monitoring dan evaluasi terkait kinerja KSM pengelola, dan juga efisiensi pengolahan IPAL Permukiman terbangun						
	3 Belum ada pengujian effluent yang dihasilkan oleh IPAL Permukiman yang telah terbangun						
B	Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta. Komunikasi						
	B.1 Pengaturan						
	1 Belum ada Perda yang menangani tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik						

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	2 Belum ada Peraturan tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal (LTT)						
	3 Belum ada kebijakan daerah terkait limbah domestik bagi pengembangan perumahan.						
	B.2 Kelembagaan						
	1 Lemahnya fungsi lembaga pengelolaan air limbah permukiman						
	2 Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah						
	3 Perlu ditingkatkannya koordinasi antara instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah domestik						
	4 Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan						
	5 Belum optimalnya operasional kelembagaan di UPT Air Limbah						

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	6 Kurangnya sosialisasi tentang penyedotan lumpur tinja dan tangki septik aman						
	B.3 Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta serta Komunikasi						
	1 Kesadaran masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam penyedotan lumpur tinja masih rendah, kecuali tangki septik penuh.						
	2 Rendahnya pengembangan pelanggan pada IPAL Permukiman terbangun						
	3 Persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi khususnya terkait air limbah domestik belum menjadi kebutuhan yang mendesak						
	4 Belum terdapat data mengenai tangki septik milik masyarakat yang sudah memenuhi SNI						
	5 Pengetahuan masyarakat terkait keberadaan IPLT di Kabupaten Sukoharjo masih kurang						

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	6 Tingkat kesadaran masyarakat tentang penyedotan lumpur tinja dari tangki septik secara berkala masih kurang						
	7 Pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik, khususnya tangki septik yang memenuhi standart masih rendah						
	B.4 Keuangan						
	1 Belum terdata dengan baik anggaran untuk pengelolaan air limbah khususnya untuk limbah domestik						
	2 Masih terbatasnya alokasi pendanaan pemerintah daerah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi sistem pengelolaaan air limbah terpusat						
	3 Peraturan Daerah tentang retribusi penyedotan lumpur tinja diperlukan review berdasarkan biaya operasional yang diperlukan						

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	4 Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi						
	5 Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.						
	6 Belum adanya anggaran pemeliharaan sektor air limbah untuk IPAL yang sudah terbangun						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

5.3. Persampahan

Strategi pengembangan persampahan selama 5 tahun mendatang sesuai dengan isu strategis yang ada saat ini serta kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan persampahan adalah sebagai berikut:

- Strategi I : Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan Pengurangan Sampah pada Sumber
Strategi Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan Pengurangan Sampah pada Sumber dengan tujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dengan teknologi yang berkelanjutan.
- Strategi II : Meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, TPS)
Strategi Menyediakan sarana dan prasarana dalam penanganan dengan tujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan dan penanganan sampah dengan teknologi yang berkelanjutan.
- Strategi III : Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah (bank sampah, TPS 3R)
Strategi Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah (bank sampah, TPS 3R, TPST Kawasan) dengan tujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dengan teknologi yang berkelanjutan
- Strategi IV : Meningkatkan kapasitas TPA dengan pengembangan luasan
Strategi Meningkatkan kapasitas TPA dengan pengembangan luasan dengan tujuan memperpanjang umur pakai TPA.
- Strategi V : Mendorong peningkatan anggaran Persampahan
Strategi Mendorong peningkatan anggaran Persampahan dengan tujuan mengoptimalkan pelayanan pengelolaan sampah.
- Strategi VI : Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dan swasta
Strategi Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dan swasta dengan tujuan meningkatkan persentase pengurangan sampah dengan teknologi yang berkelanjutan di masyarakat dan swasta.
- Strategi VII : Meningkatkan kapasitas SDM pengelola sampah
Strategi Meningkatkan kapasitas SDM pengelola sampah dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM pengelola sampah.

Strategi VIII : Meningkatkan sistem manajerial dalam kelembagaan pengelola persampahan

Strategi Meningkatkan sistem manajerial dalam kelembagaan pengelola persampahan dengan tujuan mengoptimalkan pelayanan pengelolaan sampah.

Tabel IV. 2
Kerangka Kerja Logis Persampahan

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
A	Teknis-Teknologis						
	1 Belum tercapainya target pengurangan persampahan 30%, Tahun 2022 baru mencapai 16,5%	1 Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sembarangan, sungai dan saluran drainase	1 Meningkatkan persentase penanganan dan pengurangan sampah	1 Tercapainya penanganan persampahan sebesar 70% pada tahun 2024	1 Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan pengurangan sampah pada sumber	1 Peningkatan pelayanan persampahan	1 Penambahan pewadahan terpilah di fasilitas umum
	2 Belum terdapat sarana pengolah sampah yang dapat mengurangi sampah dalam jumlah besar, seperti TPST/PLTSa dan sejenisnya	2 Masih rendahnya tingkat pengurangan sampah di masyarakat	Terbangunnya fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi berkelanjutan	2 Tercapainya pengurangan sampah 30% pada tahun 2024	2 Meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, TPS)		2 Pengadaan sarana pengumpulan motor roda tiga
	3 Jumlah TPS 3R masih kurang optimal, baru terdapat 12 buah di seluruh Kabupaten Sukoharjo	3 Perencanaan pengelolaan sampah belum memadai (diperlukan review Masterplan Persampahan)		3 Meningkatnya sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	3 Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah (bank sampah, TPS 3R, TPST Kawasan)		3 Pengadaan sarana pengumpulan pick up
	4 Terdapat beberapa lokasi yang menjadi buangan sampah liar, terutama	4 Pengurangan sampah di TPS 3 R belum optimal		4 Peningkatan Anggaran Pengelolaan Persampahan sesuai	4 Meningkatkan kapasitas TPA dengan		4 Optimalisasi dan perawatan TPS

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	daerah yang jauh dari TPA Mojorejo			dengan kebutuhan sampai Tahun 2027	pengembangan luasan		
5	Pelayanan persampahan Kabupaten Sukoharjo belum mencapai 100%	5 Kurangnya sarana pengumpulan dan TPS sampah		5 Pengembangan Potensi masyarakat secara sistematis dalam pemilahan sampah rumah tangga pada Tahun 2024	5 Mendorong peningkatan anggaran Persampahan		5 Pengadaan kontainer
6	Jumlah sarana pengumpul dan pengangkut sampah masih kurang untuk pelayanan persampahan ideal	6 Diperlukan pengembangan landfill TPA Mojorejo		6 Sosialisasi pada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan ber PHBS pada Tahun 2022	6 Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dan swasta		6 Pengadaan sarana pengangkut dump truck
7	Belum terdapat pemantauan kondisi TPS 3R	7 Keterbatasan anggaran bidang persampahan membuat peningkatan pelayanan tidak optimal		7 Terbangunnya fasilitas pengolahan sampah skala kawasan/perkotaan	7 Meningkatkan kapasitas SDM pengelola sampah		7 Pengadaan sarana pengangkut arm roll
8	Masih rendahnya pengurangan sampah pada sumber	8 Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah masih rendah			8 Meningkatkan sistem manajerial dalam kelembagaan pengelola persampahan	2 Peningkatan pengurangan sampah	1 Optimalisasi dan pengadaan peralatan di TPS 3R

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	9 Umur landfill TPA Mojorejo yang semakin berkurang, sehingga diperlukan pengembangan landfill dan pengurangan sampah secara progresif	9 Peningkatan kelembagaan dan jumlah operator pengelola persampahan					2 Perencanaan dan pembangunan TPS 3R
	10 Pengolahan IPL kurang optimal	9 Besaran retribusi sampah diperlukan penyesuaian dan menggunakan pola penarikan yang baru untuk optimalisasi pendapatan dari retribusi				3 Optimalisasi TPA	1 Pengadaan alat berat (Excavator dan bulldozer)
	11 Pengembangan landfill TPA menggunakan konstruksi sanitary landfill						2 Operasional landfill dengan pemadatan sampah
	12 Masterplan Persampahan pada Tahun 2017 sehingga perlu dilakukan review						3 Penyusunan DED Penutupan Landfill Sampah dan Pemanenan Gas Metan
							4 Pembangunan jaringan perpipaan pemanenan gas metan (sumur gas, perpipaan, kompresor, pemumi

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
							methan, jaringan ke warga)
							5 Pemantauan lingkungan kawasan TPA Mojorejo
						4 Peningkatan payung hukum pengelolaan persampahan	1 Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tentang Persampahan
						5 Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan dan pengurangan sampah	1 Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dan sekolah tentang pengelolaan persampahan dan pengurangan sampah di sumber
							2 Pembentukan bank sampah dan kelompok komposter di rumah tangga
B Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta. Komunikasi							
B.1	Pengaturan						3 Pendampingan, pengawasan dan monitoring TPS 3R dan bank sampah

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	1 Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis						
	2 Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah langsung ke TPS sehingga tidak terdata dan tidak membayar retribusi persampahan						
	3 Cakupan pelayanan pengangkutan sampah masih belum menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sehingga masih ada masyarakat yang membakar sampah atau membuang ke sungai						
	4 Kurangnya pemilahan sampah di tingkat masyarakat						
	5 Terbatasnya penerimaan jenis sampah di bank sampah						
B.4	Keuangan						
	1 Terbatasnya Dana APBD Kabupaten Sukoharjo dalam bidang persampahan						
	2 Peraturan Daerah tentang retribusi persampahan						

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	diperlukan review berdasarkan biaya operasional yang diperlukan, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah						
3	Kurang optimalisasi pola penarikan retribusi persampahan						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

5.4. Drainase

Strategi pengembangan drainase selama 5 tahun mendatang sesuai dengan isu strategis yang ada saat ini serta kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan drainase adalah sebagai berikut:

Strategi I : Memperkuat Kelembagaan dan koordinasi

Strategi Memperkuat Kelembagaan dan koordinasi dengan memaksimalkan sistem perencanaan pemeliharaan dan operasionalisasi system drainase.

Strategi II : Menggalakkan kegiatan penyuluhan secara aktif dan berkesinambungan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air dan lahan

Strategi Menggalakkan kegiatan penyuluhan secara aktif dan berkesinambungan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air dan lahan dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan system drainase.

Strategi III : Memberikan batasan eksploitasi air dan lahan

Strategi Memberikan batasan eksploitasi air dan lahan dengan tujuan mengurangi resiko bencana seperti banjir yang dapat berpengaruh pada system drainase

Strategi IV : Mengembangkan sistem informasi dan perencanaan sumberdaya air

Strategi Mengembangkan sistem informasi dan perencanaan sumberdaya air dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Strategi V : Mengembangkan model penanggulangan bencana banjir

Strategi Mengembangkan model penanggulangan bencana banjir dengan optimalisasi fungsi drainase untuk menghindari bencana banjir.

Strategi VI : Evaluasi dan monitoring kinerja Saluran Drainase

Strategi Evaluasi dan monitoring kinerja Saluran Drainase dengan tujuan mengoptimalkan fungsi drainase untuk menghindari bencana banjir.

Strategi VII : Optimalisasi lahan resapan yang berkelanjutan dalam pengelolaan drainase lingkungan

Strategi Optimalisasi lahan resapan yang berkelanjutan dalam pengelolaan drainase lingkungan dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Strategi VIII : Meningkatkan sarana dan prasarana drainase

Strategi Meningkatkan sarana dan prasarana drainase dengan tujuan mengurangi resiko banjir dan genangan.

Strategi VIII : Optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase lingkungan

Strategi Optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase lingkungan dengan tujuan meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase.

Tabel IV. 3
Kerangka Kerja Logis Drainase

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
A	Teknis-Teknologis						
	1 Berkurangnya kapasitas saluran drainase/banjir yang disebabkan sedimentasi, sampah, bangunan liar	1 Kurang memadainya fungsi sarana drainase, dari saluran, sungai dan bangunan pelengkap	1 Terwujudnya penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1 Mewujudkan Pengelolaan Drainase yang Komprehensif, Terpadu, Berkelanjutan, Selaras dan Harmonis Dengan RTRW Serta Berbasis Sosial Ekonomi Dalam Satu Kesatuan Sistem Kota	1 Memperkuat Kelembagaan dan koordinasi	1 Peningkatan jaringan drainase	1 Pembangunan/peningkatan infrastruktur drainase perkotaan (Jalan Bekonang - Mojo)
	2 Meningkatnya beban drainase akibat alih fungsi lahan yang tidak diikuti dengan pengembalian fungsi resapan dan tampungan	2 Masyarakat masih membuang sampah dan air limbah grey water ke saluran drainase		2 Meningkatkan sarana draianse berbasis konservasi air dan berkelanjutan	2 Menggalakkan kegiatan penyuluhan secara aktif dan berkesinambungan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air dan lahan		2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur drainase perkotaan (Ruas Pajang-Parangtejo)
	3 Operasi dan pemeliharaan saluran drainas eksisting yang masih kurang optimal	3 Kurangnya operasional dan perawatan sarana drainase yang ada		3 Meratanya cakupan layanan Sistem Drainase	3 Memberikan batasan eksploitasi air dan lahan		3 Pembangunan infrastruktur drainase perkotaan / penataan kawasan (Ruas Baki-Pajang)

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
				Perkotaan di seluruh wilayah Kota Salatiga dengan berkurangnya wilayah genangan			
4	Saluran drainase selain mengalirkan air hujan namun juga air limbah domestik	4 Integrasi antar saluran dan sistem drainase belum berjalan		4 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan peranan saluran drainase	4 Mengembangkan sistem informasi dan perencanaan sumberdaya air		4 Pembangunan infrastruktur drainase perkotaan (Jalan Veteran)
5	Kurangnya perawatan sarana drainase seperti pintu air	5 Dukungan masyarakat, swasta dalam peran serta perawatan masih rendah (baik pendanaan maupun aksi di lapangan)		5 Meningkatkan sarana penyimpanan air di hulu	5 Mengembangkan model penanggulangan bencana banjir		5 Pembangunan/peningkatan infrastruktur drainase lingkungan
6	Terjadinya penyempitan saluran Drainase	6 Perlindungan daerah resapan dan perubahan tata guna lahan masih semakin rendah			6 Evaluasi dan monitoring kinerja Saluran Drainase		6 Penyusunan masterplan drainase kecamatan mojolaban
7	Bantaran sungai dan saluran drainase yang menyempit akibat dari bangunan-bangunan liar				7 Optimalisasi lahan resapan yang berkelanjutan dalam		

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
					pengelolaan drainase lingkungan		
8	Masih terdapat jalan yang tidak memiliki saluran pada sisi kanan-kiri jalan sehingga menyebabkan genangan				8 Meningkatkan sarana dan prasarana drainase		
9	Saat debit Sungai Bengawan Solo, semua air dari saluran-saluran dan anak sungai tidak bisa mengalir ke Bengawan Solo sehingga terjadi backwater dan saluran menggenangi Kawasan permukiman				9 Optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase lingkungan		
10	Tumpukan sampah yang menyangkut di saluran drainase menyebabkan air tidak bisa mengalir						
11	Banyak saluran disekitar permukiman warga tidak pernah dibersihkan sehingga menyebabkan saluran-saluran itu tersumbat dan tidak berfungsi sebagai mana mestinya						
12	Adanya TPS yang berada pada pinggir sungai yang berbatasan dengan Desa Grogol mengakibatkan hampir setengah lebar sungai tertutup oleh sampah						

No	Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	13	Belum tersusunnya pola aliran dan pembagian sub sistem pengelolaan drainase, sehingga menyulitkan penanganan drainase secara komprehensif dan berkelanjutan oleh pihak Pengelola Drainase					
	14	Masterplan drainase belum menyeluruh mencakup wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo					
B	Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta. Komunikasi						
	B.1	Pengaturan					
	1	Belum adanya peraturan daerah terkait pengelolaan drainase					
	B.2	Kelembagaan					
	1	Perlu ditingkatkan kembali sinergi antar lembaga pengelola prasarana drainase					
	2	Penanganan Drainase Kabupaten Sukoharjo hendaknya mengacu pada Masterplan Drainase dengan berbagai penyesuaian dengan kondisi terakhir di lapangan.					

No		Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Startegi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
	B.3	Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta serta Komunikasi						
	1	Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase dan sungai						
	2	Masyarakat membuat bangunan di atas saluran drainase						
	3	Masyarakat masih membuang air limbah grey water dan bahkan black water (dari toilet) ke sungai						
	4	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan menjaga saluran drainase						
	B.4	Keuangan						
	1	Anggaran operasional dan pemeliharaan sarana drainase yang masih rendah						
	2	Porsi belanja fisik sub sektor drainase < 5% dari APBD						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1. Ringkasan

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027, berdasarkan sumber penganggaran dari APBD Kabupaten Sukoharjo, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, DAK (Dana Alokasi Khusus), Swasta/CSR dan sumber masyarakat maupun jenis kegiatan dari sektor air limbah domestik, persampahan, drainase Kabupaten Sukoharjo. Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Sukoharjo berdasarkan berdasarkan 3 (tiga) sektor yaitu air limbah domestik, persampahan, drainase dapat dilihat pada Tabel V. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 (lima) tahun.

Tabel V. 1
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun
(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	8.373	9.023	8.423	8.423	8.123	42.365
2	Persampahan	17.265	22.547	18.583	23.749	20.722	102.866
3	Drainase	2.500	28.000	28.000	28.000	28.000	114.500
Total		28.138	59.570	55.006	60.172	56.845	259.731

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan Tabel V. 1 terlihat bahwa total kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun mendatang sebesar Rp259.731.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan dimasing-masing sub sektor yakni Air limbah domestik sebesar Rp42.365.000.000 (empat puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), Persampahan sebesar Rp102.866.000.000,00 (seratus dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah), dan drainase sebesar Rp114.500.000.000,00 (seratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah).

Tabel V. 2
Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun (x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Kebutuhan Pendanaan	17.478,32	20.640,05	17.581,23	17.466,88	20.309,68	93.476,15
2	Kemampuan Pendanaan	7.943,67	10.628,66	7.069,28	6.429,33	8.720,25	40.791,18
3	Selisih (Rp.)	9.534,65	10.011,38	10.511,95	11.037,55	11.589,43	52.684,97
4	Selisih (%)	54,55%	48,50%	59,79%	63,19%	57,06%	56,36%

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Dalam proses penganggaran terjadi kesenjangan pendanaan (*funding gap*) antara kebutuhan pendanaan dengan kemampuan pendanaan yaitu senilai Rp52.684.970.000 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) .

Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Sukoharjo berdasarkan sumber anggaran APBD Kabupaten Sukoharjo, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, DAK (Dana Alokasi Khusus), Swasta/CSR dan sumber masyarakat dapat dilihat pada Tabel V.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 (lima) tahun per Sumber Anggaran.

Tabel V. 3
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun
per Sumber Anggaran (x Rp. 1 juta)

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
A	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten/Kota	17.478,3	20.640,0	17.581,2	17.466,9	20.309,7	93.476,1
2	APBD Provinsi	2.440,0	9.225,0	3.330,0	8.335,0	4.505,0	27.835,0
3	APBN	4.300,0	30.300,0	31.400,0	30.300,0	29.950,0	126.250,0
4	DAK	1.500,0	750,0	1.500,0	2.100,0	1.500,0	7.350,0
5	Jumlah	25.718,3	60.915,0	53.811,2	58.201,9	56.264,7	254.911,1
B	Non Pemerintah						
1	CSR-Swasta	2.070,0	1.005,0	1.345,0	1.170,0	1.330,0	6.920,0
2	Masyarakat	150,0	150,0	150,0	300,0	300,0	1.050,0
3	Jumlah	2.220,0	1.155,0	1.495,0	1.470,0	1.630,0	7.970,0
Total		27.938,3	62.070,0	55.306,2	59.671,9	57.894,7	262.881,1
Daftar Tunggu		0	200	0	0	1.550	1.450

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan Tabel V.3 terlihat bahwa total kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai pada Tahun 2027 sebesar Rp262.881.100.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta serratus ribu rupiah). Sumber anggaran terdiri dari sumber pemerintahan sebesar Rp254.911.100.000,00 sedangkan sumber non pemerintah sebesar Rp7.970.000.000,00.

5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintahan

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan sumber anggaran pemerintah yaitu APBD Kabupaten Sukoharjo, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel V. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Sukoharjo.

Tabel V. 4
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Sukoharjo
(X Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	1.923,00	2.723,00	1.373,00	1.373,00	1.673,00	9.065,00
2	Persampahan	14.555,32	15.417,05	15.208,23	15.093,88	17.636,68	77.911,15
3	Drainase	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
Total		17.478,32	20.640,05	17.581,23	17.466,88	20.309,68	93.476,15

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan Tabel V. 4 terlihat bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yaitu sebesar Rp93.476.150.000,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan sumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel V. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel V. 5
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah
(X Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	600	1950	600	1350	600	5.100
2	Persampahan	1.340	6.775	2.230	6.485	2.905	19.735
3	Drainase	500	500	500	500	1.000	3.000
Total		4.463,00	11.249	5.355,00	10.361,00	6.532	27.835

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan Tabel V. 5 terlihat bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar

Rp27.835.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan sumber dari APBN dapat dilihat pada Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN.

Tabel V. 6
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN (X Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	3.000	3.000	3.600	3.000	3.000	15.600
2	Persampahan	1.300	1.300	1.300	1.300	1.950	7.150
3	Drainase	-	26.000	26.500	26.000	25.000	103.500
Total		6.323	32.324	33.425	32.326	31.977	126.250

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan Tabel V. 6 terlihat bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp126.250.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan sumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dapat dilihat pada Tabel V. 7. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK.

Tabel V. 7
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK (X Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	1.500	750	1.500	2.100	1.500	7.350
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0,0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0,0
Total		1.500	750	1.500	2.100	1.500	7.350

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan Tabel V. 7 terlihat bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintahan

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah yaitu Swasta/CSR dan masyarakat.

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan sumber dari Swasta/CSR dapat dilihat pada Tabel V. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR.

Tabel V. 8
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta (X Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	1.200	450	1.200	300	300	3.450
2	Persampahan	370	555	145	870	530	2.470
3	Drainase	500	0	0	0	500	1.000
Total		2.070	1.005	1.345	1.170	1.330	6.920

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan Tabel V. 8 terlihat bahwa anggaran yang diajukan melalui swasta/CSR selama 5 (lima) tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp6.920.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan sumber dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel V. 9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat.

Tabel V. 9
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat (X Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	150	150	150	300	300	1.050
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Total		300	150	150	150	300	300

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan Tabel V. 9 terlihat bahwa anggaran yang didapat melalui partisipasi masyarakat selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN SSK

Monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yakni bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah dalam mengamati terus-menerus kejadian dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan. Hasil monitoring adalah kesimpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Hasil evaluasi adalah kesimpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui perbandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui perbandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya.

Tabel VI. 1
Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK

No	Obyek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Penanggung Jawab Utama	Pengumpulan Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantauan		Penerima Laporan (Dinas/Badan/Institusi)
1	Input Capaian Strategis													Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Januari, April, Juli, Oktober tahun berjalan	Bupati, Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Perangkat Daerah
2	Input menu investasi													Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Januari-Maret tahun berjalan	Bupati, Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Perangkat Daerah
3	Input menu akses													Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Januari-April tahun berjalan	Bupati, Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Perangkat Daerah
4	Input menu infrastruktur													Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Januari-Februari dan Bulan Agustus-September tahun berjalan	Bupati, Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Perangkat Daerah

BAB VII

PENUTUP

7.1. Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan berkaitan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten adalah:

- 1) Strategi Sanitasi Kabupaten adalah dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi dasar pembangunan sanitasi di Kabupaten yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, terutama yang terkait dengan percepatan pembangunan bidang sanitasi secara menyeluruh yang meliputi penanganan air limbah, sampah dan drainase lingkungan dalam jangka waktu 5 tahun.
- 2) Maksud dari penysusunan SSK adalah sebagai pedoman perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan sanitasi dan memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di Daerah yang meliputi sektor air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan.
- 3) Tujuan penyusunan dokumen SSK untuk membangun sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di Daerah, mengidentifikasi isu dan permasalahan pembangunan bidang sanitasi di Daerah dan merumuskan strategi, program dan kegiatan pembangunan bidang sanitasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan di Daerah.

7.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dokumen SSK antara lain adalah:

- 1) Dokumen SSK dijadikan sebagai sumber perencanaan dan penganggaran oleh PD teknis dan PD pendukung dalam penanganan dan pembangunan sanitasi.
- 2) Kegiatan penanganan dan pembangunan sektor sanitasi harus dilakukan secara bertahap dan kontinu agar target pelayanan sanitasi dapat tercapai.
- 3) Perlu koordinasi antar berbagai stakeholder dalam penanganan dan pembangunan sanitasi agar pelaksanaan kegiatan sanitasi dapat terpadu.

- 4) Penguatan kelembagaan dalam pembangunan sanitasi.
- 5) Peningkatan keterlibatan swasta, peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sanitasi.
- 6) Perlu adanya studi atau kajian lebih lanjut berkaitan dengan perencanaan sub sector sanitasi secara lebih detail, dengan mempertimbangkan keterpaduan dengan perencanaan tata ruang kota.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI